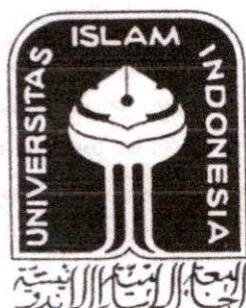


**PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA
PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM
(Studi Pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara)**



Oleh:
Fahmi Syam
NIM: 15913178

Pembimbing:
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Eng

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Syam
NIM : 15913178
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Program Studi : Magister Studi Islam Program Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Judul Tesis : **Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Masyarakat Muslim Perbatasan Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 September 2017

 yatakan
Fahmi Syam



PROGRAM PASCASARJANA
MAQISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1109/PS-MSI/Peng./X/2017

TESIS berjudul : **PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM**
(Studi pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara)

Ditulis oleh : Fahmi Syam

N. I. M. : 15913178

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 26 Oktober 2017



Dr. Husein AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fahmi Syam
Tempat/tgl lahir : Tarakan, 14 Februari 1992
N. I. M. : 15913178
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK
ISLAM (Studi pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan
Utara)

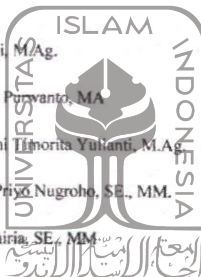
Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag.

Sekretaris : Dr. M. Roy Purwanto, MA

Pembimbing : Dr. Rahman Timorita Yulianti, M.A.

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2017

Pukul : 08.00 - 09.00

Hasil : Lulus

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1678/PS-MSI/ND/X/2017

TESIS berjudul : **PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM**
(Studi pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara)

Ditulis oleh : Fahmi Syam

NIM : 15913178

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Oktober 2017

Barang



Dr. Husein A.T. Saniaky, MSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI
POLITIK ISLAM.

Ditulis Oleh : Fahmi Syam

N I M : 15913178

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 September 2017

Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

يَكْفُرُونَ ﴿٩٦﴾

96. Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

(Al-A'raf : 96)



“Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu dapat mengerjakannya hari

ini”

(Al-Mahfuzhot)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>Ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ḍ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Ṣy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>Ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>Ḍz</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūṭah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

- - - - -	fatḥa h	Ditulis	A
- - - - -	Kasrah	Ditulis	I
- - - - -	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥa h + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyah
2.	Fatḥa h + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	Ī Karīm
4.	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	Ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥa h + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Āi Bainakum
2.	Fatḥa h + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

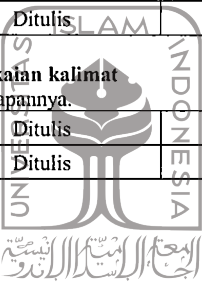
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM (Studi Pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara)

Fahmi Syam
NIM. 15913178

Isu Pengembangan kawasan perbatasan Indonesia khususnya bagian utara Kalimantan semakin krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selama ini harus disadari bahwa perhatian ekonomi terhadap permasalahan perbatasan cenderung terabaikan, sehingga wajar kawasan perbatasan tergolong sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Kondisi ketertinggalan wilayah tersebut sering memunculkan sindiran bahwa wilayah perbatasan merupakan "Halaman Belakang" dari Negara Indonesia.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintahan baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia yang dilihat dalam perspektif ekonomi politik Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan selanjutnya interview atau lebih dikenal dengan wawancara yaitu dialog dengan pihak pemerintah Indonesia yang berada di perbatasan baik pemerintahan Kecamatan maupun Pihak Kabupaten, adapun sumber data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, secara umum kondisi perekonomian masyarakat masih cenderung tertinggal dibandingkan daerah lain, dapat dilihat dari sarana dan prasana yang menunjang masih sedikit. *Kedua*, Masyarakat Sebatik masih sangat bergantung dengan Negara Malaysia dalam berbagai aspek seperti peredaran uang ringgit dan penguasaan komoditas kebutuhan pokok. Dan adapun peran pemerintah terhadap permasalahan perekonomian masyarakat perbatasan Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik telah memperlihatkan keseriusannya mulai dengan optimalisasi jalur tol laut, serta terbentuknya perwakilan kantor Bank Indonesia Kalimantan Utara demi mengatasi permasalahan perekonomian tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara dalam permasalahan ekonomi perbatasan sudah memperlihatkan keseriusannya. Namun harus diakui bahwa peran tersebut masih belum optimal dan perlu perbaikan yang lebih serius demi kesejahteraan masyarakat perbatasan yang lebih baik.

Kata Kunci : *Peran, Pemerintah, Perekonomian, Perbatasan, Ekonomi Politik Islam*

ABSTRACT

ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE ECONOMY OF MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC POLITICAL ECONOMY (Case Study of Sebatik Island, Kalimantan Utara Province)

Fahmi Syam
Student ID: 15913178

Issues in the development of Indonesian borderlands, particularly in northern Kalimantan, have become crucial and required serious attention from both local and central governments. It should be realized that attention to economic problems in borderlands tends to be neglected, so it is usually normal for a borderland to become an underdeveloped region in Indonesia. This underdevelopment condition often brings up an insinuation that border areas are only the backyard of Indonesia.

This study aimed to describe and analyze the role of local governments at both regency and district levels in solving economic problems in borderlands of Indonesia from the perspective of Islamic political economy. This study was a field research with qualitative descriptive approach conducted in Sebatik Island of Nunukan Regency in Kalimantan Utara Province. Data was collected through documentation, observation, and interview by engaging a dialog with the Indonesian government in the border area, be it the district or regency level. Data was then analyzed qualitatively and explained descriptively.

The findings showed that, first, the economic condition of the society was generally underdeveloped when compared to other regions, considering the limited facilities and infrastructure. Second, people in Sebatik are highly dependent on Malaysia in such various aspects as *ringgit* currency distribution and domination of basic commodity supply. The role of the government in solving economic problems of the society in borderlands had been indicated by the optimization of sea toll and opening of the representative office of the Bank of Indonesia in Kalimantan Utara to overcome economic problems. Therefore, it was clear that the government had shown their seriousness. However, it should be admitted that the role had yet to be optimum and serious improvement should be encouraged for better welfare of the society in borderlands.

Keywords: *Role, Government, Economy, Border, Islamic Political Economy*

October 2, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARI NO 21
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

cilacs
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله حمداً مستعيناً ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang penguasa alam semesta, atas lindungan, rahmat, hidayah, dan kesempatan_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Perkeonomian Masyarakat Muslim Perbatasan Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam”** dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para Khulafaur rasyidin, dan para khalifah Allah SWT.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam kesempatan ini Penulis sadar bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Nandang Sutrisno,SH.,M.Hum., LL.M., Ph.D, atas segala kebijakan, perhatian dan dorongan sehingga tesis ini dapat terwujud.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. H. Tamyiz Mukarrom, MA.
3. Dr. Hujair AH Sanaky, M.SI. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Yusdani, M.Ag selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, sebagai dosen pembimbing program pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan tesis ini.

6. Dosen-Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, Para Staff Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membantu proses berjalannya penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan selesainya tesis.
7. Para pegawai pemerintahan kecamatan Sebatik Tengah, serta pegawai Bagian Kerjasama Dan Batas Negara kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang telah senantiasa membantu kelancaran penelitian.
8. Keluarga tercinta, Ibunda Hj, Siti Jamilah S.Pd.I, selaku orang tua yang luar biasa memberikan dukungan penuh serta menyertai gerak langkah dengan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Kakak-Kakakku terhormat Nurfiah Hafid, Azhari Hafid, dan Fadliah Hafid serta seluruh keponakanku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-Teman seangkatan mahasiswa Pascasarjana MSI MIAI Universitas Islam Yogyakarta angkatan 2015/2016 konsentrasi Ekonomi Islam atas dukungan motivasi yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-Teman Seperjuangan di kos Pak Syarif Papringan Yogyakarta yang selalu menghadirkan tawa dan canda disela-sela kesibukan penyusunan tesis ini.

Sebagai akhir dari pengantar ini saya mohonkan, semoga semua amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut di atas mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Amin ya robba alamin.

Yogyakarta, 22 September 2017

Fahmi Syam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	V
HALAMAN NOTA DINAS	VI
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
HALAMAN MOTTO	IX
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	X
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR TABEL	XXII
DAFTAR GAMBAR	XXII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	31
1. Teori Profil Perekonomian Masyarakat	31
2. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam	

a. Teori Tentang Peran	39
b. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi	40
1) Fungsi Alokasi Negara	43
2) Fungsi Distribusi Negara.....	47
3) Fungsi Stabilisasi Negara	49
3. Konsep Masyarakat Perbatasan	
a. Karakteristik Wilayah perbatasan	51
b. Permasalahan Kawasan Perbatasan	54
4. Ekonomi Politik Islam	
a. Definisi Ekonomi Politik	57
b. Pendekatan Ekonomi Politik Dan Politik Ekonomi	59
c. Konsep Ekonomi Politik Islam	62
d. Ciri-Ciri Ekonomi Politik Islam	66
e. Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik Islam	69
f. Kerangka Konseptual Ekonomi Politik Islam	71
g. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomi Politik Islam	73
h. Teori-Teori Ekonomi Politik Islam	79
5. Kerangka Pemikiran	94
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	95
1. Jenis Penelitian	95
2. Pendekatan Penelitian	96
B. Tempat Dan Lokasi Penelitian	97
C. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	98
D. Sumber Data	99
E. Teknik Pengumpulan Data	100
1. Observasi	100

2. Wawancara	100
3. Dokumentasi	101
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	102

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pulau Sebatik	106
1. Kondisi Geografis	106
2. Kondisi Sosio Demografi	110
a) Kependudukan	110
b) Pendidikan	113
c) Pekerjaan	115
d) Kesehatan	113
e) Sarana Peribadatan	119
3. Gambaran Umum Pemerintahan sebatik	119
a) Aparatur Desa Kecamatan Sebatik	119
b) Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah	121
c) Aparatur Kabupaten Nunukan	125
B. Hasil Penelitian	126
1. Profil Perekonomian Masyarakat Perbatasan Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik	126
a) Potensi-Potensi Ekonomi Daerah Perbatasan	125
b) Insfrastruktur, Sarana, Dan Prasaranan	132
c) Transaksi Ekonomi Masyarakat Perbatasan	139
2. Peran Pemerintah Indonesia Dalam perekonomian masyarakat Perbatasan Indonesia Malaysia Di Pulau Sebatik	141
a) Pembentukan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) BNPP	142
b) Pemekaran Kecamatan Sebatik	143
C. Analisis Hasil Penelitian	148

1. Profil Perekonomian Masyarakat Muslim Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik	148
a) Ketergantungan Ekonomi Dengan Negara Malaysia	151
b) Transaksi Ekonomi Masyarakat Perbatasan	156
2. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Perekonomian Masyarakat Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam	160

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	175
B. Saran	179

DAFTAR PUSTAKA	180
-----------------------	-----

Lampiran-Lampiran

CV Penulis/Mahasiswa



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu</i>	24
Tabel 2.2	<i>Perkembangan Jumlah Kamar Usaha Akomodasi</i>	37
Tabel 2.3	<i>Model-Model Ekonomi Politik dilihat dari metodologi dan Substansi</i>	61
Tabel 4.1	<i>Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah</i>	106
Tabel 4.2	<i>Keadaan Penduduk Per Desa</i>	109
Tabel 4.3	<i>Data Penduduk Berdasarkan Agama</i>	110
Tabel 4.4	<i>Data Penduduk Berdasarkan Perkawinan</i>	110
Tabel 4.5	<i>Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	110
Tabel 4.6	<i>Data Penduduk Berdasarkan Umum</i>	111
Tabel 4.7	<i>Jumlah Sekolah, Guru, Dan Rasio Murid Dan Guru Per Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Sebatik Tengah</i>	112
Tabel 4.8	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Sebatik Tengah</i>	113
Tabel 4.9	<i>Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kecamatan Sebatik Tengah</i>	114
Tabel 4.10	<i>Sarana Peribadatan</i>	116
Tabel 4.11	<i>Sarana Jalan</i>	116
Tabel 4.12	<i>Pemerintahan Desa</i>	117
Tabel 4.13	<i>Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah</i>	118
Tabel 4.14	<i>Instansi Pemerintah Lainnya Di Sebatik</i>	121
Tabel 4.15	<i>Sektor Ekonomi Masyarakat</i>	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Peta Pulau Sebatik</i>	3
Gambar 2.1 <i>Kerangka Konseptual Ekonomi Politik Islam</i>	70
Gambar 2.2 <i>Kerangka Pemikiran Penulis</i>	92
Gambar 3.1 <i>Skema Analisis Data</i>	103
Gambar 4.1 <i>Peta Kecamatan Sebatik Tengah Pulau Sebatik</i>	107
Gambar 4.2 <i>Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017</i>	120



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan berkonsep *archipelagic state*¹ dengan 17.508 pulau. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki cukup banyak wilayah yang berbatasan dengan banyak negara tetangga, meliputi perbatasan di darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan Serawak dan Sabah), Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.²

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan ketertahanan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

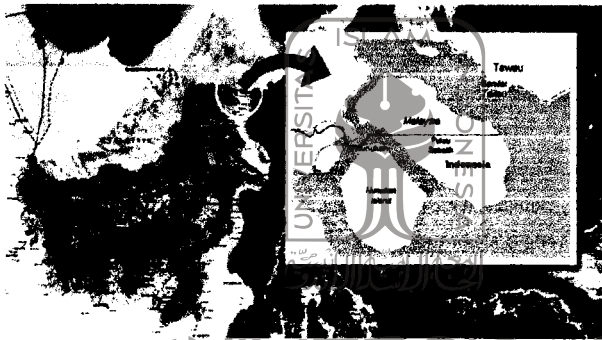
Isu tentang dinamika masyarakat lokal yang berada di perbatasan Indonesia adalah tema yang selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari berbagai pihak di Indonesia, baik oleh masyarakat di wilayah perbatasan itu sendiri, pemerintah daerah perbatasan dan pemerintah pusat di Jakarta. Setidaknya ada beberapa argument yang mendukung pernyataan mengenai pentingnya kajian masyarakat lokal di perbatasan. *Pertama*, daerah perbatasan adalah wilayah strategis yang menjadi wajah sebuah negara, dalam hal ini Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena wilayah-wilayah tersebut menjadi pintu masuk bagi warga asing atau pihak luar lainnya yang berkepentingan untuk masuk ke Indonesia. *Kedua*, Masyarakat Perbatasan yang ada di NKRI cenderung masuk kedalam kategori masyarakat yang tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. *Ketiga*, kajian mengenai masyarakat lokal di Wilayah-Wilayah perbatasan di Indonesia belum

¹ Istilah Archipelagic state digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang terdiri dari kepulauan yang memiliki kesatuan geografi, ekonomi, politik, serta sejarah. Term ini sama dengan konsep wawasan nusantara yang diperjuangkan Indonesia sejak deklarasi Juanda. Hal ini perlu digarisi bawahii untuk membedakan dengan negara yang terdiri dari kepulauan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai archipelagic state, seperti New Zealand dan Inggris lihat dalam tulisan Dr. Sobar dkk, *Boundary Making Theory Dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm 25.

² I Made Andi Arsana, *Aspek Geo-Spasial Batas Maritim International Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan Kebijakan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm 67.

terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak hasil kajian yang berupa aksi kebijakan pasca kajian.³

Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing, dengan potensi yang berbeda antara satu kawasan dan kawasan lainnya. Salah satu perbatasan Indonesia yang sering mendapatkan perhatian serius adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau sebatik, kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Pulau sebatik ini berbatasan langsung dengan wilayah bagian sabah Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Indonesia.⁴ yakni bagian selatan milik Republik Indonesia dan bagian utara milik Kerajaan Malaysia. Luas wilayah Sebatik Indonesia $\pm 247,47$ KM2, sedangkan luas wilayah Sebatik Malaysia $\pm 187,23$ KM2. Wilayah Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan negara Malaysia baik darat, laut, maupun udara.⁵



Gambar 1.1
Peta Pulau Sebatik

Jumlah penduduk Pulau Sebatik 47.709 jiwa. Sebagian masyarakatnya mencari nafkah di Kota Tawau (Negara Bagian Sabah, Malaysia). Masyarakat perbatasan ini bekerja pada sektor perdagangan, yakni keluar negeri (Kota Tawau Malaysia) dipagi hari dan kembali ke tanah air

³ Marsetio, *Konstruksi Marginalitas Masyarakat Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natuna*, Disertasi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), hlm 15.

⁴ Menurut Catatan sejarah, pulau sebatik merupakan salah satu tempat terjadinya pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia saat konfrontasi tahun 1963 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Lihat Saleh hairul, *Nasionalisme Di tapal Butas* (Yogyakarta : Interpena, 2010) hlm 22.

⁵Sebatik News, "Pulau Sebatik Masuk 7 Perbatasan Negara Terunik di Dunia", Dikutip Dari <http://www.sebatiknews.com/2016/11/pulau-sebatik-masuk-7-perbatasan-negara-terunik-di-dunia.html>, diakses pada hari Sabtu 12 November 2016, Jam 13.50 WIB.

(Sebatik Indonesia) disore hari.⁶ bahkan di daerah perbatasan ini isunya terdapat dua mata uang yang berlaku di masyarakat, yakni Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia. hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat perbatasan Pulau Sebatik mayoritas disuplai dari luar negeri, yakni dari Kota Tawau Malaysia.⁷

Menariknya kemudian bahwa terdapat beberapa rumah warga di perbatasan Pulau Sebatik terbelah menjadi dua negara, yakni ruang tamu masuk wilayah negara Indonesia, sedangkan dapurnya masuk wilayah negara Malaysia. rumah ini terletak persis berada digaris patok perbatasan negara Indonesia-Malaysia, yakni patok 3 di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara.⁸

Terlepas dari keunikan tersebut, tidak dapat dipungkiri realita yang terjadi di pulau sebatik bahwa dominasi perekonomian masih dikuasai masyarakat Tawau, Malaysia. Dan sangat berimbas terhadap kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan. hal ini disebabkan karena letak geografis Pulau Sebatik yang sulit dijangkau dengan alat transportasi dengan daerah lain di Indonesia menjadi pilihan warga Pulau Sebatik untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara tetangga Malaysia (Kota Tawau).⁹ Jaraknya sekitar 5 mil laut yang dapat ditempuh selama 15 menit dari sebatik dengan menggunakan speed boat.¹⁰ sehingga membuat produk-produk Malaysia sangat mendominasi pasaran. Bahkan menjadikan angka ketergantungan barang-barang dari negara Malaysia cukup tinggi yang dialami masyarakat seperti barang-barang kebutuhan pokok. Bahkan dikatakan bahwa sekitar miliaran rupiah uang warga sebatik beredar di Kota Tawau Malaysia akibat dari ketergantungan dari Malaysia.

Kehidupan masyarakat muslim di perbatasan tak sedikit mengalami pasang surut permasalahan. walaupun terlihat sering dikunjungi oleh para elit negeri, mulai dari presiden hingga pejabat daerah, akan tetapi belum memberikan perubahan yang berarti. Karena pulau sebatik dapat dikatakan sebagai wilayah perbatasan yang masih tertinggal dan miskin, khususnya pembangunan infrastruktur apabila dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Ditambah lagi dengan

⁶BPS Nunukan, Dikutip Dari <https://nunukankab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/50> diakses pada hari sabtu 12 november 2016, 12.30 WIB.

⁷Antara News, "Negara Di Rugikan Beredarnya Ringgit di Nunukan", yang dikutip Dari http://kaltim.antaranews.com/berita/18023/negara-dirugikan-beredarnya-ringgit-di-nunukan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news diakses pada hari sabtu 12 november 2016.

⁸Kompas News, "Rumah Wargadi Perbatasan Teras di Wilayah Indonesia, Dapur di Malaysia", Dikutip Dari <http://regional.kompas.com/read/2016/08/16/07592931.rumah.warga.di.perbatasan.teras.di.wilayahindonesia.dapur.di.malaysia> diakses pada hari sabtu 12 november 2016, pukul 10.15 WIB.

⁹Sebatik News, "Miliaran Rupiah Uang Warga Pulau Sebatik Beredar di Malaysia", Dikutip Dari <http://www.sebatiknews.com/2016/05/miliaran-rupiah-uang-warga-pulau-sebatik-beredar-di-malaysia.html>. Diakses pada hari selasa 22 November 2016, jam 11.23 WIB.

¹⁰ Saleh hairul, *Nasionalisme Di tapal Batas* (Yogyakarta : Interpena, 2010), hlm 9.

permasalahan ekonomi yang tak terus berlanjut seperti dominasi barang Malaysia, serta peredaran duit ringgit semakin menambah kelam kondisi perbatasan tersebut. sehingga tak heran dengan kondisi tersebut memberikan kesan bahwa kawasan perbatasan masih terbelakang.

Masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Pulau Sebatik mayoritas menganut agama Islam dan taat dalam menjalankan ibadahnya, sehingga terlihat etos kerja masyarakat berasal dari agama.¹¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mega Oktaviany¹², bahwa agama menjadi salah satu faktor yang memotivasi para masyarakat untuk terus berkerja walaupun dihadapkan pada situasi yang tak menentu.

Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Sehingga, dengan perhatian yang serius diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan.

Pembangunan ekonomi dan percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan berbasis kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian dibutuhkan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini program-program yang serius dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan. peran Negara dalam pengaturan ekonomi bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syari'ah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-Prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-qur'an, sedangkan ucapan, praktik dan persetujuan bersumber pada Sunnah Nabi.¹³

Begitu pentingnya peran negara dalam pertumbuhan ekonomi dalam paradigma ekonomi juga diungkapkan oleh *Lester Thurow* sebagaimana dikutip Umar Capra. Thurow menyatakan "Jika Negara Memiliki pertumbuhan yang lebih Cepat, Maka ia akan memiliki lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih tinggi bagi siapa saja, dan ia tidak perlu risau mengenai distribusi

¹¹ Salah satu fungsi dari agama karena ia mampu membangun dan membangkitkan kekuatan serta motivasi menuju pada kenyataan yang riil. Lihat Clifford Geertz, *The Interpretation Of Cultures*. (New York: Basic Books, 1974), hlm 90.

¹² Mega Oktaviany, "Etos Kerja Entrepreneur Muslim Suku Bugis Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur", Tesis Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Yogyakarta 2013, hlm 33.

¹³ Sabahudin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Kuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baiul Mal*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlm 41.

lapangan kerja atau pendapatan. Karena secara otomatis akan menjadi lebih merata seiring dengan proses pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Dalam Islam, Negara atau Pemerintah memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi yang pada dasarnya ditunjukkan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup minimum bagi semua anggota masyarakatnya, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Demi tercapainya tujuan-tujuan ini, negara harus menjalankan tugas-tugas tertentu. Negara harus menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya. Fasilitas infrastruktur harus disediakan dengan benar dan ada lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakkan hukum dan stabilitas, serta memberikan keadilan bagi semua.¹⁵

Diaspek lain terlihat juga bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk membangun wilayah perbatasan menjadi wilayah yang unggul, Karena merupakan pintu gerbang untuk memasuki wilayah Indonesia, sehingga perlu kiranya menampilkan kesan yang baik ketika memasuki Indonesia. Sehingga menarik bagi peneliti untuk melihat peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pembangunan pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik khususnya dalam bidang perekonomian pulau sebatik, kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Penelitian ini mengambil lokasi di pulau sebatik, khususnya kecamatan sebatik tengah, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan alasan, daerah perbatasan masih menjadi daerah yang masuk dalam daerah tertinggal dan terluar, sehingga menarik untuk melihat dari sudut pandang Ekonomi Politik Islam dalam melihat permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat disusun judul Tesis: ***PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM (STUDI PADA PULAU SEBATIK, PROVINSI KALIMANTAN UTARA).***

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana profil perekonomian masyarakat muslim Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik ?
2. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam perekonomian masyarakat Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴ Lester Thurow, *The Illusion Of Economy Necessity*, Dalam solo and Anderson (1981), hlm 250, dalam M. Umar Capra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Islam and Economic Challenge, alih Bahasa ikhwan Abidin. Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hlm. 52.

¹⁵ Sabahudin Azini, *Menimbang Ekonomi Islam-Kewangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005). hlm 41.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan penelitian:

1. Mendiskripsikan profil perekonomian masyarakat Muslim yang berada Di Perbatasan Indonesia-Malaysia.
2. Menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekonomi perbatasan Indonesia-Malaysia dalam perspektif ekonomi politik Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut

- a. Manfaat Akademis : penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan ekonomi Islam yang tidak hanya dikaji pada pendekatan normatif tetapi juga pada pendekatan sosiologis dan ekonomi politik Islam.
- b. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan berguna bagi para penentu kebijakan, khususnya kebijakan pembangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga dalam menentukan kebijakan kedepannya terutama yang berhubungan dengan pembangunan kehidupan manusia dapat memberikan prospek perekonomian yang baik bagi masyarakat muslim di perbatasan Indonesia-Malaysia terutama pada daerah sebatik, kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab I

Pendahuluan, meliputi : (a) latar belakang Masalah, (b) perumusan masalah yang diambil, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, serta (e) sistematika pembahasan.

2. Bab II

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang mencakup (a) Kajian penelitian Terdahulu, (b) Kerangka Teori, yang meliputi ; 1. Teori Umum Peran, 2. Teori Perekonomian Masyarakat, 3. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam, 4. Konsep Masyarakat Perbatasan, 5. Ekonomi Politik Islam.

3. Bab III

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi (a) Jenis penelitian dan pendekatan, (b) Tempat dan lokasi penelitian (c) Informan Penelitian dan teknik penentuan informan, (d) Teknik pengumpulan data, (f) Teknik analisis data.

4. Bab IV

Bab keempat ini merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan yang disertai analisis atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

5. Bab V

Bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian literatur

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Ini bukanlah satu-satunya penelitian yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Akan tetapi telah ada beberapa penelitian lain untuk kemudian dinilai sebagai penelitian pendahuluan. Dan penelitian tersebut tidak hanya sebagai literatur tetapi juga turut mewarnai corak penelitian ini. Secara umum ada beberapa penelitian yang ditemukan tentang perbatasan, serta peran negara dalam pengelolaan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus dan spesifik mengurai dan mendalami permasalahan perbatasan melalui pendekatan sosiologis dan ekonomi politik Islam. Adapun penelitian-penelitian yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

Penelitian Ade Ima T. Pangalasan dengan judul *Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Kawasan Perbatasan Antar Negara Di Kabupaten Kepulauan Talaud*, adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kawasan perbatasan di Indonesia dengan karakteristik daerah yaitu sebagai daerah kepulauan, daerah tertinggal dan terisolir, serta rawan bencana, serta infrastruktur dan armada perhubungan yang kurang mendukung. Klasifikasi lintas batas tradisional, menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran di *entry exit point* Miangas, sehingga perdagangan lintas batas sering merugikan masyarakat di kawasan perbatasan dan menimbulkan permasalahan baik secara keamanan maupun kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pengembangan perekonomian kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Digunakan analisis *shift share* dan model pendekatan gravitasi untuk mengukur kinerja sektor ekonomi dan daya Tarik Tibanban sebagai sisi perbatasan di Filipina. Hasilnya menunjukkan bahwa Talaud memiliki berbagai potensi seperti sektor pertanian dengan subsektor perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor basis dan pemberi kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten. Miangas sebagai sisi perbatasan Indonesia-Filipina sangat merasakan keterisolasian, sehingga interaksi perdagangan lintas batas Indonesia-Filipina di Miangas sebagai *entry exit point* perlu untuk ditingkatkan menjadi klasifikasi internasional.¹

Penelitian Sinyo Gamma timisela dengan judul *Dampak perdagangan Lintas batas terhadap perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus : Wilayah Perbatasan RI-PNG di distrik Muara Tami)*. Penelitian ini terlihat bermula dari keprihatinan untuk melihat apa faktor yang

¹ Ade Ima T. Pangalasan. "Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud", Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3 September 2013, Hal.197-207.

utama daya tarik bagi orang PNG untuk menghabiskan uang mereka di Indonesia (Skow-Wutung-market), perdagangan dengan orang-orang PNG secara langsung di wilayah perbatasan. Pada kondisi perbatasan ini terlihat jelas adanya ketergantungan pada produk Indonesia, sehingga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memasarkan produk nasional mereka dan produk lokal, sehingga orang-orang di perbatasan negara mampu untuk meningkatkan status ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menemukan apa kekuatan, kelemahan, Kesempatan dan memperlakukan yang dihadapi dalam pembangunan daerah perbatasan. Hasil Analisis ini menemukan bahwa daerah perbatasan distrik Muara Tami Quadrant, yang berarti pertumbuhan agresif di wilayah dapat dicapai oleh menggunakan kekuatan dan peluang yang ada, meskipun ada kelemahan dan ancaman tetapi tidak menutup kesempatan untuk pengembangan sektor perdagangan untuk tumbuh di daerah ini meskipun mereka masih informal.²

Penelitian Muhammad Hairul Saleh dengan Judul *Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)*. penelitian ini pada dasarnya ingin memberikan gambaran mengenai eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik dengan fokus pada kemampuan perantau Bugis dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang dibarengi dengan kemampuan membangun relasi, baik ekonomi maupun sosial sebagai upaya turut berpartisipasi dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana untuk mendapatkan data dan informasi terkait, dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku-buku dan tulisan-tulisan hasil penelitian yang *concern* dengan perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Teknik lain yang digunakan adalah melalui wawancara dengan warga perantau Bugis yang menjadi pelaku. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Migran Bugis di Pulau Sebatik merupakan perantau-perantau yang memiliki mimpi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Interaksi antar sesama perantau Bugis di Pulau Sebatik, serta interaksi dengan perantau dari wilayah lain dan masyarakat asli, merupakan modal sosial yang sangat menentukan bagi kesuksesan perantau Bugis di Pulau Sebatik.³

Penelitian Zaenuddin Hudi Prasjo dengan Judul *Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan*. Penelitian ini membahas kondisi masyarakat perbatasan yang ada di Indonesia yang cenderung masuk dalam kelompok masyarakat yang tertinggal dari berbagai aspek pembangunan. Kajian mengenai masyarakat lokal di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia belum terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak hasil kajian yang berupa aksi kebijakan pasca kajian. Dan penelitian ini berpusat di Nanga Badau yang terletak di daerah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dan Serawak (Malaysia) merupakan salah satu

² Sinyo Gamma Timisela, "Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus : Wilayah Perbatasan RI-PNG di distrik Muara Tami", Jurnal JESP-Vol.7,No 2 Nopember 2015-ISSN 2086-1575.

³ Muhammad Hairul Saleh, "Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies", Jurnal Borneo Administrator, Vol 11 No.1 2015.

wilayah perbatasan yang tertinggal. Tulisan ini memotret isu-isu dinamika dan eksistensi tradisi lokal dalam kerangka globalisasi. Tampak bahwa sikap ramah dan menghormati pendatang merupakan salah satu bentuk nyata bahwa mereka sangat terbuka dengan adanya arus global dan lokal. Mereka juga memiliki kesadaran diri akan posisi mereka sebagai bagian dari penduduk dunia. Adanya ruang interaksi bagi dunia luar, seperti mudahnya akses keluar masuk ke negara lain mengakibatkan pola interaksi, informasi dan komunikasi etnis Iban menjadi berkembang. Hal tersebut dapat dilihat pada aktivitas masyarakat Iban sehari-hari yang telah memanfaatkan dan menggunakan perangkat handphone, televisi dan teknologi modern lainnya.⁴

Penelitian CB Herman Edyanto dengan Judul *Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat*. Penelitian ini membahas batas International antara dua negara yang merupakan daerah penting dimana adanya aktifitas masyarakat dikedua negara. Akan tetapi perbedaan anatara negara perbatasan jelas terlihat, Perbedaan antara kedua negara dalam daerah perbatasan meliputi beberapa aspek seperti pendapatan nasional per kapita yang tentang pada sering memberikan hidup berbeda warna juga di kalangan masyarakat perbatasan dan sosial pendidikan. Kenyataannya adalah bahwa kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia perbatasan masyarakat lebih dipengaruhi oleh persyaratan dan budaya masyarakat Malaysia. Pemerintah Indonesia saat ini mencoba untuk dapat membangun Nasional program dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan Kalimantan Barat Provinsi antara lain membangun industri dan bekerjasama dengan pemerintah Malaysia.⁵

Penelitian Rizky Yudaruddin dengan judul *Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur : Upaya Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis*. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas ekonomi yang terjadi diwilaya perbatasan Kalimantan Timur-Utara yang berisikan tiga kabupaten (Malinau, Nunukan, Kutai Barat) dan 15 kecamatan di tiga wilayah tersebut yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, Malaysia. Disparitas diukur baik antar kabupaten perbatasan maupun Malaysia. Kemudian, mengkaji tingkat ketersediaan infrastruktur serta implikasi dari variabel sosial ekonomi perbatasan terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Hasil perhitungan disparitas wilayah perbatasan menunjukkan bahwa secara umum (rata-rata) Provinsi Kaltim memiliki tingkat kesenjangan regional yang berat yaitu rata-rata di kisaran angka 1,474. Jika kita komparasikan dengan wilayah di Negara

⁴ Zaenuddin Hudi Prasajo, *Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan*, Jurnal Walisongo, Vol 21, No 2 November 2013.

⁵ CB Herman Edyanto, "*Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat*". Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol 9, No.3 Desember 2007 hlm. 120-129.

Malaysia yang paling dekat yaitu Negara Bagian Sabah, maka terdapat kecenderungan bahwa di negara tetangga tersebut tidak menghadapi masalah kesenjangan yang serius.⁶

Penelitian Mayasuri Presilla dengan Judul *Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan*. Dalam penelitian ini membahas tentang pentingnya pembangunan sumber daya alam daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat local perbatasan. Penelitian ini bertempat di kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara, dan data yang diambil dalam tulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah terdapat isu yang sangat krusial yang menjadi fokus utama di wilayah perbatasan yaitu masalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.⁷

Penelitian Afrizal yang berjudul *Potensi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah oleh perbankan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Tahun 2008*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik dan potensi usaha mikro-small middle (UMKM) dan untuk memahami potensi biaya oleh lembaga keuangan formal (perbankan) di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Temuan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dominan dilakukan di perbatasan Entikong dan Sajingan Besar adalah perdagangan dan jasa, di mana inhibitions dan pekerja asing sebagai cakupan pemasaran, serta orang-orang Serawak sebagai target pasar utama. Kondisi infrastruktur di daerah relatif buruk dan tidak memiliki pasar yang representatif.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Endang rudiati dengan judul *Intergrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur; Perbatasan Indonesia – Sabah Malaysia)*. Penelitian ini merupakan studi tentang kegiatan ekonomi Masyarakat Perbatasan di desa aji kuning di kecamatan sebatik kabupaten nunukan Kalimantan timur, yang terintegrasi dengan pasar tawau. Wilayah sabah Malaysia. Penelitian difokuskan pada pasar sebagai arena interaksi. Pasar menjadi *Entry Point* untuk melakukan pengamatan, dalam hasil pengamatannya bahwa masyarakat aji Kuning membangun jaringan- jaringan perdagangan yang berkaitan dengan sosial, politik, budaya,

⁶ Rizky Yudaruddin Dan Rian Hilmawan, "Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur : Upaya Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis". Jurnal Mulawarman, Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper EP UNNES 2012.

⁷ Mayasuri Presilla, *Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan*. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 24, Nomor 2, Agustus 2011.

⁸ Afrizal, "Potensi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Perbankan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Tahun 2008". Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol 7, No 2, Mei 2009.

kekerabatan dan etnik. Mereka mengaktifkan simpul kekerabatan dan etnisitas untuk membangun jaringan.⁹

Penelitian Robert Siburian dengan Judul *Pulau Sebatik : Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia*. Artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan September 2011. Pulau Sebatik adalah terletak antara Nunukan, ibukota Kabupaten Nunukan di Indonesia dan Tawau, ibukota Tawau District di Malaysia. Di Indonesia Sebatik bukan pusat bisnis namun populasi berkembang pesat. Sebagian besar penduduknya adalah migran yang datang dari berbagai tempat di Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan. Sebagai tempat yang sangat dekat dengan Tawau, pusat bisnis di Sarawak, Malaysia, dinamika Sebatik Indonesia ekonomi sangat tergantung pada kondisi ekonomi di Tawau. Banyak barang-barang yang dikonsumsi oleh Sebatik Indonesia penduduk, seperti makanan kaleng dan minuman, elektronik barang, dan gas yang diimpor dari Tawau. Produk berasal ke Sebatik berdasarkan perjanjian perdagangan perbatasan melalui MOU ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tahun 1967. Dalam Selain itu, penggunaan mata uang ringgit Malaysia sebagai sarana transaksi telah membuat perekonomian tercipt sebagai Sebatik Malaysia. Artikel ini mengeksplorasi dinamika kondisi ekonomi di Sebatik sebagai daerah perbatasan, yang ekonomi potensi, penggunaan mata uang ganda, dan akhirnya apa yang akan terjadi pada perekonomian Sebatik tanpa Tawau.¹⁰

Penelitian Azansyah dengan Judul *Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan di Indoensia, dan Membangun lembaga yang efektif*. Penelitian ini membahas peran lembaga dalam kondisi ekonomi dan kelembagaan di Indonesia. Pertama membahas pengembangan kelembagaan dan perannya dalam perekonomian. Kedua membahas kondisi kelembagaan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ketiga dibahas tentang membangun institusi yang efektif. Itu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga pertama memiliki peran besar dalam perekonomian, kedua institusi pembangunan di Indonesia masih sangat lemah, berdasarkan indeks persepsi korupsi. korupsi Indonesia skor indeks persepsi pada 2010 hanya 2,8 dari skala nilai 0-10. Ketiga membangun sebuah kelembagaan yang efektif catatan adalah bahwa lembaga ini dibangun untuk meningkatkan akses masyarakat, untuk mendorong persaingan di ekonomi, melengkapi lembaga yang ada, memberikan inovasi dalam lembaga yang ada.¹¹

⁹ Endang Rudiati, *Integrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia – Sabah Malaysia)*. Disertasi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu sosial & Politik Departemen Antropologi Program Studi Pascasarjana. tahun 2012.

¹⁰ Robert Siburian, *Pulau Sebatik : Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14, No.1, Tahun 2012.

¹¹ Azansyah, *Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan di Indonesia, dan Membangun lembaga yang efektif*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VII, No 02, Juni 2013.

Penelitian Muhammad Ahmed Qadri dengan Judul *The Philosophy Of Islamic Political Economy : Theory And Practice*. Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kontemporer ekonomi yang didasarkan pada bunga majemuk melalui sistem perbankan konvensional. argumen logis telah ditempatkan mengenai bunga bebas (*Mudharaba*) dan yang manfaat bagi masyarakat. Hal ini juga telah dibahas untuk memahami alasan dari pelarangan Riba atau bunga di Islam. Memihak, penulis telah mencoba untuk menganalisis manfaat dari masyarakat bebas bunga untuk kelas yang membutuhkan.¹²

Penelitian Misbahul Munir dengan Judul *Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam*. dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam Islam mempunyai hak ikut campur dalam kebijakan ekonomi, membatasi kepentingan individu untuk kepentingan public yang lebih luas. Intervensi tersebut secara garis besar berupa, *Pertama*, Pemerintah memegang kendali sumber-sumber pendapatan vital dan mencakup kepentingan bersama, mengelola dan mendistribusikannya secara adil, seperti zakat, pertambangan, dll. *Kedua*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas pasar agar berjalan secara normal berdasarkan fungsi penawaran dan permintaan *Ketiga*, Pemerintah Memiliki Peran sebagai pengawas perekonomian pasar agar sesuai dengan syariah dan rencana pembangunan negara.¹³

Penelitian Belinda Padan dengan Judul *Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timr Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh BPKP2DT dan BPPD dalam membangun daerah perbatasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dijalankan oleh BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan melaksanakan upaya pembangunan di sektor ekonomi meliputi bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kemudian pembangunan infrastruktur.¹⁴

Penelitian Edy Suandi Hamid dengan judul *Peran Dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian*, dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, misalnya dalam Kebijakan pada sektor publik. Kemudian didalam penelitian ini memperlihatkan perdekatan antara para ahli berkaitan

¹² Muhammad Ahmed Qadri, *The Philosophy Of Islamic Political Economy : Theory And Practice*, Journal Of Philosophy, Culture, and Religion, Vol. 16, 2016.

¹³ Misbahul Munir, *Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishoduna Iqtishoduna, Vol 2, No 3, Page. 2006.

¹⁴ Belinda Padan, *Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan*. E-jurnal Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (1): 175-189. ISSN 2337-8670.

kebolehananya dalam melakukan intervensi pemerintah dalam mempertahankan keberlangsungan perekonomian masyarakat.¹⁵



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁵ Edy Suandi Hamid, *Peran Dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian*, Jurnal JEP Volume 04, No. 1, Tahun 1999, ISSN: 1410-2641.

Tabel 2.1
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN YANG
AKAN DILAKUKAN:

No	Nama dan Judul	Hasil	Perbedaan
1	Ade Irma T. Pangalasan "Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Kawasan Perbatasan Antar Negara Di Kabupaten Kepulauan Talaud"	Kepulauan Talaud sebagai daerah perbatasan masuk sebagai daerah tertinggal dan terisolir, serta rawan bencana,serta infastruktur yang kurang mendukung. Sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran perbatasan.	Tempat penelitian ini berada dikepulauan Talaud, dan penelitian ini berfokus kepada dampak pelanggaran di Entry Exit Point Miangas terhadap keamanan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di Pulau Sebatik, Kalimantan utara.
2	Sinyo Gamma timisela "Dampak perdagangan Lintas batas terhadap perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus : Wilayah Perbatasan RI-PNG di distrik Muara Tami)"	Perbatasan RI dan Papua nugini menunjukan bahwa adanya perilaku saling ketergantungan antara kedua negara tersebut. masyarakat papua sangat bergantung dengan produk lokal masyarakat papua.	Penelitian ini bertempat di perbatasan RI dan Papua Nugini. Fokus pada adanya ketergantungan pada produk Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat di pulau sebatik, Kalimantan

			Utara dan berfokus pada perekonomian masyarakat perbatasan.
3	Muhammad Hairul Saleh " <i>Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)</i> "	Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa migran bugis di pulau sebatik dimana merupakan perantau yang memiliki mimpi besar agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.	Fokus penelitian ini hanya kepada eksistensi suku bugis yang berada di sebatik dalam interaksi ekonominya. penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan khususnya pada objek dan tempat penelitian. Tetapi berbeda dalam analisis permasalahan dan kajian kelembagaan.
4	Zaenuddin Hudi Prasajo " <i>Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan</i> "	Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat perbatasan di daerah Kalimantan barat cenderung masuk dalam kelompok masyarakat yang tertinggal dari berbagai pembangunan.	Perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian ini bertempat di daerah perbatasan RI-MLY yang berada di Kalimantan barat. Sementara penelitian nanti bertempat di pulau

			sebatik, Kalimantan utara.
5	CB Hernan Edyanto <i>"Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat"</i>	Hasilnya adalah masyarakat Indonesia di perbatasan Kalimantan barat, terdapat perbedaan dari berbagai aspek, seperti pendapatan nasional per kapita dan sosial pendidikan.	Penelitian ini bertempat di wilayah perbatasan Kalimantan barat. Sedangkan penelitian nanti bertempat di pulau sebatik.
6	Rizky Yudaruddin <i>"Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur : Upaya Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis."</i>	Hasil penelitian ini bahwa tingkat kesenjangan masyarakat Indonesia jauh berbeda dengan masyarakat perbatasan di Malaysia yang tidak menghadapi masalah kesenjangan yang serius.	Tempat penelitian ini lebih luas, yaitu meliputi 3 wilayah perbatasan yang berada di Kalimantan utara. dan fokus kajian melihat disparitas ekonomi yang terjadi. Sementara penelitian yang nanti dilakukan hanya berfokus di pulau sebatik saja.
7	Mayasuri Presilla <i>"Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan"</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan menjadi masalah serius yang dihadapi pada daerah perbatasan Indonesia. Sehingga pembangunan sumber daya alam daerah perlu ditingkatkan.	Fokus penelitian yang hanya membahas urgensi SDA di perbatasan. Sementara penelitian nanti akan lebih berfokus kepada peran pemerintah.

8	Afrizal <i>"Potensi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah oleh perbankan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Tahun 2008"</i>	Temuan yang dihasilkan bahwa mayoritas UMKM masyarakat perbatasan entikong di dominasi oleh perdagangan dan jasa. Dan kondisi infrastruktur relatif buruk dan tidak ada pasar yang representatif.	Fokus penelitian hanya integrasi pasar pada UMKM yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak berbicara tentang UMKM secara langsung, tetapi peran pemerintah dalam perekonomian tersebut.
9	Endang Rudiatin <i>"Intergrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur."</i>	Hasil temuan dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara pasar yang berada di tawau Malaysia dengan pasar yang berada di sebatik.	Penelitian ini bertempat di aji kuning sebatik dan Fokus penelitian ini pada interaksi warga di pasar perbatasan. Sementara penelitian yang akan dilakukan nanti tidak berfokus dipasar.
10	Belinda Padan <i>"Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur Dalam</i>	Adapun hasilnya bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Baru	Penelitian bertempat di perbatasan Kalimantan timur dengan malaysia yang bertujuan

	<i>Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan. "</i>	kemudian pembangunan pada sektor infrastruktur.	untuk melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah.
11	Azansyah <i>"Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan di Indonesia, dan Membangun lembaga yang efektif."</i>	Hasil studi ini bahwa lembaga memiliki peran besar dalam perekonomian, kemudian bahwa pembangunan kelembagaan masih lemah, dinilai dari indeks korupsi yang masih sangat tinggi.	Penelitian ini bersifat penelitian literatur yang membahas peran suatu lembaga dalam meningkatkan perekonomian. Sedangkan penelitian nanti akan merupakan studi lapangan.
12	Robert Siburian <i>"Pulau Sebatik : Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia. "</i>	Hasil studi ini menunjukkan bahwa pulau sebatik merupakan wilayah Indonesia akan tetapi berjiwa Malaysia. Terlihat dari banyak barang-barang yang dikonsumsi oleh Sebatik Indonesia penduduk, seperti makanan kaleng dan minuman, elektronik barang, dan gas yang diimpor dari Tawau, Malaysia.	Penelitian ini mengeksplorasi kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia, mulai dari barang-barang yang beredar di pulau sebatik dan duit yang beredar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, selain berbicara tentang barang-barang yang beredar tersebut,

			juga melihat peran pemerintahnya.
13	Misbahul Munir <i>"Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam"</i>	Hasil dari Jurnal ini adalah pemerintah dalam Islam mempunyai hak ikut campur dalam kebijakan ekonomi, membatasi kepentingan individu untuk kepentingan publik yang lebih luas demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi.	Jurnal ini bersifat literatur atau studi kepustakaan yang membahas peran pemerintah dalam Islam. sedangkan penelitian nanti bersifat studi lapangan tentang peran pemerintah.
14	Muhammad Ahmed Qadri <i>"The Philosophy Of Islamic Political Economy : Theory And Practice"</i>	Tulisan Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas dalam segala kegiatan ekonomi dan politik yaitu berasal dari Al-qur'an dan Hadist. setiap ajarannya harus selalu dilakukan seperti pelarangan riba.	Jurnal ini merupakan kajian pustaka atau literatur berkaitan ekonomi Politik Islam. sedangkan penelitian nanti merupakan studi lapangan.
15	Edy Suandi Hamid <i>"Peran Dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian"</i>	Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, misalnya dalam kebijakan sektor publik.	Penelitian ini bersifat studi pustaka tentang pemerintah yang diharapkan bisa melakukan Intervensi untuk perkembangan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bersifat lapangan

		yang mengamati peran pemerintah.
--	--	-------------------------------------

Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat dikatakan bahwa Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu diatas. Yang kemudian dilakukan penambahan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang dapat ditemukan dari beberapa penelitian terdahulu dari segi kerangka teori, dan juga hasil yang ingin ditemukan. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kondisi perekonomian yang terjadi di kawasan perbatasan khususnya perbatasan Indonesia bagian utara yaitu Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. kemudian melihat peranan pemerintah atas permasalahan yang terjadi, yang pada akhirnya akan di analisis melalui perspektif ekonomi politik Islam, yang dinilai belum ditemukan didalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Teori Profil Perekonomian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profil adalah Pandangan, gambaran umum, lukisan, grafik dan ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus atau tertentu.¹⁶ sedangkan perekonomian merupakan suatu tindakan atau aturan yang berlaku berkaitan tentang tata cara atau aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁷

Sehingga berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan profil perekonomian masyarakat adalah gambaran umum yang berkaitan dengan tingkah laku, perilaku, tindakan, serta aktivitas ekonomi yang terjadi disuatu masyarakat. aktifitas-aktifitas ekonomi masyarakat dapat berupa perdagangan, pekerjaan masyarakat, bahkan aktivitas ekonomi seperti produksi, maupun konsumsi yang berlaku dalam masyarakat. umumnya, segala kegiatan aktifitas perekonomian yang dilakukan masyarakat tersebut mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Profil perekonomian suatu tempat akan berbeda dengan profil perekonomian tempat lainnya. Profil perekonomian masyarakat kota umumnya berbeda dengan profil perekonomian masyarakat yang berada perdesaan, bahkan masyarakat perdesaan pun

¹⁶ KBBI, Arti Kata Profil, dikutip dari laman <http://kbbi.co.id/arti-kata/profil>, diakses pada hari senin, tanggal 21 Agustus 2017. Pukul 15.02 WIB.

¹⁷ KBBI, Arti kata ekonomi, dikuti dari laman <http://kbbi.co.id/arti-kata/ekonomi>, diakses pada hari senin, tanggal 21 August 2017. Pukul 15.32 WIB.

sering berbeda dengan perkonomian yang terjadi pada masyarakat perbatasan. hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya letak geografis yang jauh dengan pusat pemerintahan khususnya daerah perbatasan. sehingga perekonomian masyarakat perbatasan pada umumnya memiliki ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan perekonomian masyarakat perkotaan.

Untuk melihat profil perekonomian suatu masyarakat terdapat beberapa ruang lingkup yang digunakan, dalam hal ini ruang lingkup profil perekonomian masyarakat, yaitu:

a) Transaksi Ekonomi

Transaksi ekonomi dapat didefinisikan sebagai: 1) kehendak, perilaku, tindakan dan tujuan yang tersosialisasi, 2) suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 3) berfungsinya suatu organisme, 4) suatu tanggapan yang terorganisir¹⁸. Sosial berasal dari kata *society* yang berarti masyarakat. Dengan kata lain, Transaksi ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang merupakan perilaku sosial, perilaku seseorang tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi orang lain. Ada hubungan antara aktivitas ekonomi dengan perilaku sosial.

Transaksi masyarakat umumnya dilakukan dengan sarana perdagangan, dimana perdagangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan berkurang maupun bertambahnya harta yang dimilikinya dengan kata lain Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan (keuntungan).

Pola transaksi ekonomi suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, hal ini dapat dipengaruhi dengan letak demografi wilayah tersebut. Misalnya, kegiatan manusia yang tinggal di daerah pantai erat kaitannya dengan kegiatan perikanan, seperti budidaya rumput laut, usaha dalam penangkapan ikan dan lain sebagainya. sedikit berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih mengarah kepada perindustrian dan jasa teknologi.

b) Hotel Dan Pariwisata

Hotel dan pariwisata merupakan instrument dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hotel yang memadai maka akan mengundang wisatawan baik nasional baik mancanegara untuk dapat berkunjung, sehingga dapat menjadi

¹⁸ Kartasapoetra, G. dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* .(Jakarta: Bumi Aksara,2007), hlm

pendapatan suatu daerah. Adapun Definisi wisatawan sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu¹⁹:

(1) Wisatawan (*tourist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- (a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan, olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
- (b) Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

(2) Pelancong (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Pertumbuhan pasokan hotel di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu terungkap dari data lembaga riset perhotelan dunia yang berbasis di London, STR Global. Lembaga tersebut, melalui laporan *Global Construction Pipeline*, hingga Maret 2014 di Indonesia tengah disiapkan pasokan unit hotel mencapai 53.100 kamar. Jumlah tersebut bertumbuh 35,7% dibandingkan tahun lalu.

Selain Indonesia, laporan tersebut mengungkapkan di kawasan Asia Pasifik terdapat 7 negara dengan pertumbuhan pasokan hotel di atas 30%. Di antara negara tersebut, Bangladesh mencatat pertumbuhan pasokan terbesar, yakni 261,1% dengan total unit yang dikembangkan 4.170 kamar. Menyusul Mongolia (77,4% - 975 kamar), Myanmar (67,5% - 4.109 kamar) dan Sri Lanka (51,0% - 5.204

¹⁹ BPS, *Konsep Dan Definisi Kunjungan Wisatawan Mancanegara*, dikuti dari laman <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/16>, diakses pada hari Jum'at 25 Agustus 2017 pada pukul 6.58 WIB.

kamar). Bhutan (46,7% - 78 kamar), Indonesia dan Filipina (30,7% - 13.078 kamar).²⁰

Tabel 2.2
PERKEMBANGAN JUMLAH KAMAR USAHA AKOMODASI
MENURUT KLASIFIKASI AKOMODASI, 2010 - 2014

Jumlah Kamar Usaha Akomodasi (buah)		2010	2011	2012	2013	2014
Klasifikasi Akomodasi	TOTAL	353.138	381.457	405.778	430.793	469.277
	Hotel Bintang	124.789	142.481	155.740	171.432	195.886
	Bintang 5	28.952	29.743	31.626	34.595	35.639
	Bintang 4	35.632	39.641	45.638	50.786	58.397
	Bintang 3	30.457	39.784	43.596	47.041	58.181
	Bintang 2	15.852	17.428	20.032	23.595	27.909
	Bintang 1	13.896	15.885	14.848	15.415	15.760
	Akomodasi Non Bintang	228.349	238.976	250.038	259.361	273.391
	Hotel Melati	183.047	189.780	195.014	203.216	219.936
	Penginapan remaja	4.928	5.472	6.172	5.228	5.778
	Pondok wisata	15.995	17.471	23.697	23.293	22.915
	Villa	Data tidak tersedia				8.749
	Jasa akomodasi lainnya	24.379	26.253	25.155	27.624	16.013

Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya (BPS)

c) Transportasi Dan Akomodasi

Transportasi merupakan wadah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena hanya dengan kelancaran transportasi maka segala kebutuhan masyarakat suatu daerah akan terukupi. Berdasarkan keterangan kementerian perindustrian bahwa Kebutuhan transportasi di dalam negeri terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk saban tahun. bahkan Tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi industri alat transportasi darat bisa naik 20% dibanding realisasi tahun lalu.²¹

²⁰ Bisnis Indonesia, *Bisnis Perhotelan: Pertumbuhan Hotel Di Indonesia Terus Meningkat*, dikutip dari laman <http://properti.bisnis.com/read/20140421/107/221127/bisnis-perhotelan-pertumbuhan-hotel-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses pada hari Jum'at 25 Agustus 2017, pukul 7,04 WIB

²¹ Kementerian Perindustrian, *Kendaraan Angkutan Darat Tumbuh 20%*, dikutip dari laman <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4649/Kendaraan-Angkutan-Darat-Tumbuh-20>, pada hari Jum'at 25 Agustus 2007, pukul 7.24 WIB.

Salah satu pendorong industri alat transportasi darat adalah meningkatnya kebutuhan alat transportasi untuk penumpang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan kondisi ekonomi yang positif memacu kenaikan permintaan transportasi darat. Kemudian di satu sisi, industri alat transportasi darat juga terus tumbuh berkat meningkatnya investasi di sektor transportasi darat maupun industri pendukungnya, seperti komponen. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi di sektor komponen otomotif mencapai US\$ 2 miliar.

Transportasi sangat berperan penting dalam mempengaruhi harga yang beredar dalam suatu daerah. Daerah yang jauh dari pusat kota, maka akan membutuhkan transportasi yang extra dibandingkan yang lain. Hal tersebut secara tidak langsung sangat mempengaruhi harga barang yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya harga daerah papua akan semakin mahal apabila dibandingkan dengan harga daerah jawa, hal ini disebabkan karena transportasi yang diperlukan untuk sampai ke daerah tersebut lama dan membutuhkan biaya yang besar juga.

Berdasarkan ruang lingkup perekonomian suatu masyarakat diatas, terlihat ada peningkatan dari berbagai aspeknya. Perubahan-perubahan tersebut mengesankan telah terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia secara cukup berarti. Namun demikian, bila dikaji lebih jauh, ternyata masih cukup banyak masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satunya adalah masalah kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat perdesaan. Sehingga terlihat bahwa peningkatan pendapatan perkapita serta pergeseran struktur perekonomian tadi ternyata belum dapat menghapuskan kesenjangan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya.

Rakyat adalah pemilik negara ini, karenanya pembangunan nasional seharusnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya. Ironisnya, sepanjang sejarah pembangunan Indonesia, kue pembangunan nasional lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, artinya tidak memperhatikan pemerataan. Rakyat hanya menjadi sumber daya murah yang sedikit menikmati hasil cucuran keringatnya. Pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat inilah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatikan, kesenjangan ekonomi.²²

²² Edy Suandi Hamid Dan M.B Hendrie Anto. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*. (Yogyakarta: U'I Press. 2000). hlm 1-2.

Diantara para pengkritik pola pembangunan ekonomi yang telah ditempuh oleh kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia, terdapat banyak orang yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu dibarengi kenaikan dalam ketimpangan pembagian pendapatan atau *ketimpangan relatif*.²³ Dengan kata lain, para pengkritik ini termasuk banyak ekonom, beranggapan bahwa antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan terdapat suatu *trade-Off*, yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu akan disertai kemerosotan dalam pembagian pendapatan atau kenaikan dalam ketimpangan relatif.

Gejala yang lain yang cukup mencemaskan adalah bahwa pembangunan ekonomi yang mengutamakan proses indritualisasi yang pesat, khususnya industrialisasi yang padat-modal, menyebabkan peningkatan *Pembangunan*, terutama di daerah perkotaan dimana-mana terpusat sebagian besar pembangunan. Dan akan sangat berbeda dengan mereka yang hidup di daerah terpencil dan terluar dari pusat perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi.

Gejarnya penyebutan istilah "Ekonomi Kerakyatan" yang dikaitkan dengan *Pemberdayaan* (empowerment) rakyat banyak atau unit-unit usaha kecil, agaknya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan dan kenyataan dari perkembangan segelintir unit usaha besar, terutama konglomerat, yang dipandang demikian mudah berkembang, dengan segala fasilitas yang diperolehnya. Sementara disisi lain, unit usaha kecil dan menengah, yang merupakan komponen utama ekonomi rakyat, ternyata lebih memiliki daya tahan terhadap guncangan krisis ekonomi.²⁴

Tata aturan yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan untuk mewujudkan kemakmuran bersama dapat diimplementasikan secara efektif jika semua pihak bersedia untuk menerima dan menaatinya. Baik penerimaan maupun ketaatan kepada aturan perilaku akan cenderung menjadi sangat baik bila aturan perilaku itu memiliki landasan syariah, mengingat syariah mendorong kerja sama dan mengurangi perbedaan-perbedaan dan sekaligus sebagai perekat dalam mempertahankan kebersamaan kelompok besar.²⁵

²³ Thee Kian Wie, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan*. (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm 3.

²⁴ *Ibid*, hlm 3.

²⁵ Jusmaliani, Dkk. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 20.

Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak terlepas dari upaya untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi.²⁶ Yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau Iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*). Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran untuk membangun daya yang dimiliki. Tujuannya adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki Masyarakat (*Empowering*). Penguatan ini memerlukan langkah-langkah nyata, antara lain menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang. Pemberdayaan ini meliputi upaya pokok seperti peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti Modal, Teknologi, Informasi, lapangan Kerja dan Pasar. Serta pembaharuan Institusi-Institusi sosial dan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pembangunan.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta kemungkinan terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat harus mengesampingkan ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

2. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

a. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran berkaitan dengan individu atau kelompok dalam usahanya untuk menjalani fungsi utamanya, mengenai arti peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.²⁷

Menurut Soekanto, Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

²⁶ Abdul Majid Baihaqi A. Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah :Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. (Jakarta: PINBUK,2000), hlm 76.

²⁷ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 667.

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.²⁸ Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.²⁹ Dari batasan-batasan di atas maka disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok di dalam melakukan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Dengan demikian di dalam peran terdapat dua macam harapan yaitu :

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- 2) Harapan-Harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.

b. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

Adanya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara merupakan suatu yang tidak diperdebatkan dalam teori-teori ataupun khazanah pemikiran ekonomi. Melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor publik, pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁰

Peran Pemerintah dalam bidang perekonomian sangat penting untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam perekonomian. Mengenai peran pemerintah sebatas dalam menentukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam pembangunan perekonomian akan dapat mendorong pertumbuhan dan kesepakatan kerja dan mengatasi pengentasan kemiskinan.³¹

Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena tanpa Negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan utuh. Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang *rahmatan lil alamin* atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya. Karena tujuan hakiki dari suatu negara Islam adalah untuk

²⁸ Soekanto, Dikutip dari <http://kamusbahasaIndonesia.org/peran/mirip> pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 9.30 WIB.

²⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Pres, 2002), hlm 46.

³⁰ James Post dkk, *Business and Society - Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, (New York: McGraw-Hill Inc 1996), hlm 209-210.

³¹ *Ibid.*, hlm 34-36.

memberikan *Maslahah* kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. *Maslahah* ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran di dunia dan akhirat. Dengan demikian, pemerintahan negara Islam harus mengimplementasikan orientasi material dan spiritual. Sehingga jika orientasi ini dijalankan, maka negara akan mampu berbuat adil bagi seluruh anggota masyarakat.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dan diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun sesama masyarakat. Prinsip keadilan ini yang harus diperankan secara utuh oleh negara terhadap masyarakat meliputi segala sektor kehidupan, mulai agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.³² Kemudian secara tegas, Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl (16) : 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Q.S. An-Nahl (16) : 90

Dalam bidang ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah dan pendidikan.³³

Sehingga kebijakan Ekonomi Politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum sekaligus. Model ini menfokuskan kepada keseimbangan, dan

³² Nurul Huda dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm 50.

³³ *Ibid.*, 52.

harmonisasi kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani kesejahteraan materil dan kebutuhan spiritual. Aspek ekonomi politik Islam yang dilakukan oleh para penguasa adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqh :

³⁴ تصرف الإمام على رغبة منوط بالمصلحة

"Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemashlahatan."

Mengingat betapa pentingnya peran Negara dalam Islam, baik dalam hal fungsi dan teritorial, sehingga Nurul Huda Dkk dalam bukunya keuangan publik Islam kemudian mengklasifikasikan secara garis besar fungsi Negara dalam mengelola sektor ekonomi dan kepentingan publik. Diantaranya sebagai berikut:

1) Fungsi Alokasi Negara

Pada hakikatnya, di dalam konsep Islam, fungsi alokasi ini harus dapat dijalankan oleh tiga elemen utama dalam perekonomian, yakni pasar, Negara, dan organisasi Negara.³⁵ Ketiganya saling berinteraksi didalam suatu negara perekonomian, dan mendorong terjadinya transfer antar elemen sehingga keadilan dan keseimbangan perekonomian.

Pasar merupakan negara yang memiliki motif untuk meraih profit dari aktivitas yang mereka lakukan. Sektor ini biasanya dikendalikan oleh kalangan negara dan pelaku usaha baik kecil, menengah, hingga besar. Meskipun negara ini berorientasi kepada profit, namun hal itu bukanlah suatu hal yang buruk. Profit merupakan bentuk penghargaan yang layak diberikan oleh masyarakat umum kepada pasar karena kesediannya untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara.

Negara merupakan elemen di dalam Negara ekonomi yang menjalankan aktivitasnya semata-mata untuk tujuan kemaslahatan negara yang diridhoi Allah SWT dan walaupun mencari profit, hal itu semata-mata hanya untuk menjaga sustainabilitas dari aktivitas mereka. Sehingga negara memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap pembangunan umat dan

³⁴ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-suyuti, *Asbah wa an Nazair fi al-furu'*, (semarang: Maktabah usaha keluarga, t.th), hlm 83.

³⁵ Faridi FR, *Theory Of Fiscal Policy In an Islamic State*, J.Res. Islamic Econs. King Abdul Aziz University Jeddah, Vol.1. No.1 pp. 15-30, 1983.

negara. Dampak yang terasa bagi kemajuan negara adalah adanya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan untuk masyarakat miskin, dan masih banyak contoh lainnya. Lembaga-lembaga tersebut terkesan negara sama dengan lembaga negara swasta, namun kenyataannya, lembaga tersebut bergerak untuk membangun kehidupan negara yang lebih baik dan memperkuat ketakwaan masyarakat Islam.³⁶

Dalam rangka untuk mengalokasikan sumber daya negara di antara anggota masyarakat, maka ketiga elemen di atas (negara, pasar, dan lembaga) melakukan integrasi tindakan sehingga ketiganya memiliki agenda yang komprehensif untuk mengelola negara.

Lalu bagaimana peranan negara, yang lebih dominan dalam mengendalikan negara, terhadap proses alokasi sumber daya tersebut. Tugas negara adalah untuk mengawasi dan meregulasi, baik negara itu sendiri maupun negara dan pasar. Jika kita merujuk kepada peranan negara pada masa Rasulullah dan masa khalifahan hingga pada masa kejayaan Islam, maka Negara memiliki peranan sebagai regulator melalui satu lembaga yang bernama *Al-Hisbah*.

Dalam Islam Negara Memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.³⁷

Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang karena masih sederhananya Kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Selain disebabkan pula oleh daya kontrol spritual dan kemandirian kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariah dan berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.

Beberapa cara penerapan yang berhubungan dengan campur tangan negara terhadap urusan ekonomi rakyat dapat ditemukan beberapa contoh

³⁶ Nurul Huda Dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 55.

³⁷ Ahmad Muhammad Al-Asal, *Annizamul Fil Islam Mabahdiuhu Wahdafuhu*. Terj. Sistem Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam. Imam Saepudin. (Bandung: Pustaka Setia: 1999), hlm, 101-103.

berikut ini, salah satunya adalah ikut campurnya pemerintah dalam mengembalikan distribusi kekayaan untuk mewujudkan perintah ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat.

Sebagai contoh intervensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dan juga para Khulafaur Rasyidin adalah melalui sisi permintaan dan pasokan/penawaran. Pada sisi pasokan, intervensi dilakukan dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Selain itu, intervensi pasokan, dilakukan dengan pengawasan pasar, dan menindak pihak-pihak yang bermain curang di pasar.³⁸

Khusus dalam kegiatan ekonomi, Al-qur'an memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih lanjut intervensi yang dilakukan pemerintah pada hakikatnya untuk menjaga agar kegiatan perekonomian berorientasi keadilan dan kemakmuran umat.³⁹ Sebagaimana firman Allah Swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104).

Sehingga dapat disimpulkan agenda utama yang ingin dicapai dari fungsi alokasi yang dijalankan oleh negara ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada di dalam kekuasaan suatu negara dapat dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Ujung dari pelaksanaan fungsi alokasi ini adalah tercapainya tingkat produksi barang dan jasa yang optimal, sehingga masyarakat secara rata-rata dapat hidup di atas kebutuhan dasar minimum atau lebih. Dengan termanfaatkannya seluruh sumber daya di satu negara secara adil dan efisien serta hasil yang optimal, maka secara teoritis diharapkan dapat

³⁸ Jusinaliani, Dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 39.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bairul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 54.

mendorong negara tersebut untuk menjadi negara yang makmur sehingga membantu umat atau negara muslim lainnya untuk mencukupi segala kebutuhannya.⁴⁰

2) Fungsi Distribusi

Peran negara di dalam mengelola sektor publik, tidak berhenti sampai dalam pelaksanaan fungsi alokasi saja. Namun negara juga memiliki peranan untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang adil. Jika di dalam fungsi alokasi, negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien, maka dengan fungsi distribusi ini, negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum.⁴¹

Secara material, tujuan utama dari fungsi distribusi yang dijalankan oleh negara adalah untuk menghapus terjadinya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi oleh segelintir atau segolongan masyarakat saja. Jika sumber daya ekonomi dieksploitasi lalu terkonsentrasi di tangan segolongan orang tertentu saja, maka negara harus melakukan intervensi supaya kekayaan tersebut dapat didistribusikan kepada orang lain.

Bahkan, Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam QS. *Al-Hasr* (59):7 berikut ini :

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu....

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung ataupun melalui regulasi. Sehingga dengan adanya intervensi tersebut diharapkan segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, adil dan merata.

⁴⁰ Nurul Huda Dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 62.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 62.

Barang-barang umum yang memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat harus dipenuhi oleh negara dan tersedia secara gratis. Bukan hanya itu, terpenuhinya kebutuhan dasar seperti : makanan, pakaian, tempat bernaung, pendidikan, dan lain sebagainya, juga dipandang sebagai tujuan utama negara. Disamping itu, negara juga harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Al-mawardi berpendapat “ *Jika hidup dikota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum (mata air) atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab atas perbaikannya (dari sumber-sumbernya sendiri) dan jika negara tidak memiliki dana ia harus menemukan jalan untuk memperoleh dana tersebut*”.⁴²

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Al-Mawardi diatas menunjukkan bahwa tugas utama dari seorang pemerintahan adalah untuk melayani masyarakatnya. Sehingga melayani masyarakat umum menjadi tugas pokok yang harus dilakukan sebagai negara. Mawardi lebih jauh berpendapat bahwa jenis layanan itu dianggap sebagai kewajiban sosial. Ini berarti bahwa penyediaan barang-barang umum tersebut bersandar pada masyarakat umum. Karena individu-individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu, maka negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan tersebut.⁴³

Sehingga dari sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara yang lain, misalnya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmatinya secara adil dan merata. Karena pengangguran, kelangkaan barang, inflasi merupakan beberapa kriteria di mana proses distribusi pada suatu negara sedang memburuk. Sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang adil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pun sangat sulit.

Dengan demikian, jika kondisi tersebut terjadi, maka sistem ekonomi telah menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam di dalam ekonomi, yaitu keadilan sosial-ekonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di lapisan masyarakat.⁴⁴

3) Fungsi Stabilisasi

⁴² Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah , Wal Wilayat al- Diniyyah*, (Kairo: Mustafa al-babi al-halabi, 1973), hlm 245.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ M.Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta:Tazkia Institute,2000), hlm 29.

Fungsi stabilitas merupakan suatu kondisi sosial-ekonomi yang memiliki risiko minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap pertumbuhan dan utilisasi sumber daya ekonomi serta keharmonisan interaksi sosial yang dinamis baik untuk hari ini maupun masa depan, sedangkan ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah SWT.⁴⁵ Target dari stabilitas sosial adalah terciptanya interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, sehingga setiap individu dapat menikmati kehidupan sosial yang kuat secara spiritual, sejahtera, dan adil.

Tujuan dari sebuah stabilitas dalam sebuah ekonomi adalah terciptanya keadilan ekonomi yang dijalankan dengan sistem Islam, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh bukan merupakan tujuan melainkan sebagai sarana untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi merupakan sebuah indikator yang harus dicapai agar distribusi ekonomi dapat dijalankan dengan adil.

Pada prinsipnya, untuk menjaga stabilitas perekonomian yang harus dikendalikan oleh negara adalah jumlah pasokan barang dan jasa di pasaran. Baik melalui kebijakan produksi maupun perdagangan impor-ekspor. Jika pasokan barang dan jasa sudah berada pada level aman untuk jangka pendek maupun jangka panjang, maka nilai mata uang dan stabilitas harga dapat dikendalikan relatif mudah.⁴⁶

Dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian, negara juga dapat menggunakan anggarannya, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tepat, negara dapat melakukan intervensi pasar guna memastikan stabilitas hadir di dalam perekonomian. Intervensi ini tentunya bukan dalam bentuk harga melainkan pada tingkat pasokan barang dan jasa. Baik melalui operasi pasar maupun stimulan investasi, yang penting akan membawa dampak pada jumlah pasokan barang dan jasa di Masyarakat. Dan yang terpenting juga dalam menjaga stabilitas perekonomian yaitu memperhatikan perilaku pasar. Negara dalam hal ini harus mengatur dan mendidik pasar sedemikian rupa, sehingga pasar tidak lagi dipenuhi oleh oknum-oknum yang curang dan spekulatif dalam melakukan kegiatan perekonomian.

⁴⁵ Nurul Huda Dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 69.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 72.

Karena pemerintah tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik apabila di dalam pasar masih terdapat oknum yang sering memanfaatkan keadaan pasar untuk mengeruk keuntungan pribadi.⁴⁷

3. Konsep Masyarakat Perbatasan

a. Karakteristik Wilayah Perbatasan

Secara definisi, Perbatasan Negara adalah wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan Negara lain, dan batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Definisi lain, wilayah perbatasan adalah wilayah demografi yang berhadapan dengan negara tetangga, dimana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosioekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan negara yang berbatasan.⁴⁸

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.⁴⁹

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic state), Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen dan batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan

⁴⁷ Ibid., hlm 73.

⁴⁸ Lufti Muta'ali, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2014). Hlm 44.

⁴⁹ Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data ini diperoleh dari 20110701114745.PolicyRecommendationKALTIMWeb.pdf, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 1.40 WIB..

10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Pada kawasan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.⁵⁰

Secara umum, perbatasan dipahami sebagai garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu sebelumnya tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kemasyarakatan negara yang berbeda.⁵¹

Menurut Martinez., sebagaimana yang dikutip oleh Riwanro Tirtosudarmo mengkategorikan ada empat tipe perbatasan:

- 1) *Alienated borderland* : suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- 2) *Coexistent borderland* : suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bias ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
- 3) *Interdependent borderland* : suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif lebih tertata serta perekonomian yang cenderung stabil. Penduduk di kedua bagian perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan Perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

⁵⁰ Deskripsi Wilayah Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar. Data ini diperoleh dari <http://www.penataanruang.net/ta/lapak05/P5/4/Bab2.pdf>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 1.43 WIB.

⁵¹ Siti Noorehan Mohd Zain, *Perbatasan Malaysia Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politik, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. (Grahaf Ilmu, Yogyakarta: 2010), hln 233.

- 4) *Integrated borderland* : suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.⁵²

b. Permasalahan Kawasan Perbatasan

Pada umumnya wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal karena berbagai faktor, misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana.⁵³ Ironisnya, wilayah perbatasan ini merupakan pintu-pintu masuk (*border gates*), bila tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan permasalahan kompleks antara dua negara yang berbatasan.

Pada sisi lain, perbatasan sering menjadi problem serius dalam hubungan antar negara. Salah satu masalah yang sering mengemuka dan menyita banyak perhatian sampai sekarang adalah masalah batas wilayah. Problem batas wilayah ini dapat berupa konflik tapal batas, penyelundupan, pelanggaran lintas batas (kasus TKI ilegal), terorisme, *illegal logging* (pembalakan kayu secara liar), *illegal Fishing*, (penangkapan ikan secara liar), *trafficking* dan masih banyak yang lain.⁵⁴

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah isolasi wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas.⁵⁵ Umumnya permasalahan daerah perbatasan mencakup berbagai aspek seperti;

Pertama, aspek batas wilayah negara banyak menimbulkan dampak negatif, berbagai insiden di perbatasan, dan pelanggaran wilayah kedaulatan. Masalah-

⁵²Suyatno, *Globalisasi, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Local Governance, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010), Hlm 138.

⁵³Mustafa Abu Bakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik*, (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2006) Hlm 127.

⁵⁴ Muhammad Saleh Hairul, *Nasionalisme Di Tapal Batas*, (Interpena, Yogyakarta: 2010), Hlm 2.

⁵⁵ Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data ini diperoleh dari [20110701114745.PolicyRecomendationKALTIMWeb.pdf](#), diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 1.40 WIB

masalah pelanggaran hukum dan sulitnya penegakan hukum di perbatasan menjadi sulit dikelola, dikontrol dan memerlukan kerjasama antar negara. Demikian pula dengan implementasi pos perbatasan dan fasilitasi *custom, imigration and quarantine* (CIQ) menjadi tidak optimal dan terkendala, akibatnya terjadi berbagai kegiatan ilegal lintas batas.

Kedua, aspek ekonomi. Penataan ruang disusun belum pro-rakyat, pro-poor, dan pro-perbatasan halaman depan negara. Akibat dari pandangan seperti itu berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu seperti: (a) sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi, maupun perbankan. Terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga; (b) ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah dan fasilitas sosial ekonomi masih sangat kurang memadai; (c) angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga yang pra-sejahtera yang tinggi pula jadi fenomena umum masyarakat perbatasan, dan; (d) terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

Ketiga, Pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah *defence-security* dan *law enforcement*. Padahal di era damai dewasa ini permasalahan lebih menyangkut masalah *prosperity, social security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian. Cara pandang tersebut jelas harus diubah oleh pemerintah Indonesia agar ada acuan yang jelas dalam proses menyelesaikan penetapan batas-batas internasional dengan 10 negara, dan pengelolaan kawasan perbatasan hingga terwujudnya perbatasan sebagai beranda depan negara. Keempat, aspek sosial-budaya. Kualitas SDM yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.

Kemudian, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan pada awalnya hanya menjadi salah satu isu sensitif yang berkaitan dengan pertahanan dan politik,

utamanya berkaitan dengan berkelanjutan kerja sama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki kawasan perbatasan yang bersinggungan. Namun kini, permasalahan tersebut berkembang menjadi permasalahan multilateral hingga internasional. Ruang lingkup pengelolaan kawasan perbatasan dapat dibagi ke dalam empat bagian, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Jika mengacu pada teori yang dikemukakan Jones, terdapat tiga isu utama yang kemudian muncul dalam masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, yaitu⁵⁶ :

- 1) Masalah Yang berkaitan dengan penetapan garis batas meliputi alokasi, delimitasi, dan demarkasi, baik di darat maupun di laut.
- 2) Masalah pengamanan kawasan perbatasan.
- 3) Masalah pengembangan Kawasan Perbatasan.

4. Ekonomi Politik Islam

a. Pengertian Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah tujuan yang ingin di capai dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Dan kemudian Ekonomi politik Islam adalah penerapan beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Negara untuk menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (Primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan-jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier).⁵⁷

Perjalanan ekonomi politik dalam sejarahnya menimbulkan berbagai macam perdebatan. Sebagian mazhab menolak akan hadirnya konsep ekonomi politik, dan sebagian lainnya mendukung. Karya yang dihasilkan oleh Karl Max (2007) mengandung beberapa komentar terhadap konsep ekonomi politik. Karl Max berpendapat bahwa konsep ekonomi politik dalam suasana pekerjaan, perdagangan maupun perindustrian akan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu saja.⁵⁸

⁵⁶ Lufli Muta'ali, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014), Hlm 10.

⁵⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2007), hlm 285-286.

⁵⁸ James A. Caporaso & David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm 72.

Selain itu, Adam Smith juga berpendapat bahwa konsep pasar yang bebas atau yang biasa disebut *Laissez-Faire* Lebih adil dan baik berbanding konsep komunisme yang diperkenalkan Karl Marx. Pandangan ini yang kemudian mendapat kritikan oleh golongan sosialisme dan komunisme.⁵⁹

M. Umar Chapra⁶⁰ didalam bukunya juga ikut berkomentar dan menolak kedua-dua pandangan yang diungkapkan oleh Karl Marx dan Adam Smith dengan mengatakan bahwa kedua sistem yaitu sistem sosialis dan kapitalis sebenarnya tidak memberikan prestasi yang baik didalam perkembangan ekonomi politik dunia. Buktinya sistem tersebut telah menimbulkan kebencian masyarakat khususnya umat Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti adanya penggunaan Riba yang dirasakan sangat membebankan masyarakat.

Kemunculan ilmu ekonomi politik menimbulkan perdebatan tentang apa tanggung jawab dari Negara (pemerintah) dalam kaitannya terhadap permasalahan negara. Perdebatan ini masing berlangsung sampai sekarang dan tetap menjadi sebuah pertanyaan utama di dalam ilmu ekonomi Politik. Apakah negara bertanggung jawab untuk menentukan kebutuhan mana yang akan dipenuhi dan bertanggungjawab untuk mengalang sumber daya untuk menjamin berhasilnya pemenuhan itu? pertanyaan lainnya adalah apakah masalah-masalah seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain, disediakan oleh warga negara sendiri atau swasta dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki sendiri? ataukah kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi oleh negara?⁶¹

b. Pendekatan Ekonomi Politik Dan Politik Ekonomi

Menurut Staniland (1985) dalam deliarnov, pembauran antara ilmu ekonomi dan ilmu politik bisa menghasilkan salah satu dari dua metode analisis berikut: (1) Metode analisis Politik Ekonomi (*the political theory of economics*), yaitu penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk memahami permasalahan-permasalahan ekonomi, dan (2) metode analisis Ekonomi Politik (*the economy theory of economics*), yaitu penerapan cara pendekatan yang

⁵⁹ *Ibid*, 73.

⁶⁰ M. Umar Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Ed. Ke-1. (Kuala Lumpur, Thinker's Library, 1997), hlm 35.

⁶¹ James A. Caporaso & David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm vii.

bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan-permasalahan politik.⁶²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam metode politik-ekonomi, teori politik dimanfaatkan untuk memahami berbagai permasalahan ekonomi, sebab berdasar teori ekonomi belaka tak mampu menerangkan secara memuaskan bagaimana perilaku aktor ekonomi dalam menghadapi proses atau peristiwa ekonomi tertentu sehingga diperlukan aspek politik. Berbeda dengan pakar ekonomi murni, pakar politik ekonomi, tidak berhenti pada analisis dari sekumpulan variable atau parameter ekonomi pada saat mencoba memahami suatu peristiwa ekonomi, tetapi juga akan menyelidiki siapa saja aktor yang terlibat yang menyebabkan adanya perubahan dalam variable tersebut.

Berbeda dengan pendekatan politik ekonomi, pakar ekonomi politik berusaha menjelaskan bahkan ekonomi politik adalah tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu pada saat mereka melakukan aktivitas politik. Menurut pakar ekonomi politik, dibelakang kegiatan politik aktor tertentu ada motivasi ekonomi yang mendasarinya.

Sedikit berbeda dengan pengelompokan model-model ekonomi politik oleh staniland diatas, caporasi & Levine (1993) model-model ekonomi politik dikelompokkan sesuai "substansi" dan "metodologi" yang digunakan dalam analisis. Jika dibahas sesuai dengan metodologi ekonomi (sel 1, substansi ekonomi termasuk bidang ekonomi tradisional atau ekonomi murni yang biasa dipelajari oleh mahasiswa pada fakultas ekonomi. Hal-hal yang dipelajari biasanya terkait dengan perilaku agen-agen ekonomi dalam mengoptimalkan kesejahteraan masing-masing dalam setting pasar, teori harga atau efisiensi dalam konsumsi, produksi, dan alokasi. Begitu juga untuk substansi politik yang dibahas dengan menggunakan metodologi politik (sel 4) merupakan kajian bidang politik murni yang dipelajari mahasiswa pada fakultas politik. Yaitu hal yang berkaitan langsung arena politik.

Bagaimana dengan dua sel selebihnya, yaitu sel 2 dan sel 3? Jika substansi politik dikaji dengan metodologi ekonomi (s2), yang dikaji adalah pengaplikasian metode-metode ekonomi dalam hal-hal yang menyangkut politik. Sedangkan jika substansi ekonomi dikaji dengan metodologi politik (sel3), yang dipelajari dan

⁶² Deliamov, *Ekonomi Politik*, (Indonesia: Penerbit Erlangga, 2006), hlm 15

dibahas adalah pengaplikasian metode-metode politik dalam aktivitas-aktivitas ekonomi.⁶³

TABEL 2.3
Model-Model Ekonomi Politik dilihat dari metodologi dan Substansi

Metodologi	Substansi	
	Ekonomi	Politik
Ekonomi	Sel 1: Pengaplikasian metodologi ekonomi dalam substansi ekonomi (ekonomi Murni)	Sel 2: Pengaplikasian metodologi ekonomi dalam substansi politik
Politik	Sel3: Pengaplikasian metodologi politik dalam substansi ekonomi	Sel 4: Pengaplikasian Metodologi Politik dalam substansi Politik (politik murni)

Sumber : Deliarnov, *Ekonomi Politik*, hlm 16.

Dengan adanya pendekatan ini, dapat membawa kita pada ide bahwa ekonomi politik terlibat dalam ruang, arena, dan subsistem ekonomi dan politik, kajian ekonomi politik bukan tentan “ apa yang terjadi: sewaktu fenomena ekonomi dan politik bertabrakan, melainkan pengaplikasian penjelasan ekonomi terhadap proses-proses politik (*application of economic reasoning to political process*). Penjelasan ekonomi yang dimaksudkan disini adalah aturan-aturan atau kaedah-kaedah tentang perilaku berekonomi (*rules of economizing behavior*).

Pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Menurut corporaso & Levine dalam deliarnov,

⁶³ James A. Caporaso & David P.Levine, *Teori-Teori* hlm 62-65.

pada awalya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan pemaknaan ekonomi politik pada waktu itu sebagai pengelolaan masalah-masalah ekonomi negara (*political economy referred to the management of economic affairs o the state*).

Sehingga bagi ahli ekonomi politik, bahwa segala kegiatan ekonomi, seperti kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat, tidak terlepas dari konteks politik. Tegasnya, sistem politik tidak hanya membentuk *power relathionship* dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai serta norma-norma yang sedikit lebih banyak akan menentukan apa dan bagaimana berbagai kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat.

Sebagai catatan, walau kajian politik-ekonomi berbeda dengan ekonomi politik, tetapi dari keduanya istilah “ekonomi politik” yang lebih sering digunakan. yang bisa digunakan mewakili “politik-ekonomi” maupun “ekonomi-politik”. Begitu juga dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, kita akan lebih banyak menggunakan istilah “ekonomi politik”, walau yang dimaksudkan mungkin tidak hanya ekonomi-politik, tetapi juga politik-ekonomi.

c. Konsep Ekonomi Politik Islam

Ilmu ekonomi politik Islam pada dasarnya berasal dari dua bidang kajian utama yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lainnya. Yaitu bidang politik Islam dan ekonomi Islam. Politik secara umum bermaksud untuk mengurus kekuasaan dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Dan kekuasaan itu bisa terjadi dalam berbagai tingkatan. Misalnya seorang ayah merupakan pemimpin dan memimpin keluarganya, sehingga disini seorang ayah dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada keluarganya.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa sistem politik Islam merupakan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan manusia.⁶⁵ Peraturan ini bisa dipergunakan selagi digunakan untuk kemajuan dan kepentingan manusia dan selama peraturan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Islam. sehingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat

⁶⁴ *Ibid*, hlm 8..

⁶⁵ Yusuf Qaradhwai, *Fiqh Kenegaraan*, (Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia, 2002). Hlm 58.

difahami bahwa politik bukan hanya memberi rangsangan kepada partai politik saja, akan tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan manusia.

Para ulama juga membahas peranan politik dalam arah pembangunan, dimana politik dapat menggalakkan perkembangan masyarakat menjadi arah yang lebih sempurna. Oleh sebab itu pemahaman konsep ekonomi politik Islam sangat penting dilaksanakan agar memastikan dan strategi pelaksanaannya sesuai dengan kehendak syariat Islam. *Yusuf al-Qaradhawi* menegaskan⁶⁶ :

“Islam menyiapkan cara-cara yang sempurna bagi mengatur manusia. Cara-cara itulah yang dipakai guna mengatur kehidupan politik. Tanpa kuasa politik, negara tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mengajak orang supaya melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan, berjihad, menegakkan keadilan, mendirikan sholat, menolong orang yang teraniaya dan lain-lain.”

Kemudian bidang utama yang kedua yang terdapat dalam ekonomi politik Islam yaitu ekonomi Islam. Menurut Joni Tamkin bahwa tujuan ekonomi Islam adalah terciptanya keadilan, pemilikan harta kekayaan dan nilai-nilai etika.⁶⁷ Selanjutnya, penelitian yang di lakukan oleh Patmawati Ibrahim mengatakan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat instrument Zakat yang berguna untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat. Karena dengan pelaksanaan yang amanah, dan peningkatan taraf sosio-ekonomi ini mampu memberikan keseimbangan antara pembangunan Fiskal dan pembangunan rohani.⁶⁸ Keseimbangan antara pembangunan fiskal Dan Pembangunan rohani inilah yang merupakan inti dari ekonomi Politik dalam Islam, dimana bertujuan untuk menghilangkan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial dan ketidakstabilan ekonomi.

Lebih lanjut, secara jelas terlihat bahwa ada peran syariah dalam setiap perilaku manusia, sehingga hal tersebut yang membedakan dengan Ekonomi Politik Universal (Konvensional). Setidaknya terdapat 2 perbedaan mendasar yang sering ditemukan, yaitu :

1) Tujuan Akhir

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 23.

⁶⁷ Joni Tamkin, *Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*. Jurnal Ushuluddin. Kuala Lumpur. Bahagian Pengajian Ushuluddin, akademi pengajian Islam Universiti Malaya. Bil. 25 Januari-Jun 2007, Hlm 2.

⁶⁸ Patmawati Hj Ibrahim, *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat : Tinjauan Empirikal*. Jurnal Syariah, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jil. 16, Bil 2, Julai-Disember 2008. Hlm 3.

Menurut Syukri Salleh, bahwa setiap aktivitas harus didasari akan niat untuk mencari keridhoan Allah SWT, dan *mardotillah* inilah yang menjadi tujuan akhir manusia di Dunia, khususnya dalam segala aktivitas pembangunan-pembangunan harus berdasarkan Syariat agar mendapatkan pahala.⁶⁹ Hal ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Affandi Hasan, dimana mengatakan bahwa tujuan akhir dari segala aktivitas manusia adalah *Al-Falah*.⁷⁰

Falah adalah Kemuliaan dan Kemenangan, yaitu Kemuliaan dan kemenangan dalam Hidup. Istilah *Falah* menurut Islam diambil dari Al-Qur'an⁷¹, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.⁷²

Sehingga berdasarkan pembahasan diatas, tujuan akhir dari ekonomi Politik Islam hanya bermuara kepada 2 hal saja, yaitu *Al-Falah* Dan *Mardhotillah*. Dan tujuan ini sangat berbeda dengan Ekonomi Politik Universal yang mana hanya mengutamakan kepada keuntungan, kepuasan, penambahan dari segi Fisik. Dan melihat segalanya dari sudut kebendaan dan keuntungan pribadi semata tanpa memperhatikan aspek rohani.

2) Epistimologi

Perbedaan ekonomi politik konvensional dengan ekonomi politik islam juga terdapat dari segi epistimologinya. Bedanya sangat jelas terlihat, dimana sumber utama Ekonomi Politik Islam adalah berdasarkan *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*. Sedangkan pada ekonomi politik Universal hanya bersumber pada akal manusia semata.⁷³

⁶⁹ Muhamad Syukri Salleh, *7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*, (University Sains Malaysia, Zebra Edition Sdn. Bhd, 2003) hlm 13.

⁷⁰ Mohd Affandi Hassan, *The Tawhidic Approach In Management And Public Administration : Concept, Principles And an alternative Model*, (Kuala Lumpur, INTAN, 1992), hlm 56.

⁷¹ Istilah *Falah* disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an sebagai Ungkapan atas orang-orang yang sukses. Misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata *Muflihin* (QS 3:104, 7:8, 167, 9:88, 23:102, 24:51), *aflih* (QS 23:1, 91:9).

⁷² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), hlm 2.

⁷³ Muhamad Syukri Salleh, *7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*, (University Sains Malaysia, Zebra Edition Sdn. Bhd, 2003) hlm 20-21.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik Mainstream atau Universal hanya berorientasi kepada kebendaan, dan keuntungan semata, sangat berbeda apa yang diajarkan dalam Islam, akan ada kehidupan setelah kehidupan di Dunia ini, sehingga manusia harus selalu memperhatikan aktivitas-aktivitasnya agar selalu diridhoi dan diberkahi Allah SWT. Kemudian kegagalan dalam menyeimbangkan antara aspek pembangunan material dan pembangunan rohaniah, maka pada akhirnya akan menimbulkan masalah dan tidak akan menemukan jalan penyelesaiannya. Karena hanya pemerintah dan ekonomi yang kemudian dibingkai dalam syariat Islam yang akan mendatangkan kesejahteraan baik di Dunia maupun di akhirat kelak.

d. Ciri-Ciri Ekonomi Politik

Menurut Shamsul Bahriah Ku Ahmad, Ekonomi Politik tidak hanya menyikapi permasalahan ekonomi, akan tetapi juga membahas permasalahan sosiologis, sains, politik dan sejarah.⁷⁴ Deliamov juga mencirikan bahwa ekonomi politik ini sebagai pengarahannya kepada isu-isu yang berkaitan dengan teori sosial yang timbul akibat dari pembahasan mendalam antara hubungan ilmu ekonomi dan ilmu politik.⁷⁵ Begitu menurut pendapat Devas dalam bukunya yang mengatakan bahwa ciri-ciri ekonomi Politik itu dapat di kaji dalam hubungan antara sains dan undang-undang ekonomi secara umum.⁷⁶ Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Shivley⁷⁷ juga ikut memberikan pendapatnya berkaitan tentang ciri dari ekonomi politik, menurutnya ekonomi politik sebagai ilmu yang termasuk dalam bidang politik, akan tetapi membahas bagaimana interaksi anatara ekonomi dan negara. Kata-kata beliau seperti berikut :

"The Subfield Of Political Economy Within Political Science Focuses on how the state and economy interest"

Berdasarkan beberapa ciri-ciri yang disampaikan mengenai ekonomi politik, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik sebagai alat analisis kebijakan yang menghubungkan interaksi antara ekonomi dan pemerintah dalam memelihara

⁷⁴ Shamsulbahriah Ku Ahmad, *Pengantar Ekonomi Politik*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm 4.

⁷⁵ Deliamov, *Ekonomi Politik*. (Indonesia: Penerbit Erlangga.2006), hlm 10.

⁷⁶ Devas C.S, *Political Economy*, (Bibliobazaar, LLC, 2009), hlm 25.

⁷⁷ Shively, W.P. *Power And Choice An Introduction To Political Science*. Ed. Ke-12. (Mc Graw Hill International Edition, 2011), hlm 8.

negara demi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dan ekonomi politik mencakupi bidang sains politik, meliputi ilmu sosial, budaya, hukum dan psikologi.

Dalam Islam, ciri-ciri ekonomi politik Islam sangat jauh berbeda dengan ekonomi politik Universal. Menurut Muhammad Syukri Salleh ⁷⁸ perbedaan tersebut terletak dari pada aspek epistimologinya, dimana ekonomi politik konvensional berafiliasi kepada pemikiran barat, sedangkan ekonomi politik Islam bersumber dan berakar dari empat sumber utama yaitu Al-Qur'an, Hadisth, Ijma', dan Qiyās Ulama. Dan ke-empat sumber utama inilah yang memberikan pedoman bagaimana pembangunan dalam Islam secara hakiki.

Kemudian apabila ekonomi Politik ini dilihat dari segi pembangunan sumber manusia, maka ekonomi politik mempunyai persamaan dengan ekonomi politik Islam. Persamaan terletak pada konteks pembangunan manusia dari segi tanggungjawab pemerintah dalam mengurus permasalahan pembangunan manusia. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ahmad Erani Yustika, Negara wajib mengemban peran etis (etika) untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi bagian dari tanggungjawabnya.⁷⁹

Maksud etis diatas adalah bukan sekedar suatu pemikiran sistematis tentang moral, akan tetapi lebih kepada pemahaman yang harus selalu ditanyakan secara kritis dan mendasar terhadap segala hal yang dipergunakan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah (Negara) seharusnya menjalankan kehidupannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga dari kacamata ekonomi Politik jelas bahwa peran negara sangat penting dalam meningkatkan pembangunan suatu peradaban. Sehingga setiap program dan kebijakan yang dilakukan harus dihadapkan dengan pertanggungjawaban etis negara : apakah memang program yang bersangkutan memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan atau tidak.

Dalam perguliran pemikiran ekonomi politik, secara konservatif terdapat beberapa argument-argumen yang muncul berkenaan pentingnya peran negara untuk melindungi setiap pelaku ekonomi. Mazhab neoklasik, misalnya, mengizinkan peran negara dalam perekonomian jika terdapat kasus eksternalitas (*externality*) Barang-barang publik (*Public Goods*).dalam kasus ini misalnya

⁷⁸ Mohd Syukri Salleh, *7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*. (Universitas Sains Malaysia: Zebra Edition Sdn.Bhd, 2003). hlm 20-21.

⁷⁹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoritis Analisis Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm vii.

operasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran air sehingga merugikan masyarakat sekitarnya, disini peran negara dituntut untuk dapat membuat sebuah regulasi agar perusahaan tersebut bertindak atau masyarakat diberi ganti rugi.⁸⁰

e. Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik Islam

Pembangunan dengan pemahaman ekonomi politik Islam sangat penting peranannya dalam memastikan ide dan strategi pelaksanaannya selaras dengan aturan dan kehendak syariat Islam. Yusuf Al-Qaradhāwī menegaskan:⁸¹

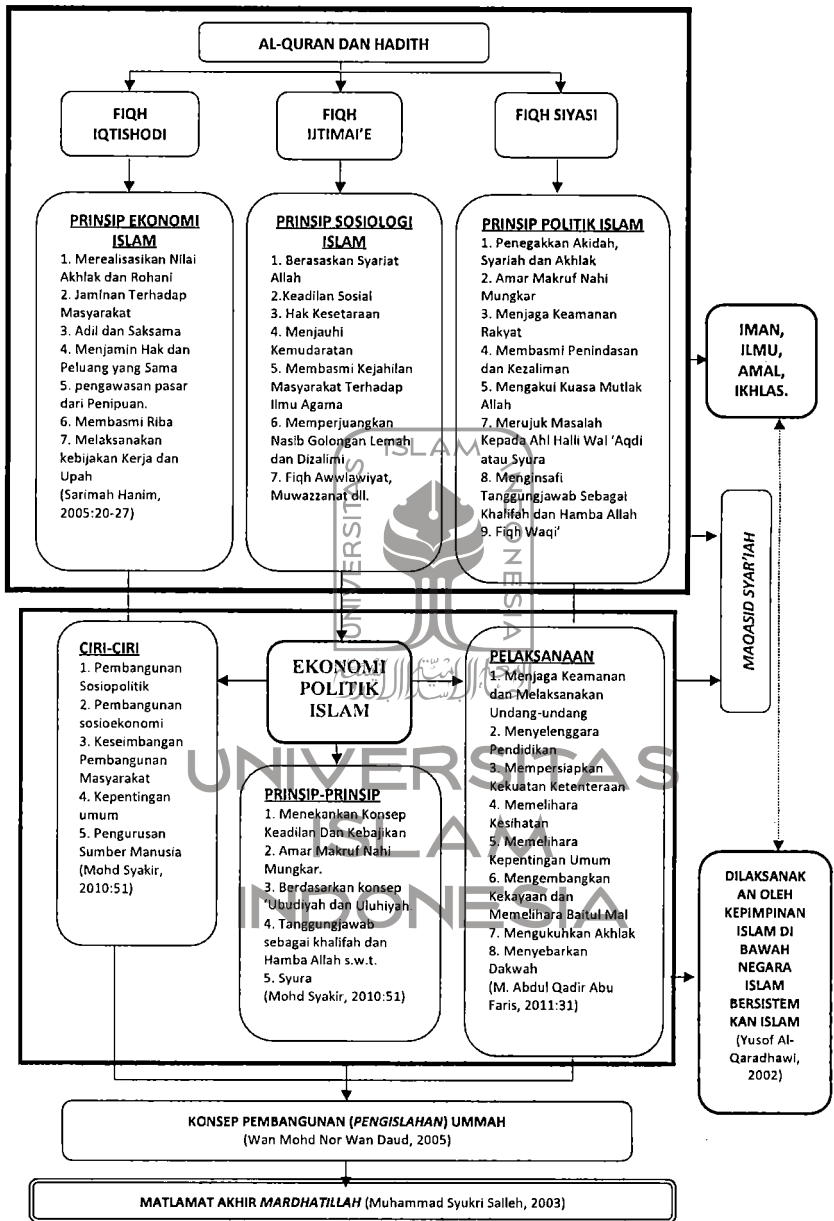
"Islam menyiapkan cara-cara yang sempurna bagi mengatur manusia. Cara-cara itulah yang dipakai untuk mengatur kehidupan politik. Tanpa kekuasaan politik negara kita tidak dapat melaksanakan kewajiban mengajak orang agar melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan, berjihad, menegakkan keadilan, mendirikan sholat, menolong orang yang teraniaya dan lain-lain"

Hasilnya, kemajuan masyarakat dapat berkembang apabila timbulnya pelaksanaan ke arah kesejahteraan politik dan kestabilan ekonomi yang mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh sebab itulah, pelaksanaan ekonomi politik Islam ini penting untuk membina masyarakat di bawah pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan ekonomi kearah keseimbangan pembangunan masyarakat dari segi material dan rohani sangat penting untuk mengatasi timbulnya permasalahan sosial. Oleh karena itu, Tujuan pembangunan Islam pada hakikatnya mempunyai dua tujuan dasar, yaitu *Mardhatillah* dan *Al-falah*, dan kedua perkara inilah yang menjadi inti dari ciri-ciri ekonomi politik Islam.

Demi memudahkan pemahaman ringkas berkaitan konsep ekonomi politik Islam, berikut kerangka konseptual terkini berkaitan ekonomi politik Islam yang dihimpun dari beberapa karya dan kajian yang berkaitan.

⁸⁰ James A. Caporaso & David P. Levine, *Theories Of Political Economy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm 91.

⁸¹ Yusuf Qaradhiawi, *Fiqh Kenegaraan*. (Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia, 2002). Hlm 46.



Kerangka Konseptual Ekonomi Politik Islam

Sumber : Mohd Syakr Mohd Rosdi, *Ekonomi Politik Islam Teori Dan Falsafah*, 2014:156.

Gambar 2.1 menunjukkan kerangka konseptual berkaitan ekonomi politik Islam. kerangka konsep ekonomi politik Islam mencakupi ciri-ciri dan pelaksanaan yang berpedoman kepada Al-Qur'an Dan Hadist. Pelaksanaan ini bertujuan memperkokoh pembangunan ummah. Ekonomi politik ini dilaksanakan berdasarkan konsep pengislahan ummah yang bertujuan kepada *Mardhatillah* untuk memperoleh *al-falah*, yaitu keuntungan dunia maupun akhirat.

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, konsep terbagi kedalam empat bagian, yaitu :

- 1) Al-Qur'an Dan Hadist Menjadi asas utama rujukan konsep ekonomi politik. Yang menjadi batasan-batasan agar tetap pada koridor syariat dan tidak keluar dari apa yang diajarkan dalam Islam.
- 2) Ekonomi Politik Islam merupakan gabungan dari tiga maksud falsafah, yaitu falsafah sosiologi Islam, Ekonomi Islam, dan Politik Islam. Oleh karena itu, bidang ini merupakan pembahasan yang komprehensif dan holistic serta memperhatikan akan pembahasan yang jauh mendalam dari ketiga falsafah tersebut.
- 3) Ciri-ciri dan pelaksanaan ekonomi Politik Islam merupakan hasil Penelitian terhadap beberapa karya yang berkaitan. Hal ini penting bagi membedakan antara ekonomi politik Konvensional dengan ekonomi politik Islam.
- 4) Konsep *Pengislahan* Ummah merupakan pembauran dan perubahan masyarakat yang dilihat dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Perubahan tersebut adalah dalam lingkungan syariat Islam yang bertujuan kepada Ridho Allah SWT.

Lebih lanjut, berdasarkan kerangka tersebut, terdapat prinsip-prinsip dasar ekonomi Politik Islam yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

- 1) Memastikan Keperluan Hidup Masyarakat dipenuhi.
- 2) Hak Keseluruhan Masyarakat dilaksanakan dengan adil dan saksama, tanpa memperhatikan tempat, agama, dan budaya.
- 3) Perhatian ekonomi harus diteliti sebaik mungkin bagi memastikan perhatian ekonomi tersebut tidak hanya berada pada satu pihak tertentu, akan tetapi harus merata.
- 4) Kepemimpinan Negara harus beriman kepada Allah SWT, kuat, dan beramanah.

- 5) Pelaksanaan program pemerintah harus selalu sesuai dengan syariat Islam agar selalu mendapatkan rahmat Allah SWT.
- 6) Mengharapkan ridho Allah SWT adalah prinsip utama bagi ekonomi Politik Islam.⁸²

f. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomi Politik Islam

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan sosial dan kemajuan yang berkeadilan, hendaklah memperhatikan pilar-pilar pembangunan dalam ekonomi. Pilar pembangunan yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan oleh pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Ada lima pilar kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut.⁸³

1) Menghidupkan Faktor Manusia

Setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain. Ada dua upaya yang harus dilakukan dalam menghidupkan faktor manusia. *Pertama*, Mendorong motivasi individu. *Kedua*, Memberikan pelatihan. Sistem yang paling mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi dan mewujudkan keadilan dalam distribusi adalah motivasi individu. Dan kemudian setiap individu harus diberi kecakapan melalui pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan

Masalah ekonomi yang serius, kapan dan dimana pun merupakan adanya pemusatan kepemilikan atas sarana produksi hampir setiap negara, lebih-lebih negara muslim. Hanya dengan kebijakan yang serius dan tepat, pemusatan ini akan berkurang dan bisa mendorong terciptanya pemerataan ekonomi. Pengurangan pemusatan kekayaan ini didasarkan pada sebuah firman Allah SWT dalam Al-qur'an:

⁸² Mohd Syakir Mohd Rosdi, *Ekonomi Politik Islam Teori Dan Falsafah*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014). hlm 16.

⁸³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*. (Bandung : Pustaka setia, 2010) hlm 18.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." (Q.S. Al-Hasyr 56:7).

Dan kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut :

a) *Land Reform*

Sebuah konsep klasik politik ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan *Land Reform* adalah *Ihya' al-mawat'*, yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk kemudian dijadikan lahan produktif.

b) *Pengembangan Perusahaan Kecil Dan Mikro*

Pengembangan perusahaan kecil dan makro yang efisien akan mengurangi pemusatan kekayaan. Pengembangan perusahaan keil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penuntikan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

3) Rekonstruksi Ekonomi Publik⁸⁴

a) *Mendisiplinkan Pemborosan Anggaran*

Islam Sangat menekan kepada siapapun menghindari perilaku pemborosan. Ada dua bentuk pemborosan dalam Islam, Yaitu (1) Pemborosan dalam Konsumsi dan (2) pemborosan dalam produksi. Pemboroan dalam konsumsi adalah seseorang melakukan aktivitas konsumsi hanya untuk memenuhi keinginan (Hasiat) namun mengabaikan kebutuhannya. Adapaun

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 20.

pemborosan dalam produksi adalah seorang melakukan eksploitasi kekayaan tanpa mempertimbangkan sisi maslahatnya, sehingga kekayaan melimpah begitu saja tanpa terdistribusikan secara efektif.⁸⁵

Ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan pemborosan yaitu : *pertama*, Menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi. *Kedua*, menyadarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros.

b) Prioritas Pembangunan

Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan beberapa kaidah terkait pengeluaran kekayaan public oleh pemerintah. Kesejahteraan publik (*Al-Mashlahah al'ammah*) harus merupakan tujuan utama dari semua pengeluaran negara. Semua proyek infrastruktur pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja harus diberi prioritas lebih daripada pembiayaan yang tidak berperan signifikan.

Kemudian para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang terkait dengan pengeluaran kekayaan Negara, di antaranya :

- (1) Pengeluaran Kekayaan Negara harus untuk kesejahteraan umum
- (2) Menanggulangi Kesulitan dan penderitaan harus di Utamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana gempa atau banjir harus diutamakan dibanding membiayai aktivitas seni.
- (3) Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan daripada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas irigasi pertanian Publik harus diutamakan daripada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.
- (4) Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya..⁸⁶

c) Restrukturisasi Keuangan

(1) Pengembangan Masyarakat Pinggiran (Badiyah)

Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat sebuah teori pembatasan alokasi pendapatan Negara. Terdapat beberapa pendapatan Negara yang tidak boleh dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 21.

⁸⁶ Ali Haidar, *Durar Al-Hukm Syaah Majalan Al-Hakam*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, hlm 51-57), hlm 51-57.

harus dialokasikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, Zakat dan Fidyah yang tidak boleh dialokasikan untuk orang selain mereka yang berhak untuk menerimanya.

Masyarakat Pinggiran disini dapat diartikan mereka yang berada jauh dari pusat modal, jauh dari peningkatan infrastruktur dan pembangunan, sehingga wajib untuk dilakukan pembangunan yang lebih intensif kepada mereka melalui anggaran-anggaran yang telah ditentukan oleh Negara. Dilihat dari sisi kesiapan, masyarakat pinggiran termasuk siap melakukan kerja keras, melebihi masyarakat perkotaan. Akan tetapi, kesiapan mereka tidak didukung oleh kemudahan akses pada sumber-sumber modal atau keuangan tersebut.

Sehingga, pada tingkat lebih teknis Negara harus membuat regulasi untuk lembaga-lembaga perbankan agar mengembangkan sistem pembiayaan bagi industri kecil dan menengah, bukan di alokasikan secara ekstrem untuk industri-industri besar di perkotaan yang notabeneanya lebih memiliki daya yang banyak.

(2) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Risiko Bersama

Sistem fiskal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggung risiko bersama. Tanggung risiko bersama disertai imbalan oleh lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mereka mengakses lembaga perbankan dan menjalankan aktivitas usahanya.

d) Perubahan Struktural

(1) Reformasi Institusi

Reformasi Institusi merupakan sebuah evaluasi terhadap kebijakan sebuah lembaga yang ada selama ini dan menjalankan berbagai kebijakannya. Sehingga reformasi Institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus disampingkan, dan mana yang harus di tutup.

Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas (*Al-Aulawiyat*) dan rasionalitas faktual, sama halnya ketika mengeluarkan anggaran juga harus melihat aspek realitas. Misalnya mengeluarkan anggaran yang sangat besar di lembaga pertahanan, sementara tidak ada ancaman serius dari masalah pertahanan.

(2) Perubahan Kebijakan Yang proporsional

Terlalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk kedalam suatu bentuk pemborosan yang structural. Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politis yang sangat membahayakan. Sehingga perlu kiranya sangat selektif terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

g. Teori-Teori Ekonomi Politik Islam

Pada pembahasan sebelumnya, terdapat perdebatan tentang bagaimana peran negara (Pemerintah) dalam turut ikut andil dalam menyelesaikan berbagai masalah kenegaraan. Akan tetapi Islam sebagai Agama Universal memiliki aturan tersendiri berkaitan peran negara tersebut. Sehingga lahirlah beberapa teori berkaitan ekonomi Politik Islam.

Adapun teori-teori Ekonomi Politik Islam yang berkembang, diantaranya sebagai berikut :

1) Teori Tujuan Negara⁸⁷

Al-Mawardi Termasuk Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan negara dalam bukunya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*.⁸⁸ dia menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.⁸⁹

⁸⁷ Kata "Tujuan Negara" dalam tulisan ini diterjemahkan dari kata *ahdraf ad-daulah* dalam tulisan Ma'ruf Ad-Dawalibi, *ad-daulah Wa As-sulthah*, (Kairo: dar asy-Syuraq, 1985), hlm 14, Abd Al-Ghihna 'Abdud, *Ad-daulah Al-Islamiyyah wa ad-daulah Al-Mu'ashirah*, Lebanon : Dar Al-Fikr Al-Farabi, 1981, hlm 18 dan dari tulisan Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Lebanon : Dar Al-Fikr Al Mu'ashir 2002, Jilid 8, hlm 6380, dengan versi kata *ahdraf*. Dalam sains politik dan ketatanegaraan, Istilah ini telah menjadi populer dan baku. Untuk Istilah tujuan negara dapat dilihat tulisan Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004, hlm 45 dan tulisan Dedi Ismatullah, *Ilmu Negara Muthakhir*, Bandung: Pustaka At-Tadbir, 2006, hlm 79.

⁸⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah , wal Wilayat al- Diniyyah*, (Kairo: Mustafa al-babi al-halabi, 1973), buku yang berisi tentang doktrin sunni mengenai pemerintahan. Buku ini merupakan karya ber-genre Fiqhi yang ditulis ketika bani saljuk menduduki kekuasaan di jantung Negara Bani Abbasiyyah, Al-Qaim, seorang khalifah bertaha masa itu, ada dibalik penulisan karya otoritatif tersebut.

⁸⁹ *Ibid...*, hlm 5. Secara umum, teori tujuan negara dikembangkan oleh para ahli hukum tata negara sunni, seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Dan lain-lain. Al-Ghazali Menyebutkan bahwa tujuan suatu negara yang di dalamnya terdapat lembaga pemerintahan adalah untuk melaksanakan syariat agama, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Sementara itu Ibnu Taimiyyah Menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk (1) melaksanakan syariat Islam ; (2) mengusahakan kesejahteraan Rakyat, baik lahir maupun batin ; (3) menegakkan keadilan untuk masyarakat. Pandangan Ibnu taimiyyah yang cukup terkenal adalah bahwa tanpa kekuasaan negara yang otoritatif, agama berada dalam bahaya dan tan tanpa agama negara menjadi tiranik (brutal).

Selain Al-Mawardi, teori tujuan negara dikembangkan oleh At-Taftazani, Ibnu Khaldun, Dan Abu Al-A'la Maududi. At-Taftazani menyebutkan bahwa didirikannya negara adalah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun pun menyebutkan bahwa negara adalah sebuah sistem koordinasi umum yang bertugas membawa masyarakat pada aturan-aturan syariat dalam seluruh kegiatan mereka, baik yang menyangkut urusan akhirat maupun urusan dunia.⁹⁰

Adapun *Abu Al-A'la Maududi* menyebutkan bahwa tujuan (*Ahdāf*) didirikannya negara (sekaligus sebagai Kewajibannya) di antaranya :

- a) Untuk Memperkokoh persatuan masyarakat;
- b) Melindungi lima hal dasar pada diri manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keluarga, dan kekayaan;
- c) Mengelola kekayaan alam ('*imarah al-ardh*);
- d) Memelihara etika-etika Islami;
- e) Menegakkan Keadilan Sosial;
- f) Mengusahakan Kemakmuran bagi setiap individu sesuai dengan aturan Islam
- g) Membentuk masyarakat yang makmur
- h) Mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
- i) Mendukung aktivitas dakwah, baik di dalam maupun di luar negeri.⁹¹

Teori Tujuan Negara yang dikembangkan oleh *Al-Mawardi* yang menyebutkan bahwa tujuan didirikannya negara untuk menjaga agama dan mengelola dunia. Pengertian mengelola dunia dalam tulisan *Al-Mawardi* adalah menciptakan ketertiban Sosial.⁹²

Negara erat kaitannya dengan pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas negara, *Al-Mawardi* kemudian menyebutkan sepuluh fungsi pemimpin negara. *Pertama*, mempertahankan dan memelihara negara menurut prinsipnya dan apa yang telah menjadi konsensus di kalangan para ulama. *Kedua*, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. *Ketiga*, melaksanakan

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm 6380-6399.

⁹² Fauzi An-Najjar. *Al-Fikr As-Siyasi Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1989), hlm 175.

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dan menegakkan keadilan menyeluruh bagi penganiaya dan yang teraniaya. *Keempat*, melindungi wilayah kekuasaan dan menjamin keamanan rakyat sehingga mereka bebas dan aman, baik jiwa dan harta. *Kelima*, menyatakan perang kepada mereka yang merusak ideologi Islam setelah mereka diingatkan secara persuasive. *Keenam*, mengoordinasi kekuatan dalam menghadapi musuh negara. *Ketujuh*, mengelola hasil-hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran mereka. *Kedelapan*, mengatur pengalokasian kekayaan negara secara efektif. *Kesembilan*, mendudukkan para ulama dan ahli hukum sebagai referensi formal bagi negara dan masyarakat, dan beraktivitas. *Kesepuluh*, menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi sendiri.⁹³

Teori tujuan Negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi ini memiliki dua konsep dasar, yaitu:

1) Formalisasi Aktivitas Syariat

Al-Mawardi mengonsepan agar setiap pelaksanaan kesyariatan, seperti sholat dan ibadah lainnya, dikoordinasi oleh pemerintah. Sebagai contoh diangkatnya para petugas ibadah sholat (*Wilayah al-Imamah 'ala al-shalah*), dalam hal ini imam dan muazin. Begitu juga dalam ibadah Haji, Al-Mawardi mengonsepan agar negara membentuk lembaga yang secara khusus menangani haji (*al-Wilayah 'ala-Hajj*).⁹⁴

Adapun tujuan dari formalisasi aktivitas syariat ini yang dilakukan oleh negara agar eksistensi syariat tetap terjaga sehingga masyarakat akan selalu merasa melaksanakan syariat Islam bukan sekadar pemenuhan kewajiban ketuhanan, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban bernegara. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa dirinya mendapatkan titah dari Tuhan dan kewajiban dari pemerintah.

2) Regulasi Aktivitas Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum, dan Militer

Al-Mawardi mengonsepan agar Negara melakukan dua langkah, yaitu membentuk lembaga-lembaga negara dan menyusun aturan-aturan (*ahkam*) untuk setiap lembaga yang dibentuk.⁹⁵ Dan lembaga yang paling

⁹³ Al-Mawardi, *Adab Ad-Dunya Wa Ad-din*. (Lebanon: Dar Al-fikr, 1987), hlm 13.

⁹⁴ *Ibid*. Hlm 100.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 3.

penting dibentuk menurut Al-Mawardi adalah lembaga kehakiman (*Wilayah al-qadha*), lembaga pengawas profesi dan aktivitas kontrak kerja masyarakat (*Wilayah Al-Hisbah*), dan lembaga pengaduan jabatan publik (*Wilayah Al-Mazhalim*). Selain itu Al-Mawardi menyebutkan negara penting untuk mendirikan lembaga pencatatan keuangan permanen yang disebut *Diwan*, pada saat terjadi penerimaan dana dari daerah ke pemerintahan pusat. Diwan ini berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.⁹⁶

2. Teori Kewajiban Negara

Dalam Islam negara memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi yang pada dasarnya ditunjukkan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup minimum bagi semua anggota masyarakat. Demi tercapainya tujuan-tujuan ini, negara harus menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya. Fasilitas infrastruktur disediakan dengan benar dan ada lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakan hukum dan satabilitas, serta memberikan keadilan bagi semua.⁹⁷

Teori Kewajiban Negara Menyatakan Bahwa Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori ini dikembangkan oleh *Abu Yusuf*, Lengkapnya *ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais Bin sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-kufi Al-Baghdadi*. Ia dikenal sebagai penulis buku *Al-Khuraj*.⁹⁸

Selain itu, pendekatan masalah publik (*Mashlahah al-'ammah*) merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan. Dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid adalah agar ia mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudaratannya bila akan memberlakukan suatu kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktifitas publik.⁹⁹

Pandangan dan teori-teori hukum tata negara Abu Yusuf merupakan pengembangan dari beberapa kebijakan dan tindakan Umar Bin Al-Khatthab. Hal ini

⁹⁶ *Ibid* hlm 199.

⁹⁷ Sabahuddin Azmi, *menimbang ekonomi Islam-Keluangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlm 41.

⁹⁸ Rifat Al-Audhi, *Min At-Turats : Al-Iqtishad lil Al-Muslimin*, (Mekah : Rabithah Al' Alam Al-Islami, 1985), hlm 119.

⁹⁹ Lihat Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Kairo : Maktabah Salafiyyah, 1382), hlm 92.

dapat terlihat dalam bukunya yang berjudul *Al-Kharaj* . sangat jarang, bahkan nyaris tidak ada tindakan sahabat Nabi Muhammad lainnya yang diambil pandangannya oleh beliau.

Teori Kewajiban Negara abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu¹⁰⁰ :

a. Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif

Pengertian penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dana selalu memenuhi aspek kemashlahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Salah satu pernyataan beliau, sebagai dipetik dari surat yang dikirimkan oleh Umar Bin Khattab Kepada Abu Musa Al-Asy'ari berkenaan dengan kewajiban pemimpin Negara adalah sebagai berikut :

Penguasa yang sukses menurut Allah adalah mereka yang membuat rakyatnya makmur. Sementara itu, penguasa yang buruk menurut Allah adalah mereka yang menyengsarakan rakyatnya. Hati-Hatilah para pemimpin Negara. Sebab, Jika kalian Korup, bawahan-bawahan kalian akan mengikuti Jejak. Bila berbuat Korup, dirimu Lavaknya seekor binatang yang menemukan lahan hijau disuatu tempat dan melahap setiap tumbuhan yang terdapat disana. Ia mengira bahwa tubuhnya akan semakin bertambah gemuk, namun justru kegemukan itu membinasakan dirinya.¹⁰¹

b. Pemeliharaan Hak Rakyat

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan Bahwa kepala Negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan, termasuk pemenuhan Hak Rakyat.

Negara berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang Hak dan Kewajiban mereka, terutama yang menyangkut Hukum. Walaupun begitu,

¹⁰⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (siyash Maliyah) : Teori- Teori Pengelolaan Sumber daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Pustaka Setia , Bandung : 2010), hlm 33.

¹⁰¹ Lihat ungkapan-ungkapan sugestif Abu Yusuf yang ditujukan kepada Harun Ar-Rasyid dalam Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*. (Kairo:Maktabah Salafiyah.1382), hlm 15.

Kepala negara tidak berarti Punya Hak untuk merumuskan hukum karena mereka hanya penerap Hukum, artinya kepala Negara adalah seorang eksekutif yang berkewajiban menerapkan hukum yang telah dirumuskan para Fuqaha.¹⁰²

c. Pengelolaan Keuangan Publik

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Publik, Abu Yusuf menajikan sebuah rujukan pertama dalam kajian ekonomi Politik dan hubungannya dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, terutama perpajakan.

Menurut Abu Yusuf, prinsip Keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara dan sistem perpajakan, akan dapat meningkatkan kemakmuran. Sebaliknya, bila pengelolaan kekayaan dan perpajakan dijalankan secara tidak adil, Negara akan runtuh. Perpajakan yang adil dan penerapan sanksi syariat secara adil akan meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga penguasa akan mendapatkan imbalannya.¹⁰³

Salah satu gagasan yang dilakukan oleh Abu Yusuf berkenaan dengan pengelolaan kekayaan Negara adalah pemberlakuan pungutan atau retribusi terhadap beberapa aktivitas komersial yang menggunakan fasilitas Umum, seperti air irigasi yang digunakan oleh petani dalam mengairi lahan pertaniannya. Pungutan yang diberlakukan ini merupakan upaya untuk memelihara kelestarian saluran irigasi dan kesejahteraan rakyat. Gagasan lainnya adalah berkenaan dengan penerapan bea untuk setiap barang yang masuk ke Negara dari Negara lain.¹⁰⁴

Abu Yusuf membuat teori bahwa negara wajib terlibat -dalam bentuk pengeluaran anggaran resmi Negara- untuk membangun fasilitas-fasilitas publik agar terjadi kelancaran pemasukan bagi kas Negara.¹⁰⁵ Negara bertanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara fasilitas Publik dengan uang yang didapat dari berbagai pungutan Rakyat. Seperti: Pajak, pengadaan dan pemeliharaan tersebut terkait dengan kemakmuran dan produktivitas tanah

¹⁰² *Ibid.*, hlm 3-13.

¹⁰³ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*. (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1382), hlm 130.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 132.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 109-110.

pertanian yang saat itu merupakan basis utama perekonomian Negara. Abu Yusuf kemudian menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Publik, seperti Bendungan dan Kanal-Kanal, wajib ditangani oleh Negara dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan. Dia menekankan bahwa bukan hanya di pungut *Kharaj-nya*, Masyarakat pun harus dijamin ketersediaan fasilitasnya supaya terjadi peningkatan pembangunan.

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara (*Mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*. Berisi doktrin ekonomi Islam. buku tersebut diterbitkan oleh *Muasasah dar al-kitab al-Islami*, Iran, tanpa tahun terbit. Selain menjelaskan doktrin ekonomi Islam, *Iqtishaduna* Memberikan catatan dan koreksi total terhadap doktrin ekonomi sosialis dan kapitalis.¹⁰⁶

Dalam teori tanggung jawab negara (*Mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh Individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu :¹⁰⁷

a) Konsep Jaminan Sosial (*Al-Tadhamun Al-Ijtima'i*)

Konsep Jaminan Sosial menyebutkan bahwa Negara berkewajiban menyediakan Jaminan Sosial untuk memelihara standar Hidup Seluruh individu dalam Masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, Negara melakukannya dalam dua bentuk : *Pertama* : menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap Individu untuk melakukan aktivitas produktif sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. *Kedua*, menyediakan bantuan langsung tunai, ketika seseorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga Negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.¹⁰⁸

Mewujudkan Jaminan sosial bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah. Agar warganya

¹⁰⁶ Ash-Shadr menjelaskan dan mengkritik mazhab sosialis dalam buku *Iqtishaduna* dari hlm 37 sampai 250 dan dari hlm 251 sampai 292 adalah kupasan dan kritiknya untuk mazhab kapitalis. Penjelasan ash-Shadr, tentang dua mazhab ini lebih jelas daripada penjelasan dari kalangan penganut sosialis dan kapitalis. Ash-Shadr lebih memahami konsep-konsep sosialis dan kapitalis dibanding orang-orang sosialis dan kapitalis.

¹⁰⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Iqtishaduna*. (Dar Al-Kitab Al Islami: Iran), hlm 697-722.

¹⁰⁸ Ash-Shadr, *Iqtishaduna*. (Iran : Muasasah Dar Al-Kitab,tt), hlm 697.

tidak terlantar secara ekonomis, akan memenuhi target kecukupan (*Addequacy*) untuk kehidupan mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip bagi pemimpin dalam mewujudkan Jaminan Sosial : ¹⁰⁹

b) Pemimpin bertanggung jawab atas keadaan semua aspek dari Rakyatnya

Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai pelayan umat daripada sebagai pejabat yang mempersepsikan jabatan sebagai fasilitas. Sehingga konsep Islam tentang kepemimpinan adalah konsep melayani dan menyangga tanggung jawab.¹¹⁰ Begitu beratnya amanah dan tanggung jawab pemimpin itulah, kemudia Nabi SAW men-*discourage* seseorang untuk tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin apabila yang bersangkutan tidak mampu memikul tanggung jawabnya. Nabi suatu saat menasahati Abu Dzar sebagai berikut :

*"Hai Abu Dzar, Engkau adalah seorang yang lemah, dan sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin adalah amanat yang berat, dan kelak pada hari kiamat ia kan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang-orang yang telah mengambilnya dengan cara yang benar dan melunasi kewajiban-kewajiban yang harus dipikulnya."*¹¹¹

c) Pelarangan Penyalagunaan Kekuasaan (*Abuse Of Power*)

Prinsip yang sangat penting dan mendasar dalam Negara Islam adalah bahwa pemerintah beserta kekuasaannya serta kekayaannya ada karunia Allah SWT bagi umat manusia, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang yang memiliki integritas terpilih di antara manusia yang lain, takwa kepada Allah SWT, bersifat adil, dan benar-benar beriman.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah An-Nisa : 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁰⁹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politi Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UII press, 2012), hlm 39-44.

¹¹⁰ Konsep ini ternyata sangat mendekati konsep modern tentang pemerintah sebagai *Public Servant* atau pelayan masyarakat. Bukti dari itu semua terlihat pada masa khilafah rasyid, symbol-simbol feodalisme tidak terdapat. Misalnya, Istana tidak ada ketika itu, suatu hal yang aneh ketika kerajaan disekitarnya baik yang bersamaan maupun yang sebelumnya. Dapat dilihat dalam Chalil, Moenawar, 1977. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad S.A.W.*, (Jakarta: Bulan Bintang), jilid IA-IVB.

¹¹¹ Hadist Riwayat Muslim (Al-Khin, *Nuzhah*, Hlm 481.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S. 4:58)"

Karena itulah, maka bisa dipahami dengan mudah bahwa semua bentuk penggunaan jabatan beserta fasilitas dan kesempatan yang melekat padanya untuk tujuan yang berlawanan dengan kepentingan dan keperluan rakyat, maka dengan keras ditentang dalam Islam.

d) Perlakuan sama terhadap semua warga Negara (*Equal Treatment*)

Islam tidak pernah memberikan *Previlage* (Keistimewaan) kepada siapapun juga untuk memperoleh perlakuan yang berbeda oleh pemerintah/imam. Negara yang memberikan keistimewaan tertentu kepada golongan tertentu akan menjurus kepada bentuk penzaliman.

Pemerintah dilarang mengeksploitasi sekelompok pihak oleh pihak lain atau bahkan oleh pemerintah sendiri. Dalam Al-Qur'an surat al-Qashash : 4 dinyatakan :

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلًا شَرًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ لَا يَخِفُّ عَلَيْهِ مَن يُكَلِّمُ الْوَسْطَىٰ مِنْ أَبنَاءِ هُمْ

وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qashash :4).

4. Teori Kemaslahatan, Keadilan, Dan Kesejahteraan

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis masalah¹¹² adalah sebagai berikut:

- a) Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratan.¹¹³

¹¹² Beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori maslahat adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin Bin abd As-Salam, dan Lain-Lain.

- b) Setiap penetapan hukum harus bermuara pada maslahat sehingga pada saat ada maslahat, disana terdapat syariah.¹¹⁴
- c) Kemaslahatan Umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan.¹¹⁵
- d) Maslahat dirumuskan secara bersama oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah para ahli untuk menentukan maslahat umum dan maslahat individual.

Dari segi tujuan, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*.¹¹⁶ Dan Masalah *Dharuriyat* mencakup lima hal dasar, yaitu sebagai berikut : a). Melindungi agama (*Hifzh ad-din*), b) Melindungi nyawa (*An-nafs*), c) Melindungi Akal (*hifz al-aql*), d) Melindungi Keturunan (*Hifzh an-nasl*), e). Melindungi Harta (*Hifzh al-Mal*).

Akan tetapi, teori ini masih menyisakan ruang kosong yang harus diisi, yaitu tidak adanya penjelasan secara teoritis tentang siapakah yang bertanggung jawab dalam melindungi lima hal dasar tersebut. Menurut Ija suntana, teori – teori ini harus digabungkan dengan teori tanggung jawab negara yang menyatakan bahwa lima hal dasar tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya.¹¹⁷

Sementara itu, berkenaan dengan teori keadilan, hampir semua ahli hukum islam membahas berkenaan tentang keadilan. Salah satunya adalah Abu hami Al-Ghazali atau akrab dikenal dengan imam Al-ghazali. Al-ghazali memiliki dua konsep pemikiran yaitu keadilan dan kesejahteraan. Pemikiran Al-ghazali mengenai kesejahteraan berakar dari sebuah konsep yang oleh Anas Zarqa disebut dengan Istilah fungsi kesejahteraan sosial islami.¹¹⁸ Al-Ghazali menjadikan

¹¹³ Abu Muhammad Izzuddin abd Al-Aziz bin abd As-Salam Al-Salami, *Qowaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo: Al-Istiqomah.t.t), Juz 1, hlm 9.

¹¹⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhwaibith Al-Mashlahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah,1977), hlm 12.

¹¹⁵ Prinsip-Prinsip ini dapat dilihat dalam tulisan Ali Haidar, *Durar Al-Hukum Syarh Majalah Al-Ahkam*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah) dan Abu Muhammad 'Izz Ad-din 'abd Al-Aziz bin 'abd As-salami, *Qowaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, (kairo: Mathba'ah Al-Istiqomah).

¹¹⁶ As-syatibi, *Al-wuafaqat Fi Ushul Asy-Syariah*, (Kairo: Maktabah Al-Istiqomah,tt), Juz 4, hlm 4.

¹¹⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (siyash Malyah) : Teori- Teori Pengelolaan Sumber daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Pustaka Setia , Bandung : 2010). hlm 59.

¹¹⁸ Anas Zarqa, *Islamic Economics : An Approach To human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed)., *Studies In Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation. 1980), hlm 12.

masalah sebagai basis teoritiknya dalam membahas tentang kesejahteraan. Sehingga masalah yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruhnya, baik untuk individu maupun kelompok.

Kemudian, Al-Ghazali menyebutkan bahwa setiap tindakan ekonomi, baik produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus selalu memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial secara hierarkial, yaitu memenuhi kebutuhan primer (*Dharuriyat*), Kebutuhan sekunder (*Hajiyat*) dan kebutuhan tersier (*Tahsiniyat*).¹¹⁹

Berdasarkan teori-teori yang akan digunakan dan analisis yang akan dilakukan, maka penulis mencoba mengelolah dan menganalisis data penelitian nanti melalui 3 tahap utama. Antara lain a). Identifikasi Perekonomian Masyarakat Perbatasan, b). pengkajian kebijakan pemerintah. c). Menganalisis kebijakan tersebut dalam pandangan ekonomi politik Islam. selengkapnya mengenai kerangka pemikiran penulis teruang dalam gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penulis

¹¹⁹ Jja Suntuana, *Politik Ekonomi* . . . hlm 61.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis membagi kepada tiga tahap, pada tahap pertama penulis mencoba untuk mengidentifikasi perekonomian masyarakat yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini, khususnya yang terjadi di pulau sebatik. Setelah melihat situasi perekonomian yang terjadi, penulis masuk kepada tahap kedua yaitu peran pemerintah, dalam hal ini penulis ingin melihat seperti apa peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara baik pada tataran pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Kemudian setelah melihat peran pemerintah tersebut, penulis masuk kepada tahapan yang terakhir yaitu mencoba menganalisis dalam perspektif ekonomi politik Islam berkaitan dengan kebijakan, atau peran pemerintah tersebut dalam mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. *Field research* yaitu sumber datanya didapat langsung di lapangan, dalam hal ini aparat pemerintah sebatik, dan juga beberapa masyarakat perbatasan Indonesia Malaysia yang menjadi sumber datanya.

Adapun sifat dalam Penelitian ini *Deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar bagaimana dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting.⁴

Penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah, dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif memiliki berbagai tujuan antara lain; mendeskripsikan mengenai gejala atau ciri-ciri yang berkaitan dengan

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2012), hlm 5.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm

⁴ Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 95.

suatu populasi tertentu, estimasi atau perkiraan mengenai proporsi populasi yang memiliki ciri-ciri tersebut.⁵

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenal manusia dan menyangkut sejarah kehidupan manusia.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial ekonomi.⁷

Dengan Pendekatan sosiologis ini dapat dikatakan juga sebagai suatu penelitian lapangan, yaitu mengkaji fenomena yang berlaku dalam kenyataannya di Masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta, dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

Hubungan yang dapat dilihat dari pendekatan ini yaitu hubungan saling pengaruh-mempengaruhi, dengan kata lain mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi.⁹

B. Tempat Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berfokus di daerah aji Kuning, Pulau Sebatik, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan pertimbangan bahwa tempat ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Tawau-Malaysia, sehingga kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti.

C. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan Penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian adalah pada dasarnya adalah yang akan dikenai

⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama: 2008), hlm 18.

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 10 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 3.

⁷ Dainsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm 11.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15-16.

⁹ Damsar dan Indrayani, *Pengantar....*, hlm 11.

kesimpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.¹⁰ Adapun yang menjadi Informan penelitian adalah pemerintahan kecamatan sebatik tengah dan BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah).

Teknik penentuan Informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian. *Purposive sampling* digunakan dalam langkah pertama untuk menentukan responden yaitu individu yang menurut pertimbangan peneliti hanya dapat didekati.¹¹

Menurut sugiyono, orang-orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :¹²

- 1) Mereka menguasai atau memahami Permasalahan.
- 2) Mereka yang ikut dalam pelaksanaan program yang dilakukan.
- 3) Mereka mempunyai cukup waktu untuk di wawancara.
- 4) Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

D. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan untuk permasalahan yang digunakan, diantaranya :

1) Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang peneliti jadikan bahan mengerjakan penelitian ini :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber pertama (objek penelitian).¹³ Sumber data utama dicatat melalui catatan secara tertulis ataupun melalui tipe, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah berupa kata-kata yang diperoleh dari sumber informan memahami masalah perbatasan.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 35.

¹¹ Naniek Kasniah, *Tahapan Menentukan Informan dalam penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 8.

¹² Sugiyono, *Merode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, (Bandung: ALFABETA Press, 2012), hlm 300.

¹³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), edisi kedua, hlm 61.

Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dimaksud disini diantaranya:

- (1) Tokoh-tokoh Masyarakat di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
- (2) Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah, pulau sebatik, Provinsi Kalimantan utara.
- (3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berupa sumber tertulis, foto dokumen dan data-data, serta laporan yang terkait permasalahan perbatasan di Pulau Sebatik.¹⁴

Sedangkan data yang berkaitan dengan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbatasan. Seperti buku laporan tahunan pemerintahan serta buku-buku yang relevan dengan permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti ada beberapa cara :

a) Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹⁵ Dalam hal ini peneliti ingin mengamati perilaku terhadap aktivitas perekonomian atau usaha mereka sehingga menjadi gambaran perekonomian masyarakat Perbatasan di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

¹⁴ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya :2001), hlm 24.

¹⁵ Endang Poewerti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 1998), hlm 129.

b) Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview secara langsung.¹⁶ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Bentuk wawancara bebas tapi terpimpin, dalam artian mengikuti pedoman seperlunya. Pedoman tersebut hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub-masalah yang diteliti. Selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti. Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman (*Guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.¹⁷

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum, dalil ataupun berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari Dinas atau Departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia pada biro statistik ataupun dokumen lembaga pemerintahan atau swasta, foto serta berbagai sumber yang lain.¹⁸

Data yang ingin digali melalui metode ini mengenai keadaan entografi dan demografi lokasi penelitian, sarana, dan aktivitas keagamaan, sarana, dan tingkat pendidikan serta jenis usaha atau mata pencarian masyarakat perbatasan. Pada teknik ini berkaitan dengan sumber terakhir, interaksi bermakna antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, interaksi internal dalam diri sendiri seperti hasil-hasil karya baik ilmiah maupun non ilmiah, berbagai bentuk catatan harian lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini sebagai bukti otentik berupa camera dan recording (rekaman).

¹⁶ Ibid., hlm 131.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 127.

¹⁸ Ibid., hlm 135-136.

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Relevansi Teori-Teori Poststrukturalisme dalam memahami karya sastra, Aspek-Aspek Kebudayaan pada Umumnya*, hlm 234.

3) Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Menurut sugiyono,²⁰ untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan dengan data-data yang diperoleh dari lapangan dirangkum sehingga membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisa. Deskriptif kualitatif dengan teknik analisa interaktif. Data itu mungkin telah muncul beberapa macam cara (Observasi, Wawancara, Intisari dokumen)²¹.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data dilakukan melalui analisa non statistic dimana data table, grafik angka yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau paragraph.

Adapun Teknik analisa data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yakni klasifikasi data, mereduksi dan memberi interpretasi pada data yang telah diseleksi dengan menggunakan teori dan konsep tersebut.²² Pengeloaahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.

a. Editing

Editing Adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing* ini. Proses *editing* dimulai dengan memberi identitas pada instrument penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrument pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.²³

b. Pengkodean

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. (Bandung: ALFABETA Press, 2012), hlm 244.

²¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian*. Hlm 48.

²² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian ...*, hlm 30-41.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 165.

Setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah mengklarifikasi data-data tersebut melalui tahapan *koding*. Maksudnya bahwa data yang telah di edit tersebut kemudian diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat di analisis.²⁴

Selanjutnya melakukan proses analisis, ini merupakan upaya mencari tata hubungan atau keterkaitan secara sistematis antara catatan hasil lapangan, wawancara, dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang etos kerja masyarakat perbatasan, dan peranan negara dalam permasalahan perbatasan.

Sedangkan alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman, yaitu proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan demikian dilakukan sejak dilapangan.²⁵

Untuk menganalisis data yaitu reduksi data, triangulasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

- a. *Reduksi Data*, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. *Triangulasi Data*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁶ Tujuan dari triangulasi data ini untuk mengecek keabsahan dan kebenaran data yang dilakukan.
- c. *Penyajian Data*, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan.

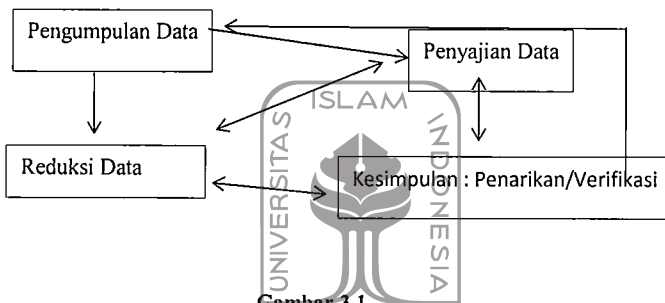
²⁴ *Ibid*, hlm 166.

²⁵ Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. hlm 73-134.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya) hlm 330.

- d. *Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi*, setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilalui dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Berikut Skema Analisis data yang akan penulis gunakan untuk membantu penelitian yang penulis lakukan yang merupakan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman.



Gambar 3.1
Skema Analisis Data²⁷

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih Bahasa Tjejep Rohidi, Cet 1, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 19.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pulau Sebatik

1. Kondisi Geografis Pulau Sebatik

Pulau sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau terdepan Indonesia disebelah timur laut Kalimantan. Letak geografisnya paling unik dan terumit dari sisi potensi konflik batas dengan negara lain. Bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia bagian sabah, sedangkan di selatan berbatasan dengan kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di sebelah barat pulau sebatik terdapat pulau Nunukan, sebagai ibu kota Kabupaten Nunukan, sedangkan di seberang utara terdapat kota Tawau, yang sudah berada di Negara bagian sabah Malaysia. Luas Pulau Sebatik wilayah Indonesia, ada 414,16 km² dengan sistem astronomi membagi dua pulau berupa lintang 4⁰ 10³ LU.

Pulau Sebatik secara administratif dikelola oleh Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan adalah salah satu daerah otonom dan merupakan wilayah perbatasan strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Terbentuk dan dimekarkan pada tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Wilayah administrasi Kabupaten Nunukan pada awal pembentukannya meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Krayan.

Posisi Pulau Sebatik sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dianggap sangat strategis dan menjadi kepentingan nasional sehingga menjadi salah satu daerah perbatasan prioritas untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan dimana pada pasal 9 ayat (2) berbunyi "Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan".²

Sebagai wilayah perbatasan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan, maka pada tahun 2011 pulau Sebatik kembali dimekarkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang ditandai dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Pemekaran menjadi beberapa kecamatan

¹ Suburi. *Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam konteks menjaga kedaulatan Wilayah NKRI, dalam mengelola perbatasan Indonesia di Dunia tanpa Batas: Isu,Permasalahan dan Pilihan kebijakan.* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010). hlm 119.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

tersebut dimaksudkan untuk membangun pulau sebatik menjadi salah satu wilayah perbatasan yang maju, agar dapat mengimbangi pembangunan kota tawau sabah Malaysia.³

Pemekaran ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Agustus 2011 yang ditindak lanjuti dengan pengisian Struktur Pemerintahan Kecamatan pada pelantikan tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 821.2/1992/BKDD-III/X/2011.

Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu wilayah pemekaran baru tentunya membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat sarana prasarana khususnya untuk tujuan fasilitas publik masih sangat minim. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat saat ini melalui "Nawa Cita" Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari Pinggiran Indonesia yakni wilayah perbatasan negara yang salah satunya adalah Kecamatan Sebatik Indonesia.

Kecamatan Sebatik Tengah memiliki luas wilayah 47,71 Km² yang terdiri atas empat desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah

Nama Desa	Luas Wilayah (KM²)	Persentase %
Desa Aji Kuning	6,45	13,52
Desa Sungai Limau	20,82	43,64
Desa Maspul	5,31	11,13
Desa Bukit Harapan Indah	15,13	31,71
JUMLAH	47,71 (4771 Ha)	100%

Sumber : Monografi Desa Se-Kec. Sebatik Tengah Tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.1 berkaitan dengan wilayah kecamatan sebatik tengah terlihat bahwa kecamatan sebatik tengah memiliki 4 desa yang berbeda-beda luas wilayahnya. Dalam persentasinya bahwa desa sungai limau menempati posisi yang pertama sebagai wilayah terluas dari ke-4 desa dengan luas wilayah 20,82 KM². karena daerah ini masih didominasi akan lahan-lahan pertanian yang sangat luas. Kemudian daerah yang paling kecil persentasenya adalah desa maspul hanya memiliki luas wilayah 5,31 KM².

³ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmata) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.



Sumber : Buku Laporan Tahunan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017

GAMBAR 4.1
PETA PULAU SEBATIK KEC. SEBATIK TENGAH

Jika dilihat dari batas-batas wilayah dan posisinya, Kecamatan Sebatik Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara dengan Sabah - Malaysia Timur;
- 2) Sebelah Timur dengan Sebatik Utara dan Sebatik Timur ;
- 3) Sebelah Selatan dengan Sebatik Barat; dari
- 4) Sebelah Barat dengan Sebatik Barat.

Secara topografi, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari dataran rendah serta perbukitan. Dataran rendah berada di desa Aji Kuning sedangkan perbukitan berada di desa Sungai Limau, Maspul dan Bukit Harapan.

2. Keadaan Sosio Demografi

1) Kependudukan

Penduduk Kecamatan Sebatik Tengah umumnya merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sulawesi, Jawa dan NTT yang terdiri dari suku Bugis, Jawa, dan Timor (NTT). Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari 4 (empat) desa di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yaitu, Desa Aji Kuning, Sungai Limau, Maspul, dan Bukit Harapan, bahwa sampai dengan bulan Januari 2017 jumlah penduduk tercatat sebanyak 7.260 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 152 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah menurut Desa dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Per Desa

Desa	Penduduk			Rumah Tangga (KK)	Jumlah pddk per km ²
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Aji Kuning	1.506	1.406	2.912	707	451,47
Sei Limau	1.396	1.253	2.649	703	145,95
Maspul	417	358	775	182	127,23
Bukit Harapan	590	555	1.145	258	75,67
Jumlah	3.909	3.572	7.481	1.850	156,80

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

Jumlah penduduk per desa menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Sebagaimana disajikan di atas, terlihat tingkat persebaran penduduk terlihat belum merata, yang terlihat adanya perbedaan jumlah maupun kepadatan penduduk antar desa.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Aji Kuning dan Sungai Limau yang merupakan desa dengan populasi penduduk terbesar dibanding 2 (dua) desa lainnya. Faktor penyebab adalah kedua desa tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi pintu akses menuju Tawau Malaysia. Di samping itu, kebanyakan warga yang menghuni desa tersebut adalah merupakan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang kemudian menetap dan bennukim di Desa Sungai Limau dan Aji Kuning.⁴

Tabel 4.3
Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelurahan/Desa	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	Aji Kuning	2.892	3	17	0	0	2.912
2	Sungai Limau	1.974	23	652	0	0	2.649
3	Maspul	775	0	0	0	0	775
4	Bukit Harapan	1.145	0	0	0	0	1.145
	Jumlah	6.789	26	669	0	0	7.481

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

Tabel 4.4
Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Kelurahan/Desa	Belum Kawin	Kawin	Duda	Janda	Jumlah
1	Aji Kuning	1.494	1.307	28	83	2.912
2	Sungai Limau	1.443	1.134	26	46	2.649
3	Maspul	429	323	9	14	775
4	Bukit Harapan	684	411	17	33	1.145
	Jumlah	4.050	3.157	80	176	7.481

Sumber :Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

Tabel 4.5
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Desa	Belum Sekolah	PAU D/T K	SD	SMP	SM A	DI-III	S-I	S- II	S- III	Jml
1	Aji Kuning	707	58	1.136	543	364	52	51	1	0	2.912
2	Sungai Limau	1.546	68	402	194	109	21	13	0	0	2.649
3	Maspul	144	23	698	129	74	1	2	0	0	775
4	Bukit Harapan	569	30	260	137	132	1	16	0	0	1.145

⁴ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmak) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

Jumlah	2.966	179	2.496	1.003	679	75	82	1	0	7.481
--------	-------	-----	-------	-------	-----	----	----	---	---	-------

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

Dalam data penduduk diatas, terlihat bahwa masyarakat sebatik tengah ini masih bermasalah dalam hal pendidikan. Dimana masyarakat yang belum sekolah sangat besar jumlahnya yaitu berjumlah 2.966 Jiwa. Diikuti dengan banyaknya masyarakat yang hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) yaitu 2.496 Jiwa. Sehingga berdasarkan data tersebut pendidikan sebenarnya masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, karena maju mundurnya suatu daerah, bangsa, dan negara dapat dilihat dari majunya pendidikan daerah tersebut.

Tabel 4.6
Data Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelurahan/Desa	Kelompok Umur (tahun)				Jumlah
		00-05	06-17	18-44	45 keatas	
1	Aji Kuning	323	776	1.242	571	2.912
2	Sungai Limau	284	736	1.090	539	2.649
3	Maspul	154	221	250	150	775
4	Bukit Harapan	212	318	350	265	1.145
	Jumlah	973	2.05	2.932	1.525	7.481

Sumber :Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

2) Pendidikan

Keberhasilan suatu program khususnya pendidikan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk melihat perkembangan Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid Dan Guru Per Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah

Jenis Pendidikan	Sarana	Tahun 2015			
		Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid dan Guru
PAUD Swasta	5		127	19	1 : 6,68
TK Swasta	2		63	7	1 : 9
SDN	6		757	71	1 : 10,66
SD Swasta	-		-	-	-
SLTPN	2		436	31	1 : 14,06
SMA	1		300	27	1 : 11,11
SMKN	-		-	-	-
Jumlah	16		1.683	155	1 : 10,86

Sumber : Laporan Bulanan Sekolah Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

Tabel 4.7, memberikan gambaran bahwa ratio murid berbanding guru telah cukup baik, bahkan di atas ratio SPM bidang pendidikan yaitu 1 : 20. Khusus untuk pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMA), kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya guru bidang studi. Hal tersebut disinyalir disebabkan antara lain karena pendistribusian guru yang belum merata. Selain itu, tenaga guru yang ada, pada umumnya lebih memilih untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berlokasi di ibukota Kabupaten ketimbang mengajar di daerah terpencil dan pedalaman seperti Kecamatan Sebatik Tengah.

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan harus melakukan pendistribusian ulang tenaga pendidik dan melakukan rekrutmen tenaga guru melalui formasi CPNSD agar tujuan dari pembangunan nasional khususnya di sektor pendidikan dapat tercapai. Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas dan insentif bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan.

3) Pekerjaan

Perekonomian masyarakat pulau sebatik secara umum lebih dominan pada sektor perkebunan meskipun masih ada sebagian kecil yang mengembangkan sektor pertanian. Sektor perkebunan mendominasi mata pencaharian sebagian besar masyarakat di setiap desa yang berada di pulau sebatik khususnya kecamatan sebatik tengah. Sedangkan satu-satunya desa yang masih mengembangkan sektor pertanian (sawah) adalah Desa Bukit Harapan.

Potensi sektor pertanian di desa tersebut sebenarnya masih potensial untuk ditingkatkan mengingat masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk dapat dikembangkan menjadi lahan persawahan, namun memerlukan insentif dan bantuan dari Pemerintah.

Berikut ini adalah tabel sektor ekonomi masyarakat Sebatik Tengah

Tabel 4.15
Sektor Ekonomi Masyarakat

No. Urut		No. Urut	
Pertanian		16 Ha	
Perkebunan		3.391 Ha	
Peternakan		-	
Pasar desa		5 Buah	
Koperasi desa		6 Buah	

Sumber : PPL Kec.Sebatik Tengah Tahun 2016

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa luas lahan untuk sektor perkebunan lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat lebih bertumpu pada sektor tersebut. Sektor perkebunan dimaksud meliputi komoditas sawit, kakao, dan buah-buahan (durian, rambutan, pisang dll). Sedangkan sektor pertanian meliputi komoditas padi.

Dengan bertambahnya penduduk akibat imigrasi dan kelahiran, maka kebutuhan akan lahan juga terus meningkat secara signifikan. Hal tersebut juga berdampak maraknya kegiatan alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan-lahan perkebunan yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat. Akibatnya terjadi potensi degradasi lingkungan yang merusak ekosistem hayati. Perlu ada solusi konkrit yang lebih adil untuk memecahkan persoalan ini.

4) Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam pembangunan bidang kesehatan khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah adalah melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang memadai. Peningkatan fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan tujuan agar berbagai keluhan kesehatan dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, dengan demikian diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Jenis fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah secara kuantitas masih sangat terbatas, masih perlu perhatian yang sangat serius dari pemerintahan pusat, berikut datanya sebagaimana dijabarkan pada tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4.8
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	-
Puskesmas Induk	1
Puskesmas Pembantu	3
Poskesdes	1
Puskesmas Keliling	-
Posmaldes	3
Klinik/Praktek Dokter	-
Posyandu	12
Bidan Praktek	-

Sumber : Puskesmas Aji Kuning dan PLKB Kecamatan Sebatik Tengah Periode Desember Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah masih sangat minim dan belum mampu mengakomodir dan menjawab permasalahan kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah. Faktor penyebabnya antara lain karena sarana dan prasarana pelayanan di setiap puskesmas pembantu kurang memadai sehingga masyarakat harus berobat ke puskesmas induk meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi jalan yang buruk dan sarana transportasi yang terbatas.

Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan tak sedikit masyarakat perbatasan yang kemudian pergi ke negara tetangga hanya untuk berobat, karena menilai bahwa fasilitas kesehatan yang berada di perbatasan masih belum memadai. Berikut datanya untuk mengetahui Jumlah tenaga kesehatan yang ada sebagaimana dirincikan pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah

No	Kualifikasi Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS	CPNS	THL	DTP K	
1	Dokter Umum	1	1	-	-	2
2	Dokter Gigi	1	-	-	-	1
3	Apoteker	1	-	-	-	1
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	-	1	-	3
5	Sarjana Keperawatan	-	-	2	-	2

6	Akademi Kebidanan	2	1	8	-	11
7	Akademi Keperawatan	4	-	9	-	13
8	Akademi Gizi	1	-	-	-	1
9	Akademi Kesling	1	-	-	-	1
10	Bidan (DI)	1	-	-	-	1
11	Perawat (SPK)	3	-	-	-	3
12	Perawat Gigi	1	-	-	-	1
13	Analisis Kesehatan	-	1	-	-	1
14	Administrasi Loket	-	-	2	-	2

Sumber : Puskesmas Aji Kuning dan PLKB Kecamatan Sebatik Tengah Periode Desember Tahun 2016

Dari data di atas jelas tergambar bahwa jumlah tenaga kesehatan masih sangat minim. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah, maka kebutuhan minimal untuk Puskesmas di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan minimal sebanyak 17 orang, dengan rincian : 12 tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedic) dan 5 orang tenaga non-kesehatan (termasuk tenaga administrasi). Sedangkan kebutuhan minimal untuk Puskesmas Pembantu II/Polindes adalah 2 orang, dengan rincian masing-masing 1 tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.

Kekurangan dan keterbatasan tersebut, berdampak pada pelayanan kesehatan yang kurang optimal sehingga terdapat kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengobatan secara tradisional dengan bantuan Dukun yang ada di Desa mereka. Bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya lebih baik, bahkan memilih untuk berobat di Tawau Malaysia. Penambahan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan baik kualitas dan kuantitasnya masih merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah tni.

5) Sarana Peribadatan

Mayoritas masyarakat Sebatik Tengah memeluk agama Islam, namun sebagian memeluk agama Kristen terutama warga masyarakat yang bermukim di daerah Lourdes Desa Sei. Limau. Untuk menjalankan aktivitas keagamaan warga masyarakat menggunakan sarana peribadatan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10
Sarana Peribadatan di Kecamatan Sebatik Tengah

Desa	Rumah Ibadah	
	Masjid	Gereja
Aji Kuning	4	-
Sei Limau	7	1
Maspul	2	-
Bukit Harapan	5	-
Jumlah	18	1

Sumber : Kasi Sosek dan Kesra Kecamatan Sebatik Tengah Periode Desember 2016

3. Gambaran Umum Pemerintahan Sebatik

a) Aparatur Desa Kecamatan Sebatik

Pada awal masa pemerintahan, Pulau Sebatik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupaten Bulungan. Pada tahun 1999 terjadi pemekaran Kabupaten Bulungan sehingga terbentuklah Kabupaten Nunukan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Wilayah administrasi Kabupaten Nunukan pada awal pembentukannya meliputi wilayah Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Krayan.

Pemerintahan pertama kali di Pulau Sebatik adalah berbentuk desa dengan dua desa induk yaitu : Desa Setabu dan Desa Sungai Pancang yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bulungan, kemudian statusnya berubah dari desa menjadi kecamatan pada tahun 1997. Pada tahun 1999 Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan sebagai daerah otonomi yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, telah beberapa kali melakukan pemekaran wilayah kecamatan. Khusus Kecamatan Sebatik, telah 2 (dua) kali dimekarkan, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 03 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 25 tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, sampai

dengan akhir tahun 2011, jumlah keseluruhan wilayah kecamatan di Sebatik adalah sebanyak 5 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Sebatik dengan ibukota Tanjung Karang
- 2) Kecamatan Sebatik Barat dengan ibukota Binalawan
- 3) Kecamatan Sebatik Timur dengan ibukota Sei Nyamuk
- 4) Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota Sei Pancang
- 5) Kecamatan Sebatik Tengah dengan ibukota Aji Kuning

Khusus wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, secara administratif meliputi 4 (empat) desa, yaitu : Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan Indah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Pemerintahan Desa

Desa	RT	Dusun	Ketua Adat	Kantor Desa	Balai Desa/ Pertemuan	Aparatur Desa	BPD
Aji Kuning	13	2	-	1	1	10	5
Sei Limau	14	2	-	1	1	10	5
Maspul	6	2	-	1	1	12	5
Bukit Harapan	7	2	-	1	1	9	5
Jumlah	40	8	-	4	4	41	20

Sumber : Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Tahun 2016

b) Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah

Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, maka perlu ditunjang oleh aparatur kecamatan yang memadai. Secara kuantitas, aparatur Kecamatan Sebatik Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13

Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah Berdasarkan Eselon dan Golongan

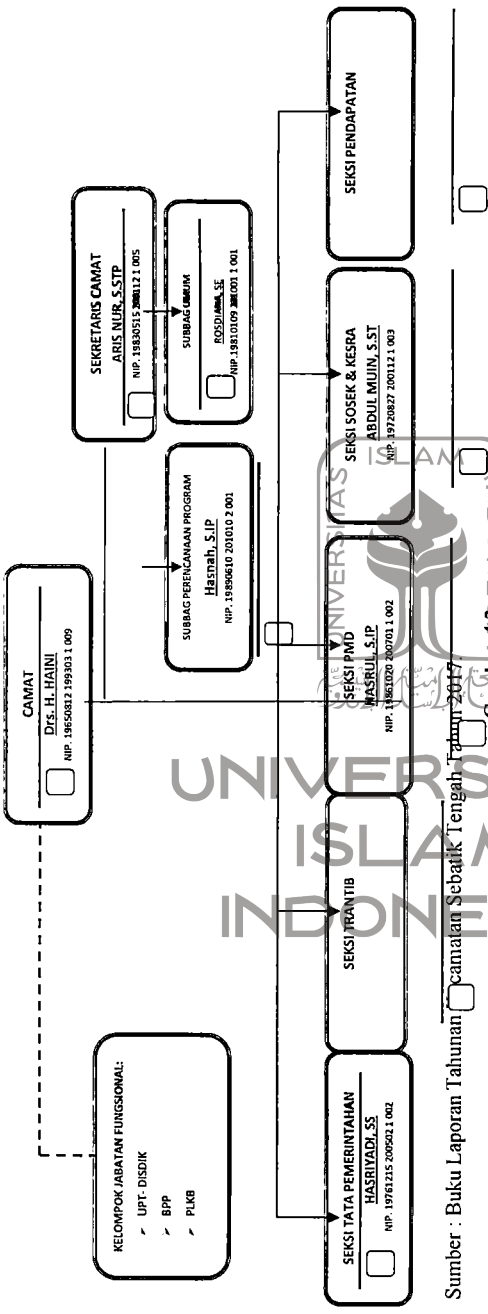
NO	Eselon/ Gol.	Jumlah	Jabatan
1.	III/a	1	Camat
2.	III/b	1	Sekcam
3.	IV/a	3	Kasi
4.	IV/b	3	Kasubbag
5.	Gol. III/a	-	Pelaksana
6.	Gol. II/c	-	Pelaksana
7.	Gol. II/b	3	Pelaksana
8.	Gol. II/a	-	Pelaksana
9.	Gol I/c	1	Pelaksana
10.	Honorer	12	Staf
Total		23	

Sumber : Kasubbag Umum Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

Tabel 4.13 memberikan gambaran bahwa sampai dengan bulan Desember 2016 jumlah aparatur kecamatan masih sangat minim dan belum seimbang dengan jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini, Kecamatan Sebatik masih kekurangan aparatur PNS maupun non-PNS, baik yang menduduki jabatan struktural maupun memegang tanggungjawab sebagai fungsional umum, sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung jawab tidak dapat dihindari. Kecamatan Sebatik Tengah masih membutuhkan aparatur PNS baik jumlah dan kualifikasi tertentu yang dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara maksimal.

Tata kelola pemerintahan di desa juga masih menghadapi beberapa masalah. Desa-desanya yang ada di lingkungan wilayah administrasi Kecamatan Sebatik Tengah misalnya masih menghadapi kendala keterbatasan kualitas sumber daya aparatur. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi guna dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Sebatik Tengah juga masih berhadapan dengan keterbatasan sarana dan prasarana aparatur. Sebagai contoh, saat ini, para PNS yang ditugaskan di Kecamatan umumnya masih menumpang di rumah kontrakan. Lokasi tempat tinggal mereka pun pada umumnya berlokasi jauh dari Kantor Kecamatan. Hal tersebut berdampak pada waktu dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh PNS untuk sampai ke tempat kerja. Selain itu, resiko yang mereka hadapi untuk sampai ke tempat tugas juga besar mengingat aksesibilitas jalan menuju kantor juga relatif buruk. Kecamatan Sebatik Tengah masih memerlukan prasarana rumah dinas untuk pejabat dan staf mengingat lokasi dan lahan yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Sebatik Tengah juga masih minim.



Sumber : Buku Laporan Tahunan Kecamatan Sebatik Tengah, Tahun 2017

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEBATIK TENGAH TAHUN 2017

c) **Instansi Pemerintah Lainnya**

Di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah terdapat beberapa instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan tertentu. Instansi maupun unit kerja dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Instansi Pemerintah Lainnya

Instansi	Jumlah Instansi	Jumlah Aparatur	Bidang Urusan
POLSEK	-	-	Keamanan
KORAMIL	-	-	Pertahanan
SATGAS MARINIR	-	-	Pertahanan
SATGAS PAMTAS	1	-	Pertahanan
POS PAMTAS	1	-	Pertahanan
KUA	-	-	Agama
POS IMIGRASI	-	-	Hukum
BEA CUKAI	-	-	Hukum
POS POLISI	1	3	Keamanan
PUSKESMAS	1	39	Kesehatan
UPTD PENDIDIKAN	-	-	Pendidikan
UPT DISHUB	-	-	Perhubungan
UPT PENYULUH	-	-	Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah
PETUGAS BABINSA	-	4	Kemanan
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	-	4	Penyuluh Lapangan
PENYULUH KELUARGA BERENCANA	-	2	Keluarga Berencana (KB)

Sumber : diolah dari berbagai sumber

d) **Aparatur Kabupaten Nunukan**

Pulau sebatik secara administratif berada dalam kawasan pemerintahan kabupaten Nunukan. Sesuai peraturan daerah kabupaten Nunukan No 23 Tahun 2011⁵, telah disepakati akan dibentuknya suatu lembaga khusus yang mengatur permasalahan perbatasan-perbatasan negara yang berada di kawasan Nunukan.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut dengan BPPD kabupaten Nunukan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan pengelolaan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Kemudian kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut kepala BPPD adalah kepala BPPD kabupaten Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai Negeri Sipil atas Usul Sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, pada tahun 2016 Badan Pengelola Perbatasan ini tidak lagi berbentuk badan yang mempunyai wewenang dan tugas yang luas, akan tetapi berubah bentuk menjadi bagian saja yang disebut dengan Subbagian Batas Negara Dan Kerjasama.⁷

B. Hasil Penelitian:

1) **Profil Perkonomian Masyarakat Pulau Sebatik Tengah**

(a) **Potensi – Potensi Ekonomi Daerah Perbatasan**

(1) **Potensi pertanian**

Kecamatan Sebatik Tengah dikenal sebagai salah satu kawasan perkebunan di pulau Sebatik. Sekitar 73% (3494 Ha) dari luas wilayah Kecamatan Sebatik Tengah adalah merupakan kawasan perkebunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh

⁵ Peraturan Daerah Kab.Nunukan, No 23 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.

⁶ Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.K.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan Dan Kerjasama di kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum'at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.

⁷ Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.K.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan Dan Kerjasama di Kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum'at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2015), perkebunan yang paling menonjol di Kecamatan Sebatik Tengah adalah : perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao dan perkebunan pisang.⁸

Satu-satunya desa yang masih mengembangkan sector pertanian (sawah) adalah Desa Bukit Harapan. Sector pertanian di desa tersebut sebenarnya masih potensial untuk ditingkatkan mengingat masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk dapat dikembangkan menjadi lahan persawahan, namun memerlukan insentif dan bantuan dari Pemerintah.

Selain itu, di Kecamatan Sebatik Tengah juga berkembang perkebunan buah-buahan seperti durian, buah naga, rambutan, salak, langsung dan duku. Hampir semua hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah ini dipasarkan di Tawau Sabah Malaysia melalui pihak kedua (tengkalak).

(2) Potensi pariwisata

1) Wisata Perbatasan

Wisata perbatasan yang paling terkenal adalah wisata perbatasan di patok 3 Desa Aji Kuning. Patok 3 adalah salah satu patok yang posisinya masih diperdebatkan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di pulau Sebatik (*Outstanding Boundary Problems*).

Terdapat juga potensi wisata perbatasan lainnya seperti lapangan olahraga yang terdapat di Desa Sungai Limau yang berdekatan dengan patok 7. Di lapangan yang sebagian “masuk” dalam wilayah Malaysia tersebut, berbagai aktifitas kegiatan masyarakat seperti perlombaan olah raga, atraksi kesenian, perkemahan pramuka maupun kegiatan keramaian lainnya rutin digelar. Tidak jarang kegiatan keramaian tersebut melibatkan penduduk Malaysia yang bermukim di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau Sebatik.

⁸ Buku Laporan Tahunan Pemerintah Kecamatan sebatik Tengah Tahun 2017.

Kecamatan Sebatik Tengah juga dikenal dengan lembaga pendidikan yang memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI). Salah satu lembaga pendidikan yang terkenal dan pernah diangkat dalam salah satu lomba film dokumenter di salah satu stasiun TV swasta adalah Sekolah Tapal Batas. Lembaga Pendidikan Swasta ini, selain memfasilitasi pendidikan bagi anak BMI juga menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan, pendidikan, sosial dan da'wah bagi masyarakat perbatasan sekitar maupun bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah Sebatik Malaysia.

2) Wisata Agro

Wisata agro ini dapat dikembangkan di tiga desa yakni Desa Maspul, Desa Sungai Limau dan Desa Bukit Harapan. Pada saat musim durian, masyarakat pencinta buah durian dari berbagai wilayah di Kabupaten Nunukan membanjiri desa-desa tersebut untuk menikmati durian dengan berbagai varietas tersebut. Selain buah durian, wilayah ini juga dikenal dengan buah dukunya. Belakangan ini, masyarakat juga mengembangkan budidaya buah naga.

3) Wisata Religi

Bagi penganut agama Kristen Katolik, Gua Bunda Maria yang dibangun di Kampung Lodres Desa Sungai Limau juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi Wisata Religi. Gua yang dibangun berdampingan dengan salah satu gereja katolik terbesar di pulau Sebatik tersebut diresmikan oleh Bupati Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2014..

Kampung Loudres adalah salah satu lokasi perkampungan yang terdapat di Dusun Berjoko Desa Sungai Limau. Kampung yang berada di ketinggian tersebut dihuni

oleh mayoritas warga yang berasal dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dari kampung tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan Kota Tawau Sabah Malaysia dari kejauhan.

4) Wisata Budaya

Wisata Budaya juga memiliki potensi untuk dikembangkan di Kecamatan Sebatik Tengah. Sebagaimana diketahui, bahwa pulau Sebatik secara umum dan Sebatik Tengah secara khusus dihuni oleh berbagai suku dan etnis. Suku dan etnis tersebut hidup harmonis antara satu sama lain dengan tetap berupaya melestarikan budaya daerahnya masing-masing. Salah satu atraksi budaya yang masih dapat dinikmati di wilayah ini adalah tradisi Tudang Sipulung yang rutin digelar tiap tahunnya oleh warga asal Massenreng Pulu, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini biasanya digelar antar bulan Maret-April setiap tahunnya di rumah adat Massenrengpulu yang berlokasi di Desa Maspul. Dalam kegiatan ini digelar acara syukuran dan sekaligus selamatan yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan bersimpul sambil menikmati atraksi kesenian yang ditampilkan oleh kelompok kesenian yang ada.

Selain itu, pelestarian kesenian daerah juga gencar dilakukan baik oleh paguyuban-paguyuban berbasis etnis maupun di lingkungan lembaga pendidikan yang ada. Para siswa kelas di berbagai jenjang pendidikan sangat lihai memainkan berbagai jenis tari dan seni lainnya. Hal tersebut dapat disaksikan pada acara-acara keramaian yang digelar oleh Pemerintah maupun masyarakat setempat.

Secara umum, berikut objek wisata yang dimiliki pulau sebatik kecamatan sebatik tengah berdasarkan jenis wisatanya :

Tabel 4.16
Objek Wisata Menurut Jenis Di Kecamatan Sebatik
Tengah Tahun 2013-2015

OBJEK WISATA	2013	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(5)
Alam	-	-	-
Buatan	3	3	3
Jumlah	3	3	3

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah

Keterangan Objek Wisata Buatan :

- (1) Patok 3 Aji Kuning
- (2) Goa Bunda Maria Sei Limau
- (3) Rumah Adat MasserengPulu

(3) Potensi Industri Pengolahan

Saat ini, masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah telah mulai mengembangkan berbagai jenis makanan olahan berbasis komoditas bahan baku lokal. Program *"one village one product"* yang dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan telah berhasil mendorong munculnya berbagai jenis produk turunan dari berbagai jenis buah dan pisang yang memang dengan mudah dapat ditemukan di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia tersebut. Di tingkat desa, motor penggerak dari produk-produk turunan tersebut adalah TP. PKK Desa dengan UP2K-nya masing-masing. Di tingkat kecamatan, TP. PKK Desa ini dikoordinasikan oleh TP. PKK Kecamatan.

Melihat potensi dan posisi geografis daerah, maka Kecamatan Sebatik Tengah juga memiliki potensi untuk dibangun industri pengolahan. Selain berbatasan langsung dengan Malaysia, komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah yang dikembangkan masyarakat dapat menjadi bahan baku bagi industri pengolahan maupun kerajinan di wilayah tersebut. Industri pengolahan yang dapat dikembangkan antara lain⁹ :

⁹ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmata) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

- 1) Pengolahan bahan makanan berbahan baku pisang.
- 2) Pengolahan produk turunan komoditas pertanian lainnya.
- 3) Pengembangan industri kerajinan tangan Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.

(b) Infrastruktur, Sarana, Dan Prasarana

Pembangunan infrastruktur berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar di Sebatik Tengah terus dikembangkan dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana masih membutuhkan investasi yang cukup besar meliputi bidang energi listrik, jalan, air bersih, dan jaringan telekomunikasi.¹⁰

1) Jalan

Kondisi jalan di Sebatik Tengah pada umumnya termasuk klasifikasi jalan agregat, jalan tanah dan sebagian jalan tanah khususnya jalan usaha tani. Beberapa ruas jalan terutama penghubung antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul, dan Desa Sungai Limau telah diaspal dengan panjang $\pm$ 16 km.

Jalan agregat dan jalan tanah di setiap desa saat ini masih dalam tahap peningkatan dan merupakan salah satu akses yang cukup vital bagi masyarakat untuk mengangkut dan memasarkan hasil perkebunannya ke daerah lain. Sedangkan ruas jalan dari Desa Aji Kuning Sebatik Tengah menuju Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat merupakan jalan aspal. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif yang dapat mempersingkat waktu tempuh dari Aji Kuning ke Desa Bambang menuju Nunukan. Data sarana jalan berdasarkan kondisi dan status seperti disajikan pada table 4.1 dibawah ini :

¹⁰ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekimat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

Tabel 4.17
Sarana Jalan

Desa	Berdasarkan kondisi (km ²)			Berdasarkan status (km ²)			
	Beraspal	Belum beraspal	Jembatan	Nasional	Propinsi	Kab/kota	Desa
Aji Kuning	4	15	25	-	4	5	10
Maspul	1,5	17	5	-	1,5	2	15
Sei Limau	10,5	20	23	-	10,5	2,5	17,5
Bukit Harapan	-	18	17	-	-	7	11
Jumlah	16	70	70	-	16	16,5	53,5

Sumber : Monografi Desa Se-Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016

2) Listrik

Pembangunan sarana dan prasarana listrik yang sangat minim telah berdampak pada suplai listrik ke setiap desa yang tidak merata, bahkan dari 4 (empat) desa yang berada di wilayah Sebatik Tengah, hanya mampu memberikan pasokan listrik ke salah satu desa yaitu Desa Aji Kuning. Untuk memenuhi kebutuhan listrik warga, sumber listrik yang dipergunakan masyarakat saat ini mengandalkan PLTD non PLN bantuan TNI dan PLTD Program PNPM, serta lampu SEHEN (Super Ekstra Hemat Energi) yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan PT.PLN. Namun pada tahun 2015, pihak PLN memasang tiang listrik ke beberapa Desa yakni Desa Maspul dan Desa Sei Limau, pada tahun 2016 sudah ada pemasangan kilometer dan masih ada menunggu ijin pemasangan kilometer dari PLN Cabang Berau dan PLN Pusat.¹¹

Faktor penyebab minimnya pasokan listrik ke masyarakat adalah kapasitas megawatt PLN yang masih sangat rendah berbanding kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perekonomian masyarakat, sehingga belum mampu mengakomodir setiap pengajuan penyambungan

¹¹ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmak) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

pelanggan. Disamping itu, pemadaman listrik secara bergilir merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di wilayah ini.

Hal ini kontras sekali dengan pemandangan dan kondisi wilayah Sebatik yang menjadi bagian Malaysia di mana aliran listrik dengan kapasitas yang lebih dari cukup telah menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa dan perkebunan di daerah tersebut meskipun jumlah penduduknya sangat minim.

Salah satu alternatif yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Sebatik Tengah saat ini adalah dengan mengembangkan dan memberikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kepada masyarakat walaupun dengan jumlah yang terbatas. Untuk masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan bantuan fasilitas listrik, mengatasinya dengan menggunakan mesin diesel untuk memenuhi kebutuhan listriknya dan hanya dinyalakan pada malam hari. Penggunaan PLTS saat ini terdapat di Desa Bukit Harapan dengan sistem prabayar.

3) Air Bersih

Fasilitas air bersih terutama PDAM saat ini belum berfungsi secara maksimal. Hingga saat ini, suplai air bersih masih mengandalkan air hujan yang ditampung dari tandon air dan sumur atau bak air yang dibuat secara swadaya serta bantuan pembangunan bak penampungan air melalui dana CSR PT. Jamsostek. Permasalahan yang muncul ketika terjadi kemarau berkepanjangan, air bersih menjadi barang langka di Kecamatan Sebatik Tengah. Sebagian warga khususnya yang berada di Desa Aji Kuning dan Sungai Limau, bahkan memenuhi kebutuhan air bersih dari negara tetangga Malaysia.¹²

4) Telekomunikasi dan Perbankan

¹² Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmata) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

Jaringan telekomunikasi terutama dari Telkom saat ini belum tersedia di wilayah ini Khusus untuk jaringan telekomunikasi nir-kabel, sejauh ini telah terdapat beberapa operator telekomunikasi seluler yang melayani wilayah ini yaitu Telkomsel, XL, dan Indosat. Pada Tahun 2015, telah dibangun beberapa Tower Telkomsel untuk wilayah Desa Maspul dan Sei. Limau sedangkan Desa Bukit Harapan belum memiliki fasilitas jaringan selular.

Adapun sektor jasa perbankan saat ini hanya tersedia di wilayah Desa Aji Kuning yang sudah beroperasi yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim. BRI juga menyediakan fasilitas ATM Permanen dan Mobil-ATM yang sudah beroperasi sedangkan BNI menyediakan fasilitas ATM permanen.

5) Aksesibilitas

Sarana transportasi yang tersedia untuk melayani mobilitas orang dan barang di Pulau Sebatik mencakup Darat dan Laut saja. Untuk pelayanan udara tidak tersedia, hal ini disebabkan karena sarana bandara yang belum tersedia di pulau sebatik ini. Sehingga menjadikan jalur darat dan laut menjadi jalur transportasi favorit masyarakat sebatik.

Akses ke dan dari Sebatik Tengah ke kecamatan lainnya di Pulau Sebatik dilakukan dengan transportasi darat baik roda 2 maupun roda 4. Sedangkan akses ke Ibu Kota Kabupaten Nunukan menggunakan perahu bermotor atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Dompok dengan waktu tempuh ± 35 menit.

Namun sebelum menggunakan transportasi air, terlebih dahulu menggunakan jalur darat dengan rute alternatif yaitu : jalur selatan melalui Bambang (Sebatik Barat) dan jalur timur melalui rute 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, Sebatik (Induk) dan Sebatik Barat. Sedangkan akses ke Tawau Malaysia dengan menggunakan transportasi laut dengan

jarak tempuh sekitar ± 15 menit dengan menggunakan perahu penyeberangan atau *speed boat*.

Majunya jalur transportasi suatu daerah makan akan dapat memberikan sumbangsih besar terhadap majunya perekonomian daerah tersebut. Karena dengan mudahnya jalur transportasi maka memudahkan masuknya barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga perekonomian dapat terpenuhi.

Secara umum, layanan transportasi darat di kabupaten nunukan didukung oleh ketersediaan jalan raya sepanjang 1.111,98 km sampai dengan tahun 2015.¹³ Namun demikian, hanya sebagian kecil (39%) dari jalan raya yang sudah diaspal. Sementara itu, sebanyak 61 % berupa jalan yang tidak diaspal, yang terdiri dari jalan krikil dan jalan tanah. Dengan kondisi tersebut dapat diperkirakan kesulitan transportasi darat yang kemungkinan dihadapi penduduk terutama pada musim hujan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi mobilitas barang yang menunjang aktivitas ekonomi.

6) Hotel

Salah satu yang menunjang investor masuk adalah dengan tersedianya sarana penginapan, hotel. Akan tetapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 2016 menunjukkan bahwa hotel maupun penginapan tidak tersedia di Pulau Sebatik.

Tabel 4.18
Junlah Hotel/Penginapan, Kamar, Dan Tempat Tidur Yang Tersedia Menurut Desa/Kelurahan 2013-2015

Desa/Kelurahan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Hotel	-	-	-
Penginapan	-	-	-
Kamar	-	-	-
Tempat Tidur	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 2016

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 2016, Hlm 257.

Padahal dengan ketidak hadirnya hotel sebagai sarana penunjang ekonomi suatu daerah, maka sangat berpengaruh terhadap masuknya pengusaha ataupun investor untuk mengelola kawasan perbatasan ini.

(c) Transaksi Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Adapun yang menjadi perhatian penulis dalam hal transaksi ekonomi meliputi 2 hal, yaitu perdagangan dan mata uang yang digunakan. Pulau sebatik memiliki karakteristik tersendiri berkaitan perdagangan dan mata uang tersebut, dimana alur perdagangan mayoritas dimulai dari masuknya barang-barang yang berasal dari Malaysia. Hal ini disebabkan biaya operasional yang lebih tinggi apabila barang-barang kebutuhan masyarakat yang didatangkan dari Indonesia. Barang-barang yang umumnya dikirim ke pulau sebatik berasal dari wilayah tarakan yang jarak tempuhnya sekitar 2-4 jam melalui jalur laut, dan berbeda apabila barang tersebut berasal dari Malaysia yang hanya menempuh jaraknya hanya sekitar 15-30 menit saja.

Kedadaan Georafis yang jauh dari ibu kota dan kota-kota besar, menyebabkan masyarakat perbatasan memiliki keunikan tersendiri dalam transaksi ekonominya. Keunikan dalam aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat perbatasan berbeda dengan masyarakat lain.

Secara umum, dari segi pekerjaan masyarakat perbatasan tidak jauh dari pertanian dan perkebunan, hal tersebut didukung dengan lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dimiliki oleh pulau Sebatik tersebut. Hal yang berbeda kemudian adalah ketika hasil perkebunan, maupun hasil dari pertanian tersebut dijual dan dipasarkan ke pangsa pasar Malaysia khususnya sebatik Malaysia dan Tawau Malaysia.

Tawau Malaysia menjadi target pasar terbesar masyarakat sebatik yang tinggal di perbatasan ini. Hal tersebut mengakibatkan harga sangat dipengaruhi atas permintaan masyarakat Malaysia. Di

sisi lain, dengan adanya transaksi ekonomi yang berbeda ini, maka penggunaan uang ringgit Malaysia pun tidak dapat dielakkan lagi.

Beredarnya uang Malaysia di pulau sebatik ini disebabkan banyak beredarnya kebutuhan Malaysia yang berada di pulau sebatik, sehingga menyebabkan harga barang tersebut mempengaruhi penggunaan ringgit, karena pengusaha akan lebih memilih menggunakan ringgit dibandingkan rupiah Indonesia.

Kemudian ketika dilihat dari sisi ketersediaan sarana untuk memasarkan barang-barang baik produk Indonesia Maupun barang yang berasal dari Malaysia dapat dilihat dari data berikut dibawah ini.

Tabel 4.19
Jumlah Sarana Perdagangan Dan Koperasi Di Kecamatan
Sebatik Tengah 2013-2015

Sarana Perdagangan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Toko/Warung/Kios	80	85	85
Pasar Tradisional	3	3	3
Pasar Lokal	1	1	1
Supermarket/Swalayan/Toserba	-	-	-
Restoran/Rumah Makan	3	3	3
Koperasi Unit Dsa	5	5	5
KPR	-	-	-
KOPKAR	-	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Sebatik Tengah

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir hampir tidak ada perubahan dari segi jumlahnya, bahkan supermarket dan swalayan tidak ditemukan di dalam kecamatan ini. Warung atau kios masyarakat menjadi sarana yang paling diminati oleh masyarakat sebatik khususnya masyarakat kecamatan sebatik tengah.

Keterbatasannya sarana penyedia barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat perbatasan tersebut juga menjadi masalah yang harus segera diperbaiki agar kedepannya kondisi perekonomian kawasan perbatasan dapat mandiri dan maju kedepannya.

2) Peran Pemerintah Indonesia Dalam Perekonomian Masyarakat Perbatasan Indonesia Malaysia Di Pulau Sebatik.

Dalam mengelola perbatasan Indonesia, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kondisi masyarakat perbatasan dari berbagai sektor, baik dari aspek keamanan, maupun aspek ekonomi. Secara eksplisit dan implisit berbagai produk hukum telah lahir untuk mengawal perbatasan Indonesia-Malaysia. Semua produk hukum tersebut menggarisbawahi tekad pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai proiritas utama pembangunan nasional dengan mengakomodasi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan.¹⁴

Diantara kebijakan Pemerintah yang dilakukan dalam rangka memelihara serta mengembangkan kawasan perbatasan, diantaranya:

a) Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Pulau sebatik dengan segala keunikan dan keterbatasannya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah lokal. Berdasarkan penuturan sekretaris camat bahwa perhatian pemerintah pusat untuk kepulauan sebatik terbilang cukup besar, apabila dibandingkan dengan perhatian kawasan perbatasan-perbatasan yang lainnya.¹⁵

Paradigma yang berkembang bahwa perhatian pemerintah kurang dan menyebabkan sebatik menjadi daerah tertinggal dibantah oleh pemerintah kecamatan. Menurut pemerintah kecamatan perhatian pemerintah pusat kepada kawasan perbatasan sudah cukup besar, akan tetapi paradigma yang berkembang adalah membandingkan pulau

¹⁴ Lihat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, "Paradigma Pengelolaan Perbatasan Negara" Presentasi *Power Point* disampaikan di DPD RI, Jakarta, 17 Juni 2013, hlm 3. Lihat Juga Bappenas RI, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Buku Pertama, Prinsip Dasar Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan*, Jakarta, 2005, hlm 2.

¹⁵ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA

sebatik dengan tawau Malaysia, yang memang harus di akui masih jauh tertinggal.¹⁶

Mulai dari terbentuknya badan atau institusi khusus pengelola perbatasan yang bertanggungjawab langsung terhadap persoalan di wilayah perbatasan dengan melibatkan berbagai kalangan di pusat maupun daerah. Lembaga yang biasa di sebut dengan Badan nasional pengelola perbatasan (BNPP), yang kemudian membuka kantor perwakilan yang ditempatkan di kabupaten Nunukan yang disebut dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Hal tersebut tertuang dalam peraturan presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Yang kemudian diikuti berkaitan dengan berbagai macam revisi peraturan presiden Republik Indonesia no 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan presiden No 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Berkaitan tentang keseriusan pemerintah terhadap perbatasan, Hal serupa juga disampaikan Gubernur Kalimantan utara, Dr. H. Irianto Lambrie yang mengatakan bahwa perhatian pemerintah pusat untuk provinsi baru ini sangat besar dan itu harus disyukuri, dimana pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk alokasi anggaran ke Kaltara, tahun 2018 nanti kaltara akan mendapatkan alokasi dana Rp.3,1 Triliun Lebih untuk pembangunan Perbatasan, kemudian dari sektor perhubungan mendapatkan alokasi sebesar Rp.1 Triliun untuk pengembangan bandara dan pelabuhan.¹⁷

Berkaitan dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Nunukan memiliki 3 program unggulan¹⁸, Yaitu:

¹⁶ Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.K.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan Dan Kerjasama di kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum'at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.

¹⁷ Web Resmi Pemprov Kaltara, *Irianto harap BI Dukung Kemajuan Ekonomi Kaltara*, yangdiikutihttps://www.kaltaraprov.go.id/newsview/2499/irianto.harap.bi.dukung.kemajuan.ekonomi.kaltara.html , diakses pada hari senin, 31 July 2017, pukul 12.43 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.K.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan Dan Kerjasama di kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum'at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.

1) Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

Program ini hanya bersifat kordinasi saja, tanpa bisa menyentuh program fisik, hal ini berkaitan terbatasnya gerak BNPP karena hanya menjadi sebagai bagian.

2) Pelatihan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kawasan Perbatasan.

Program ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada masyarakat perbatasan agar dapat berdikari dan berjiwa mandiri. Adapun program yang pernah dilakukan berkaitan dengan pelatihan yaitu pelatihan pengelolaan kelapa menggunakan mesin.

3) Fasilitasi dan Kerjasama Investaris Patok Batas Negara

Salah satu tugas dari BPPD ini adalah memfasilitasi pemerintah pusat yang datang dari Jakarta untuk melihat situasi yang ada di kawasan Perbatasan. Sehingga BPPD yang kemudian bertugas sebagai protokol daerah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pemerintah selama di perbatasan.

b) Pemekaran Kecamatan Sebatik Tengah

Dari segi kecamatan, pada tahun 2011 pulau Sebatik kembali dimekarkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang ditandai dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Pemekaran menjadi beberapa kecamatan tersebut dimaksudkan untuk membangun pulau sebatik menjadi salah satu wilayah perbatasan yang maju, agar dapat mengimbangi pembangunan kota tawau sabah Malaysia.

Dan salah satu kecamatan yang paling rawan akan permasalahan adalah kecamatan sebatik tengah, hal ini disebabkan karena kecamatan sebatik tengah merupakan kecamatan terpanjang yang berbatasan langsung dengan malaysia juga terlihat serius dalam mengelola perbatasan terlepas dari banyaknya kekurangan. hal tersebut terlihat dari Visi, Misi dan beberapa programnya.

1) Visi Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan adalah: *"Mewujudkan Kecamatan Sebatik Tengah Sebagai Role Model Tata Kelola Kecamatan Perbatasan Di Kabupaten Nunukan"*.

Dengan MOTTO *"ada untuk melayani"*. Arti Motto tersebut adalah Memahami kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, netral dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan¹⁹.

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Sebatik Tengah lebih baik dan lebih profesional dalam penyediaan pelayanan publik di banding kecamatan maupun satuan atau unit kerja lain yang berada di perbatasan sesuai dengan tuntutan global, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan akan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat guna mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju dengan dukungan masyarakat yang agamis dan harmonis serta aparatur yang berkualitas, jujur, dan bertanggung jawab.

2) Misi Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah beberapa misi sebagai berikut :

- a) Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang baik dan bersih.

¹⁹ Buku Laporan Tahunan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017.

- b) Terwujudnya koordinasi penanganan masalah sosial, ekonomi dan ketentraman dan ketertiban yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa tujuan dari penetapan misi di atas yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang responsif dan partisipatif.
- b) Terciptanya penanganan masalah sosial yang terkoordinasi.
- c) Terciptanya koordinasi penanganan trantib yang baik.
- d) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna merealisasikan tujuan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan umum.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat.
- c) Terlaksananya pengelolaan administrasi kesekretariatan yang baik.
- d) Meningkatkan jumlah desa yang berkembang dan mandiri.
- e) Meningkatkan koordinasi penanganan masalah PMKS.
- f) Menurunnya angka gangguan trantib.
- g) Meningkatnya UMKM.²⁰

B. Analisis Hasil Penelitian

1) Profil Perekonomian Masyarakat Muslim Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik

Setelah melakukan rangkaian penelitian dan memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, peneliti berupaya memaparkan hasil analisa dengan mendasarkan pada kerangka teori yang penulis lampirkan dalam pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti setelah beberapa hari melakukan penelitian di pulau sebatik terkait dengan profil masyarakat pulau sebatik, khususnya kecamatan sebatik tengah. Pulau sebatik adalah pulau dua negara Indonesia dan Malaysia, kondisi tersebut menyebabkan pulau ini

²⁰ Buku Laporan Tahunan Sebatik Tengah Tahun 2017.

selalu dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, baik dari segi infrastruktur maupun aktivitas ekonominya.

Perlu diakui bahwa letak pulau sebatik yang menjadi pulau terluar Indonesia berimbas kepada pengkategorikan sebagai “kelompok pingiran” dari negara Indonesia yang penuh dengan keterbatasan. Hal tersebut menyebabkan tertinggalnya pulau sebatik ini dari berbagai aspek, khususnya pembangunan infrastruktur, ekonomi, apabila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Hairul Saleh, yang mengatakan bahwa pulau sebatik ibarat anak tiri yang terlupakan walaupun sering mendapat kunjungan dari pejabat negeri.²¹

Dari segi Mata Pencarian, Mayoritas Masyarakat sebatik khususnya kecamatan sebatik tengah mayoritas berprofesi sebagai Petani yang hanya menghandalkan hasil perkebunan. Karena memang didukung dengan faktor lahan yang luas. Namun, Menariknya adalah hampir seluruh hasil komoditas pertanian masyarakat sebatik dijual atau dipasarkan di daerah Tawau - Malaysia. Hal tersebut berpengaruh kepada penyesuaian permintaan pasar di tawau Malaysia dengan harga yang sepenuhnya dikendalikan oleh pasar. barang hasil kebun sebatik dijual ke-Malaysia dalam bentuk mentah seperti komoditas pisang dan kelapa sawit dan kemudian barang dari Tawau Malaysia dijual kesebatik dalam bentuk barang jadi seperti Minyak dan gula, hal ini disebabkan karena keterbatasan pasar dalam Negeri yang disediakan oleh Negara.²²

Kemudian selain berprofesi sebagai petani, sebagian masyarakat sebatik juga bekerja di Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Satu hal yang cukup memotivasi Masyarakat sebatik untuk ke Malaysia adalah Pendapatan yang memang cukup tinggi di Negeri Jiran itu

²¹ Muhammad Hairul Saleh, *Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)*, Jurnal Borneo Administrator, Volume 11, No. 1 Tahun 2015. Hlm 35.

²² Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmata) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

dibandingkan dengan Negeri sendiri. sehingga, tak heran Malaysia sangat berpengaruh di Pulau Sebatik tersebut.

Sehingga perlu kiranya intervensi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebatik, dalam hal ini perlu diupayakan pasar alternatif pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat pulau sebatik, selain dijual kepasar tawau Malaysia.

Kemudian berkaitan tentang kepadatan penduduk, dari beberapa desa yang termasuk dalam kecamatan sebatik tengah, sesuai dengan data yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa terlihat desa aji kuning dan desa sungai limau merupakan desa yang terpadat karena dipenuhi oleh masyarakat. Ketika di perhatikan lebih dalam, faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kedua desa tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi pintu akses termudah dan tercepat dengan Tawau-Malaysia.

Sisi lain yaitu potensi. Kecamatan Sebatik Tengah dikenal dengan potensi budidaya pertanian, khususnya perkebunan dan hortikultura. Akan tetapi potensi pertanian tersebut tidak bertahan lama di negara sendiri, artinya Selama ini hampir seluruh komoditas hasil pertanian masyarakat Sebatik Tengah dipasarkan di Tawau Malaysia dan tata niaga tradisional. Komoditas yang dikembangkan oleh para petani, cenderung menyesuaikan dengan permintaan pasar di Tawau Malaysia dengan harga sepenuhnya dikendalikan oleh pasar.

Sehingga perlu diupayakan pasar alternatif pasar yang lebih baik bagi produk hasil pertanian masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah sehingga posisi tawar dan kesejahteraan mereka juga dapat lebih meningkat.

Kemudian, dari sesi UMKM walau pemerintah kecaatan memiliki program “*One Village, One Product*”, akan tetapi tidak terlaksana dengan baik. Dan Industri pengolahan bahan baku juga belum berkembang. Industri rumah tangga juga belum berkembang secara optimal, selain terbentur pada masalah permodalan, peralatan dan keterampilan yang masih terbatas, industri pengolahan ini juga terbentur

dengan pemasaran. Perlu ada intervensi dari pemerintah maupun swasta yang lebih baik untuk mendorong agar sektor ini juga dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan diatas sebagai garis besar bahwa profil perekonomian masyarakat perbatasan khususnya di Pulau Sebatik memiliki karakteristik tersendiri, bahwa Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati lebih jauh sehingga dapat dijadikan bahan untuk dapat mengambil kebijakan untuk kedepannya. diantaranya :

a) Ketergantungan Ekonomi Dengan Negara Malaysia

Ketergantungan ekonomi masyarakat sebatik Indonesia dapat dianalisis sebagai suatu keteringgalan ekonomi masyarakat dibandingkan dengan negara Malaysia. Ketergantungan secara ekonomi masyarakat pulau sebatik dengan negara tetangga Malaysia merupakan sebuah problem tersendiri yang sulit ditemukan solusi terhadap masalah tersebut.

Permasalahan tersebut muncul ketika masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak tersedia di Negeri sendiri, Sehingga menyebabkan beralihnya ke Negara tetangga Malaysia yang lebih dekat dan lengkap. Di satu sisi juga disebabkan karena peredaran barang-barang kebutuhan pokok di dominasi barang dari Malaysia.

Dengan beredarnya barang Malaysia tersebut, secara tidak langsung mengakibatkan ringgit akan menjadi mata uang Malaysia yang akan sering digunakan, disamping hasil-hasil perkebunan masyarakat seperti kelapa sawit, coklat, pisang yang semuanya dipasarkan ke Tawau-Malaysia. Disisi lain tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja dan mencari kehidupan di Malaysia. Sehingga gambaran singkat ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi Masyarakat memang sangat tergantung pada Tawau-Malaysia.

Berdasarkan penuturan warga²³, masyarakat pulau sebatik lebih memilih barang hasil produksi Malaysia karena secara ekonomis lebih murah dan mudah didapat. Karena biasanya barang-barang produksi Indonesia didatangkan dari Nunukan atau Tarakan yang jaraknya lebih jauh dengan harga yang relatif lebih mahal, hal itu disebabkan karena proses transportasi yang panjang sehingga memerlukan biaya yang lebih mahal. keterbatasan ketersediaan sarana dan prasana ini yang kemudian dinilai menjadi salah satu penyebab juga untuk menjual hasil perkebunan dan pertanian ke Malaysia, yang lebih jelas pangsanya.

Hukum ekonomi yang biasa kita dengar bahwa jika di suatu tempat barang melimpah, harganya akan menjadi murah, seperti halnya tersebut berlaku di pulau sebatik untuk barang-barang produksi Malaysia. Sebagai perbandingan, jarak tempuh dari pulau sebatik ke tawau hanya 15 menit dengan menggunakan speed boat, sedangkan dari pulau sebatik ke Tarakan sekitar 3 jam, sehingga faktor inilah yang kemudian "Memaksa" masyarakat untuk tetap setia memilih dan menggunakan barang Malaysia ketimbang barang Indonesia.

Perbedaan jarak inilah yang kemudian mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok di pulau sebatik ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Daud yang berprofesi sebagai Imam masjid, beliau mengatakan bahwa "Kita akan lebih memilih harga yang murah, dan barang-barang itu lebih murah dibandingkan dengan barang dari dalam negeri".²⁴

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan M. Aries Nur selaku sekretaris camat kecamatan sebatik Tengah, bahwa benar ketika dikatakan bahwa masyarakat sebatik pada sebagian komoditi tertentu masih bergantung dengan Negara Malaysia, seperti gula dan gas LPG.

²³ Wawancara Arifai Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah, tanggal 8 Juli 2017, pukul 18.30 Wita.

²⁴ Wawancara M.Daud Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah, tanggal 8 Juli 2017, pukul 18.30 Wita.

Dan Bahkan Malaysia menjadi opsi ketika pasokan barang dari Tarakan dan Nunukan kurang atau lambat datangnya. Sehingga pemerintah pun terpaksa mengambil barang tawau Malaysia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebatik tersebut.²⁵

Sehingga penyebab dari adanya keterantungan yang terjadi dapat dirangkum dalam beberapa permasalahan berikut. *Pertama*, masalah kesenjangan ekonomi antara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kesenjangan ini yang mendorong aliran sumber daya dari wilayah yang ekonominya rendah (sebatik) ke wilayah yang lebih maju (tawau Malaysia). *Kedua*, Permasalahan keterbatasannya infrastruktur, termasuk akses jalan menuju perbatasan, minimnya sarana dan prasarana seperti biaya transportasi yang lebih mahal dibandingkan dari negara tetangga, sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sebatik ini.

Dengan kondisi yang dialami penduduk perbatasan di Indonesia, mereka mungkin akan kesulitan jika terdapat pembatasan pasokan bahan pokok dari Malaysia, terutama gas dan gula bersubsidi. Sesuai dengan paparan informan bahwa salah satu penyebab utama yaitu faktor biaya transportasi. Perjalanan dari Nunukan Ke Tawau hanya membutuhkan biaya sekitar Rp.150.000, sudah termasuk perjalanan pulang dan pergi, sedangkan biaya perjalanan ke Tarakan satu arah saja bisa mencapai Rp.400.000,²⁶ hal tersebut mengindikasikan ketergantungan penduduk Perbatasan untuk memperoleh barang-barang pokok dari Malaysia.

Namun demikian, kondisi tersebut sudah sedikit tertolong dengan berprosesnya jalur tol laut yang menjadi program unggulan presiden Jokowi sekarang ini, dan Pulau Sebatik menjadi salah satu titik operasionalnya. Sehingga dapat sedikit memudahkan masuknya

²⁵ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekatat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

²⁶ Wawancara M.Daud Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah, tanggal 8 Juli 2017, pukul 18.30 Wita.

barang-barang Indoneisa, dan secara perlahan menggeser peredaran barang Malaysia yang sudah lama berkuasa.

Semua keteringgalan wilayah perbatasan bermuara kepada ketergantungan yang tinggi pada negara tetangga merupakan manifestasi dari minimnya kehadiran negara di wilayah sebatik ini. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara kurang melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan kontrol dalam praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki. Hal ini berdampak kepada banyak kebutuhan penduduk yang tinggal di daerah sebatik ini tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber dari dalam negeri, sebaliknya mereka dengan mudah memperolehnya dari negara tetangga.

Hal ini sebenarnya dapat mempengaruhi kepada rasa nasionalisme mereka, misalnya adanya anggapan bahwa tidak adanya perhatian yang serius dari Negara. Selain itu, kuatnya pengaruh dari luar negeri dalam kehidupan keseharian mereka lama-kelamaan juga dapat mengusik rasa nasionalisme penduduk wilayah perbatasan.

Sehingga muaranya adalah belum optimalnya partisipasi dan peran pemerintah dalam pembangunan desa dari berbagai sektor demi menunjang pertumbuhan ekonomi Masyarakat perbatasan khususnya pulau Sebatik.

b) Transaksi Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Rutinitas sehari-hari masyarakat pulau sebatik tengah ini melakukan transaksi ekonominya dengan menggunakan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Mata uang rupiah biasa diistilahkan oleh masyarakat pulau sebatik dengan sebutan "Indon". Ringgit dan Rupiah dimaknai oleh masyarakat Pulau sebatik sebagai simbol eksistensi mereka di dua negara, Malaysia dan Indonesia. Ringgit merupakan alat tukar utama dalam bertransaksi dan menjadi primadona, sedangkan rupiah justru sebaliknya jarang digunakan.²⁷

²⁷ Muhammad Hairul Saleh, *Nasionalisme di Tapal Batas*. (Yogyakarta:Interpena,2010). hlm 52.

Berdasarkan penuturan warga aji kuning, walaupun pemerintah telah menggalakkan untuk penggunaan duit rupiah, akan tetapi ringgit tetap masih dipakai oleh masyarakat, dan para toko-toko juga demikian menerima apabila berbelanja kemereka menggunakan mata uang ringgit Malaysia, terlihat melepaskan ringgit itu susah, karena semua barang yang beredar di Sebatik didominasi barang Malaysia.²⁸

Dari sisi sosial, Interaksi antara masyarakat perantau di Pulau sebatik dengan masyarakat di tawau-malaysia sangat erat dan cair, hal ini disebabkan karena adanya ikatan kekerabatan yang kuat sebagai kerabat atau keluarga yang bekerja atau merantau di tawau Malaysia. Bahkan konflik antar etnis terkesan tidak pernah muncul kepermukaan karena telah terjalin rasa saling menghargai dan rasa kekeluargaan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh sekretaris camat, yang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat sebatik memiliki keluarga di tawau, sehingga hubungan emosional ada dan terjalin.²⁹ Dengan melihatnya hubungan dari berbagai aspek antara pulau sebatik dan tawau Malaysia sehingga dapat dikatakan keterikatan antara kedua tempat ini tidak dapat dielakkan.

Hal ini sangat dimungkinkan karena maraknya produk-produk Malaysia yang beredar di Pulau sebatik ini dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Meski demikian ada kalangan yang menilai bahwa tindakan penggunaan mata uang ringgit di wilayah Indonesia merupakan tindakan a-nasionalist.³⁰

Terlepas dari alasan tersebut, berdasarkan keterangan pihak kecamatan sebatik tengah, bahwa setelah terjadinya pemekaran

²⁸ Wawancara Hj. Maupe, Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah, tanggal 6 Juli 2017, pukul 15..30 Wita

²⁹ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekinat) di kantor kecamatan sebatik Tengah. Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

³⁰ Dave Lumenta, *Membongkar Paradoks Epistimologi Negara Tentang Perbatasan, Dalam Hubungan Indonesia-Malaysia dalam perspektif Budaya, Negara, Dan Media (Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran)*. (Jakarta: UI Press, 2012), hlm 155.

kecamatan baru dimana terbentuk kecamatan sebatik tengah maka untuk kesehari-harian masyarakat sudah mulai dipromosikan secara gencar untuk menggunakan uang rupiah, walau tak bisa dielakkan juga kebiasaan menggunakan ringgit. Kemudian, pihak kecamatan juga telah memberikan surat edaran kepada seluruh pengusaha atau pedagang yang mengambil barang dari tawau Malaysia dalam perlabelan harga barang agar mengikutsertakan atau mencantumkan juga harga rupiah Indonesia, sehingga penggunaan rupiah dapat semakin tumbuh dimasyarakat sebatik.³¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat menggunakan ringgit memang telah berlangsung sejak lama, sejak dulu ketika pulau sebatik mulai ramai disinggahi oleh para perantau yang mayoritas berasal dari Sulawesi selatan.³² Keengganan masyarakat menggunakan rupiah memang cukup beralasan karena kebutuhan pokok dari tawau-malaysia didatangkan dengan menggunakan harga ringgit, sehingga menjualnya pun harus dengan ringgit, agar tidak terjadi kerugian.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebenarnya masyarakat sudah timbul kesadarannya menggunakan mata uang rupiah dibandingkan menggunakan duit ringgit Malaysia, hal ini sesuai dengan penuturan warga sebatik H. Syamsuddin sebagai pengusaha, beliau mengatakan bahwa masyarakat sebatik yang datang berbelanja ke tokonya sudah mulai berkurang yang menggunakan mata uang ringgit, karena kebanyakan sudah menggunakan mata uang rupiah.³³

Secara tidak langsung, bahwa pengamatan ini memberikan bantahan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad hairul saleh, yang mengatakan bahwa ringgit masih

³¹ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekinat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

³² Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekinat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 15.25 WITA.

³³ Wawancara dengan H. Syamsuddin yang merupakan Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik supermarket di pulau Sebatik. Pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 6.45 WITA.

berkuasa dibandingkan rupiah Indonesia serta masyarakat sebatik “menafikan” rupiah.³⁴ Karena fakta dilapangan secara perlahan semenjak pemerakaran kecamatan, masyarakat mulai beralih ke penggunaan mata uang rupiah.

2) Peran Pemerintah Indonesia Dalam Perekonomian Masyarakat Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam

Peran Pemerintah dalam bidang perekonomian sangat penting untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder khususnya pada wilayah perbatasan. Pemerintah harus hadir sebagai penyelamat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, sehingga dengan dukungan pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam pembangunan perekonomian akan dapat mendorong pertumbuhan dan kesepakatan kerja dan mengatasi problematika perbatasan yang dihadapi.

Nurul huda, dkk telah memberikan landasan berkaitan dengan fungsi negara. bahwa setidaknya ada tiga fungsi utama negara, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Lantas bagaimana pelaksanaan fungsi tersebut dalam pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah di pulau sebatik. berikut analisis penulis diantaranya :

a) Fungsi Alokasi

Teori ini menuntut Negara untuk turut terlibat dalam segala bentuk alokasi yang dilakukan, baik alokasi barang, maupun alokasi dana. Sehingga agenda utama yang ingin dicapai adalah memastikan seluruh sumber daya yang ada di dalam kekuasaan negara dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Ujung dari pelaksanaan fungsi alokasi ini adalah tercapainya tingkat produksi barang dan jasa yang optimal, sehingga secara merata masyarakat dapat hidup diatas kebutuhan dasar minimum atau lebih.

³⁴ Muhammad Hairul Saleh, *The Dynamics Of Border Society (The Existence Of Bugis Migrants In Sebatik Island North Kalimantan : Perspective Of Cultural Studies)*, Jurnal Borneo Administrator/vol.11/No.1/Tahun 2015, hlm 38.

Realita yang terjadi ketika dihadapkan pada kondisi masyarakat di pulau sebatik sedikit berbeda, karena hakikatnya masyarakat perbatasan masih hidup dalam keterbatasan dan ketergantungan. Terlihat ketersediaan barang-barang masih didominasi oleh produk barang Malaysia yang berasal dari tawau, kebutuhan masyarakat tidak dapat tercukupi, sehingga mengharuskan untuk mengkonsumsi barang dari negara tetangga.

Sehingga terlihat bahwa alokasi barang yang dilakukan pemerintah tidak merata, dan mengakibatkan pengalokasian yang ada tidak efisien dan optimal dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi pemerintah terus berbenah di berbagai aspek agar bisa selalu bisa meningkatkan perekonomian dan memaksimalkan fungsinya.

Seperti halnya perhatian pemerintah berkaitan penggunaan serta peredaran uang ringgit wilayah perbatasan. pemerintah mengambil langkah serius dengan membuka perwakilan kantor Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan Utara yaitu di Kota Tarakan daerah perbatasan. Lembaga inilah yang diharapkan mengawasi peredaran rupiah agar sesuai dengan kebutuhan dan melarang peredaran uang ringgit di kawasan perbatasan.³⁵ Hal tersebut diapresiasi yang luar biasa bagi pemerintah provinsi Kalimantan utara karena membantu salah satu program provinsi agar mata uang rupiah dapat berkuasa lagi di Negeri sendiri.³⁶

Kemudian, untuk tahun 2018 nanti Kalimantan utara mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat agar dapat membangun perbatasan dengan lebih serius, anggaran yang akan didapat pemerintah Kalimantan Utara pada tahun 2018 nanti mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.1 Triliun lebih untuk

³⁵ Sindonews, *Gubernur BI Resmikan Kantor Perwakilan BI di Kaltara*, dikutip dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1224829/178/gubernur-bi-resmikan-kantor-perwakilan-bi-di-kaltara-1501216207>, di akses pada hari minggu, 30 Juli 2017, pukul 6.50 WIB.

³⁶ Sindonews, *Gubernur Kaltara: Sekarang Wilayah Kami Tidak Lagi Gunakan Ringgit*, yang dikutip dari laman <https://ekbis.sindonews.com/read/1224958/34/gubernur-kaltara-sekarang-wilayah-kami-tidak-lagi-gunakan-ringgit-1501241392>, di akses pada hari minggu 30 Juli 2017, pukul 19.05 WIB.

pembangunan perbatasan, kemudian juga sektor perhubungan mendapatkan alokasi sebesar Rp.1 Triliun untuk pengembangan bandara dan pelabuhan.

b) Fungsi Distribusi

Tujuan utama dalam fungsi distribusi ini adalah pemerintah harus menghapus terjadinya ketimpangan dan ketidakseimbangan antara golongan satu dan golongan lainnya. Dan yang terpenting adalah menghapus terjadinya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi segelintir atau segolongan masyarakat, misalnya melalui pembangunan infrastruktur yang merata secara adil dan merata.

Secara umum, pulau sebatik masih jauh dari kata sejahtera, karena masih banyak kekurangan yang ditemukan disana. Salah satu yang menyebabkan ketimpangan yang terjadi adalah belum optimalnya fungsi pemerintah berkaitan terhadap distribusi. Lebih jauh terlihat bahwa masyarakat kota akan lebih diperhatikan dibandingkan masyarakat desa. Apalagi masyarakat perbatasan yang hakikatnya sangat jauh dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sehingga terlihat bahwa ada perbedaan perhatian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat perbatasan.

Jumlah pasokan barang dan jasa masih sangat minim di daerah kawasan perbatasan, khususnya pulau sebatik. Akan tetapi, pemerintah mulai serius memperbaiki kegelisahan yang dirasakan. Dimana pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Keberadaan badan ini diatur melalui peraturan presiden (perpres) nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai tindak lanjut dari undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 3 Perpres 12/2010 menyebutkan bahwa BNPP mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan. Selanjutnya, dalam perpres tersebut ditetapkan beberapa fungsi BNPP, antara lain menyusun dan menetapkan rencana Induk dan rencana Aksi pembangunan batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan (pasal 4). Secara ideal, keberadaan BNPP akan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.

Sehingga dengan terbentuknya badan khusus yang mengelola kawasan perbatasan Indonesia termasuk sebatik, walau harus diakui pelaksanaannya masih kurang optimal karena hanya memandang keamanan sebagai faktor penting perbatasan. Akan tetapi pemerintah serius memperhatikan masyarakat perbatasan, bahkan juga melahirkan pemekaran kecamatan di pulau sebatik menjadi beberapa kecamatan, hal ini dimaksudkan agar fokus pelayanan kepada masyarakat perbatasan menjadi lebih intens dan serius.

Peran lainnya juga diperlihatkan guna mengatasi permasalahan maraknya beredar barang Malaysia di pulau sebatik dengan mengoperasikan jalur Tol laut, dimana menghubungkan pulau yang satu dengan yang lain agar dapat semakin mudah memastikan barang-barang Indonesia yang beredar di Pulau sebatik, hal ini kemudian juga akan berdampak kepada harga yang akan semakin murah. Karena sebelumnya harga produk lokal lebih mahal dibandingkan produk Malaysia, hal ini diakibatkan jauhnya jarak dari pemasok barang ke pulau sebatik.

Oleh karena itu, dengan beroperasinya jalur tol laut yang menempatkan Pulau sebatik sebagai salah satu titiknya diharapkan dapat semakin mengurangi ketergantungan masyarakat pulau sebatik terhadap produk Malaysia dan juga memainkan peran pemerintah agar memastikan distribusi tidak hanya bagi mereka yang dekat dengan

pemerintah, akan tetapi untuk daerah perbatasan yang jauh dari pemerintah pusat juga ikut diperhatikan.

c) Fungsi Stabilisasi

Target dari stabilisasi ini adalah bagaimana agar terciptanya stabilisasi sosial dan interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan adil. Negara harus ikut menstabilkan perekonomian, mulai dari menggunakan seluruh anggarannya, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Bentuk stabilisasi yang dilakukan adalah intervensi pemerintah terhadap perbedaan pasokan barang dan jasa yang terjadi di perekonomian masyarakat perbatasan.

Dalam hal pulau Sebatik, pemerintah seyogyanya telah melaksanakan fungsi stabilisasi tersebut. Terlihat dengan mulai memastikan pasokan barang dan jasa masuk dengan baik ke Pulau sebatik ini melalui program jalur tol laut yang menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan pusat saat ini.

Kemudian dalam memastikan stabilnya rupiah di kawasan perbatasan Indonesia bagian utara ini, pemerintah pusat membentuk Bank Indonesia cabang Kalimantan utara. hal ini guna memaksimalkan kembali peredaran rupiah di kawasan perbatasan, agar penggunaan ringgit Malaysia bisa terpinggirkan.

Sehingga, dengan adanya lembaga baru ini diharapkan permasalahan pokok berkaitan dengan uang sudah tidak lagi dapat dirasakan. Sehingga duit rupiah dapat kembali menjadi tuan rumah di rumah sendiri, yang sebelumnya masih menjadi opsi dalam penggunaannya dalam transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan dan pemaparan diatas, bahwa pada dasarnya pemerintah sudah memainkan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, dengan memberikan beberapa perhatian kepada masyarakat kawasan perbatasan, walau harus diakui perhatian tersebut

masih terbatas dan harus selalu ditingkatkan guna kesejahteraan yang menyeluruh.

Adapun ketika dianalisis berdasarkan prinsip dasar ekonomi politik Islam yang diteorikan oleh Mohd Syukri Muhd Rusdi terlihat bahwa dari seluruh prinsip dasar tersebut pemerintah telah berusaha untuk menjalaskannya terutama pada prinsip pemenuhan hak hidup masyarakat agar dapat terpenuhi dengan adil dan merata, serta prinsip pengurangan pusat kekayaan yang hanya berputar atau berada pada satu golongan tertentu saja. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai macam program yang diyakini sebagai antisipasi terhadap kesenjangan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran pemerintah sejauh ini telah sejalan dengan perspektif ekonomi politik Islam, pemerintah adalah penguasa yang mengurus dan melayani umat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh



37. تصرف الإمام على رعيته موطأ بالصلحة

"Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemashlahatan."

Sebagai contoh, pemerintah hadir dalam memperhatikan nasib peserta UMKM. lebih lanjut berkaitan dengan UMKM, pemerintah kecamatan sebatik tengah terus mendorong agar tumbuh dan berkembangnya UMKM yang ada di pulau sebatik, dan untuk menggusur secara perlahan ketergantungan yang terjadi saat ini, pemerintahan sebatik secara persuasif menghimbau seluruh warga untuk mengelola bahan mentah yang tersedia menjadi bahan jadi yang layak jual. seperti pengolahan olahan pisang yang menjadi industri unggul di pulau ini, sehingga pemerintah bisa ikut mempromosikan produk tersebut

³⁷ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-suyuti, *Asbah wa an Nazair fi al-furu'*, (semarang: Maktabah usaha keluarga, t.th), hlm 83.

diberbagai ajang pameran-pameran baik tataran lokal maupun internasional.³⁸

Kemudian berkaitan tentang maraknya beredar barang malaysia di pulau sebatik, pemerintah mencoba untuk melakukan berbagai macam inovasi, salah satunya dengan membuat peraturan agar dikalangan pemerintah tidak ada lagi barang malaysia yang digunakan, semua harus produk asli dalam negeri. pemerintah mengatakan bahwa permasalahan kelangkaan barang indonesia di sebatik sekarang bukan menjadi alasan lagi, hal ini disebabkan sudah mulai beroperasinya tol laut program jokowi pada tahun 2017 ini, sehingga masuknya barang ke pulau sebatik menjadi lebih mudah karena salah satu titik tol tersebut adalah pulau sebatik.³⁹

Hal ini peneliti lihat sebagai salah satu bentuk kecil keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di kawasan perbatasan indonesia khususnya di pulau sebatik.

Sehingga, dapat disimpulkan bahawa tugas dalam jangka waktu terdekat yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten adalah berusaha menjadikan pulau sebatik yang berada di wilayah perbatasan, tidak kalah saing dengan kota tawau malaysia. sehingga sebatik dapat menjadi kota yang dapat mengimbangi pertumbuhan kota tawau.

Hal ini terlihat di sei pancang dan sei nyamuk daerah pulau sebatik sudah dibangun beberapa supermarket dan pertokoan serta pasar lokal perbatasan dengan pembangunan wilayah sebatik induk, sebatik bagian lainnya juga ikut berkembang. walau demikian, masih saja kota tawau menjadi pusat kegiatan perdagangan penduduk pulau sebatik, khususnya aji kuning.⁴⁰

³⁸ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

³⁹ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekat), Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

⁴⁰ Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

Sehingga pada dasarnya, Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa pada dasarnya pemerintah telah menyikapi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pulau sebatik, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan guna mengurangi kesenjangannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia serta Negara tetangga Malaysia.

Khususnya pada pulau sebatik yang berbatasan dengan negara Malaysia, untuk mulai memperlihatkan perhatian kepada masyarakat, pemerintah mengawali dengan perubahan paradigma untuk memperlakukan wilayah perbatasan itu sebagai "Halaman Depan" negara. pemerintah, melalui berbagai kementerian/instansi teknis disertai dengan dukungan dari pihak-pihak di luar pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, termasuk mengalokasikan dana dengan jumlah yang bervariasi antar lembaga.

Isu wilayah perbatasan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan dibuatnya berbagai macam strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diharapkan mampu menjadi solusi. Namun demikian, implementasinya masih terkendala oleh berbagai persoalan. Sehingga, terlepas dari usaha yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, penulis menilai masih sebelum maksimal. Masih banyak kekurangan serta permasalahan yang belum berhasil terjangkau oleh pemerintah.

Berikut beberapa Permasalahan dan kendala yang penulis temukan dalam pengamatan selama penelitian di pulau sebatik khususnya di kecamatan sebatik tengah dan Kabupaten yang berkaitan dengan peran pemerintah, diantaranya :

1) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Dan Kabupaten.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, khususnya kawasan perbatasan adalah pelayanan masyarakat yang

optimal. Akan tetapi pelayanan masyarakat yang terjadi saat ini belum maksimal.

Hal tersebut disebabkan karena terpisahnya layanan masyarakat, yaitu pusat pemerintah yang berada di Nunukan yang terpisah pulau. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan, maka akan membutuhkan proses yang lama dan panjang. Sehingga, hal ini dinilai tidak efektif sebagai kawasan perbatasan yang syarat akan berbagai permasalahannya.

Akibat dari terpisahnya pemerintahan tersebut, ketika diteliti lebih lanjut maka dapat berimbas sebanyak hal, misalnya keterlambatan penanganan ekonomi, tingkat pertumbuhan, perhatian kesejahteraan lainnya.

Disisi lain, pada pemerintahan kecamatan sebatik tengah terlihat minimnya aparatur pemerintah yang bertugas disana. Hal ini disebabkan tidak meratanya penyebaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan juga disebabkan akibat kondisi desa yang kurang menarik dari segi sarana dan prasarana sehingga membuat aparatur pemerintah berusaha menghindari penempatan di tempat tersebut.

Sehingga berimbas kepada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kurang baik, salah satu contoh dimana lemahnya komunikasi antara aparatur negara ini. Ketika pemerintah pusat ingin melakukan pelatihan pengelolaan hasil perkebunan, kemudian mengirimkan mesin pengelolaan. Akan tetapi, mesin datang tapi tidak dapat digunakan, disebabkan berbagai faktor seperti tempat, pasokan listrik, sosialisasi ke masyarakat yang belum terjangkau.

2) Pengelolaan Perbatasan Dilihat Sebagai Masalah Kecil

Kesalahan pengelolaan perbatasan saat ini adalah melihat masalah perbatasan hanya sebatas permasalahan keamanan, padahal lebih dari itu ada masalah yang lebih besar yaitu berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi.

Hal ini yang dinilai kurang dalam pengelolaan perbatasan saat ini. Padahal disamping orientasi pembangunan perbatasan sebagai halaman depan negara berbasis *outward looking*, yakni yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan peran perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan negara tetangga.

Pengelolaan perbatasan hanya dilihat sebagai masalah kecil, hal tersebut terlihat pada tahun lalu ketika lembaga khusus yang mengelola perbatasan berubah bentuk. awalnya berupa badan khusus namun sekarang hanya berupa bagian kecil saja. Sehingga ketika menjadi bagian tentu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan kedepannya karena tidak mempunyai kewenangan yang penuh seperti dulu waktu berbentuk badan pengelola perbatasan. Seperti contoh, ketika Bagian batas negara dan kerjasama ingin membuat program berkaitan dengan peningkatan UMKM, akan tetapi akan terbentur oleh dana dan kebijakan.

Oleh karena itu, perlu kiranya keseriusan lagi dari pemerintah dengan kembali membentuk badan pengelolaan, kemudian memfokuskan juga kepada permasalahan ekonomi, bukan hanya melihat terhadap permasalahan keamanan dan batas negara.

3) Minimnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan, bahwa dari segi sarana dan prasarana, pulau sebatik masih tertinggal. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya transportasi umum, dan juga akomodasi hotel. Di pulau sebatik hampir tidak ditemukannya hotel, sehingga hal tersebut dampak berimbas kepada masuknya investor-investor yang akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan. Walau disisi lain, selain infrastruktur yang memadai, juga pentingnya kemudahan birokrasi, terlihat di pulau sebatik pelayanan perizinan dalam bidang UMKM maupun investor masuk masih belum optimal. Dimana untuk membuka usaha daerah ini masih susah dan memakan proses yang lama, hal tersebut berbeda ketika dibandingkan dengan buka usaha di Tawau Malaysia dengan kemudahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian dan analisa yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti akhirnya dapat menyimpulkan beberapa hasil penelitian, sebagai berikut :

1) Profil Perekonomian Masyarakat Perbatasan masih tertinggal dari berbagai aspek. Sehingga dapat berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Setidaknya ada beberapa alasan-alasan, diantaranya :

- a) Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat perbatasan dalam hal mata pencarian masih bergantung dengan lahan pertanian dan perkebunan. Hal tersebut didukung dengan luasnya lahan yang dimiliki daerah sebatik ini. Disatu sisi pulau sebatik memiliki potensi-potensi yang hakikatnya apabila dikelola dengan baik dapat membantu perekonomian masyarakat perbatasan. Seperti potensi wisata perbatasan maupun potensi pengolahan produk lokal. Dari segi transaksi ekonomi, masyarakat pulau sebatik masih menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit dalam transaksi ekonominya, hal tersebut dipengaruhi banyaknya peredaran barang Malaysia yang beredar di pulau sebatik, disebabkan kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat membantu peredaran barang Indonesia.
- b) Penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat pulau sebatik masih sangat bergantung kepada Malaysia, dari segala aspek. Terutama yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan barang-barang pokok, seperti gas, gula, bahkan beras. Terlihat bahwa masyarakat pulau sebatik sudah terbiasa menggunakan barang-barang Malaysia guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini disebabkan karena barang Malaysia lebih murah dibandingkan barang lokal yang lebih mahal akibat biaya operasional yang mahal. Kemudian ditambah dengan mayoritas barang hasil perkebunan dan pertanian dipasarkan di tawau Malaysia, membuat ketergantungan dengan Malaysia sulit dielakkan. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan utama yang dianggap[sebagai faktor penyebab ketergantungan penduduk perbatasan terhadap Malaysia, yakni kesenjangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan pengembangan potensi ekonomi, serta regulasi yang lemah dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.

2) Peran Pemerintah Perspektif Ekonomi Politik Islam

Secara umum peran pemerintah sudah memperlihatkan keseriusannya, upaya-upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di Perbatasan. Dengan kata lain bahwa negara telah berupaya hadir, walau harus diakui perannya belum dapat dilakukan secara optimal.

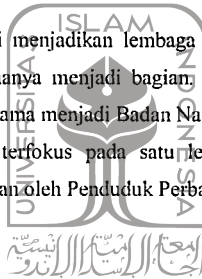
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan perekonomian penduduk perbatasan khususnya masyarakat pulau sebatik kecamatan sebatik tengah, berikut kesimpulannya :

- 1) Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap Malaysia sudah mulai dilakukan seperti dengan mengoptimalkan peran Tol Laut yang saat ini sudah mulai memperlihatkan fungsinya, dan menjadikan pulau sebatik sebagai salah satu titiknya. Sehingga dengan lancarnya transportasi tersebut maka akan menjadikan biaya akan menjadi murah dan masyarakat akan mulai beralih kembali. Di salah satu sisi, pemerintah juga mulai mengembangkan fungsi UMKM dengan memberikan beberapa pelatihannya sehingga diharapkan mampu bersaing dan tidak bergantung dengan perekonomian masyarakat, kemudian ditunjang dengan peran pemerintah yang memasarkan hasil olahan produk tersebut.
- 2) Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan peredaran uang Malaysia yang beredar di Pulau semakin dengan melakukan beberapa program. Dimulai dengan mewajibkan para pengusaha untuk mencantumkan harga rupiah sehingga tidak menjadi alasan untuk menggunakan ringgit saja. Kemudian diikuti dengan program lainnya yaitu mulai menghilangkan produk-produk Malaysia yang berada di pusat pemerintah.
- 3) Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang dilakukan belum optimal dan sempurna. Hal tersebut disebabkan adanya pemisahan otoritas khusus yang mengelola perbatasan yang sebelumnya berupa Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kab. Nunukan menjadi Kasubag Batas Negara Dan Kerjasama. Pemisahan tersebut berimbas kepada beberapa program yang tidak dapat dijalankan dengan leluasa dan terbuka. Di satu sisi, antara pulau Sebatik yang menjadi pusat dalam permasalahan perbatasan, dan pusat pemerintahan yang mengelolah perbatasan tersebut terpisah oleh lautan. Jauhnya jarak antara pusat permasalahan dengan pengambil kebijakan juga berdampak kepada lamanya kebijakan yang akan dilakukan demi percepatan perekonomian masyarakat perbatasan. Apalagi ditambah dengan jumlah aparatur yang berada di perbatasan masih terbilang minim.

B. Saran-Saran

Dari hasil pengamatan, analisis dan pemaparan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan, diantaranya :

- 1) Pengelolaan perbatasan harus benar serius menyentuh aspek ekonomi. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah harus serius melihat aspek ekonomi sabagai salah satu aspek terpenting dalam permasalahan perbatasan. Karena sejauh ini pemerintah terkesan fokus kepada persoalan batas negara dan kedaulatan Negara, tapi tidak terlalu memperhatikan permasalahan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- 2) Dalam Hal perbaikan permasalahan yang lebih cepat dan serius, hendaknya pemerintah menambah aparaturn pemerintah yang bertugas di daerah perbatasan sehingga dapat membantu pemerintah pusat dengan lebih cepat membantu perekonomian masyarakat perbatasan.
- 3) Hendaknya pemerintah kembali menjadikan lembaga khusus yang mengelola perbatasan menjadi Badan khusus, tidak hanya menjadi bagian. Dalam hal ini kembali menjadikan Bagian batas Negara Dan Kerjasama menjadi Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP), agar pengelolaan perbatasan terfokus pada satu lembaga saja, menjadikan program-program bisa lebih cepat dirasakan oleh Penduduk Perbatasan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Audhi, al- Rifat, 1985, *Min At-Turats : Al-Iqtishad lil Al-Muslimin*, Mekah : Rabithah Al'Alam Al-Islami.
- Ahmad Shamsulbahriah ku, 1990, *Pengantar Ekonomi Politik*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Affandi, mohd Hassan, 1992, *The Tawhidic Approach In Management And Public Administration : Consept, Principles And an alternative Model*, Kuala Lumpur, INTAN.
- Asy'arie,Musa. 1997, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan umat*, Yogyakarta: LESFI&II.
- Azwar,Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azmi, Sabahudin, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam-Kuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Abu Bakar, Mustafa, 2006, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Afrizal,2009. "Potensi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Perbankan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Tahun 2008". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol 7, No 2, Mei.
- Ade Irma, adem T. Pangalasan,2013, *Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud*, *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3* September.
- Azansyah, 2013, *Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangan Kelembagaan di Indonesia, dan Membangun lembaga yang efektif*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VII, No 02, Juni.
- A.Caporaso, James dan David P.Levine. 2015, *Teori-Teori Ekonomi Poitik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahmed,Muhammad Qadri, 2016, *The Philoshopy Of Islamic Political Economy : Theory And Practice*, *Journal Of Philosophy, Culture, and Religion*, Vol. 16.
- Baqir, Muhammadm Ash-Shadr, *Iqtshaduna*, Dar Al-Kitab Al Islami t.tt: Iran.
- Baswir, Revrisond, 1997, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Budiardjo,Miriam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Bungin, Burhan, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Baqir Ash-Shadr Muhammad, *Iqtsshaduna*, Dar Al-Kitab Al Islami: Iran.
- Buku Laporan Tahunan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017.
- Capra, M. Umar, 2000, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Islam and Economic Challenge, alih Bahasa ikhwan Abidin, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dawalibi, ad- Ma`ruf, 1985, *ad-daulah Wa As-sulthah*, Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Departemen Pendidikan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik*, Indonesia: Penerbit Erlangga.
- Devas C.S, 2009, *Political Economy*, Bibliobazaar, LLC.
- Damsar dan Indrayani, 2009, *Pengantar Sostologi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Edy Hamid Dan M.B Hendrie Anto, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: UII Press.
- Edyanto, 2007, "Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat". Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol 9, No.3.
- Erani, Ahmad Yustika, 2014, *Ekonomi Politik Kajian Teoritis Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faridi FR, 1983, *Theory Of Fiscal Policy In an Islamic State*, J.Res. Islamic Econs. King Abdul Aziz University Jeddah, Vol.1. No.1.
- Geertz, Clifford, 1974, *The Interpretation Of Cultures*, New York: Basic Books.
- Ghihna, al- Abd 'Abdud, 1981, *Ad-daulah Al-Islamiyyah wa ad-daulah Al-Mu'ashurah*. Lebanon : Dar Al-Fikr Al-Farabi.
- Gamma, Sinyo, Timisela, 2015, "Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus : Wilayah Perbatasan RI-PNG di distrik Muara Tami", Jurnal JESP-Vol.7, No 2. ISSN 2086-1575.
- Hamid, Suandi Dan M.B Hendrie Anto, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: UII Press.
- Herman, CB Edyanto, 2007, "Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat". Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol 9, No.3 Desember.
- Hairul, Saleh, 2010, *Nasionalisme Di tapal Batas*, Interpena: Yogyakarta.

- Huda,nurul dkk,2012, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*, Jakarta, Kencana.
- Hairul, Saleh,Muhammad, 2015, “*Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies*”, Jurnal Borneo Administrator, Vol 11 No.1.
- Hudi, Zainuddin, Prasajo, 2013, *Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan*, Jurnal Walisongo, Vol 21, No 2 November.
- <http://www.sebatiknews.com/2016/11/pulau-sebatik-masuk-7-perbatasan-negara-terunik-di-dunia.html>, diakses pada hari Sabtu 12 November 2016, Jam 13.50 WIB.
- <http://regional.kompas.com/read/2016/08/16/07592931/rumah.warga.di.perbatasan.teras.di.wilayahindonesia.dapur.di.malaysia> diakses pada hari sabtu 12 november 2016, Jam 10.15 WIB.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017, pukul 9.30 WIB.
- <https://nunukankab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/50> diakses pada hari sabtu 12 november 2016, 12.30 WIB.
- http://kaltim.antaranews.com/berita/18023/negara-dirugikan-beredarnya-ringgit-dinunukan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news diakses pada hari sabtu 12 november 2016.
- <http://www.sebatiknews.com/2016/05/miliaran-rupiah-uang-warga-pulau-sebatik-beredar-di-malaysia.html>. Diakses pada hari Selasa 22 November 2016, jam 11.23 WIB.
- <http://bnpp.go.id/index.php/profil/tentang-bnpp/visi-misi> diakses pada hari Selasa 22 November 2016, pada jam 8.20 WIB.
- <http://www.nunukankab.go.id/hal-bppd.html> , diakses pada hari Senin 21 November 2016, Pukul 7.05 WIB.
- Izzuddin, Muhammad, abd Al-Aziz bin abd As-Salam Al-Salami, *Qowaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo: Al-Istiqomah,t.t.
- Iskandar. Otto, 2002, “*Etos Kerja, Motivasi, Dan Sikap Inovatif Terhadap Produktifitas Petani*”. MAKARA Of Social Sciences And Humanities Series, Vol 6, No 1.
- Ismatullah, Dedi, 2006, *Ilmu Negara Muthakhir*. Bandung: Pustaka At-Tadbir.
- Ibrahim Patmawati hj, 2008, *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat : Tinjauan Empirikal*. Jurnal Syariah, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jil. 16, Bil 2, Julai-Disember.

- Idrus, Muhammad 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga
- Ima, Ade T. Pangalasan, 2013, *Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3.
- Jalaluddin, al-imam Abdurrahman ibn Abu Bakar as-suyuti, t.th, *Asbah wa an Nazair fi al-furu'*, semarang: Maktabah usaha keluarga.
- James, Post, dkk, 1996, *Business and Society - Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, New York, McGraw-Hill Inc.
- Jusmaliani, Dkk, 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kian, Thee Wie, 1983, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Juhaili, Al- Wahbah, 2002, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Lebanon : Dar Al-Fikr Al Mu'ashir.
- Kasniah, Naniek, 2011, *Tahapan Menentukan Informan dalam penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ombak.
- Kartasapoetra, G. dan Hartini. 2007. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mawardi, al, 1973, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah , wal Wilayat al- Diniyyah*, Kairo: Mustafa al-babi al-halabi.
- , 1987, *Adab Ad-dunya wa Ad-din*, Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Muhammad, abu, Izzuddin abd Al-Aziz bin abd As-Salam Al-Salami, *Qowaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, t.th , Kairo: Al-Istiqomah., Juz 1.
- Made, I Andi Arsana, 2010, *Aspek Geo-Spasial Batas Maritim International Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan Kebijakan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Muhammad, Ahmad Al-Asal, 1999, *Annizamul Fil Islam Mabahdiuhu Wahdafuhu. Terj. Sistem Prinsip. Dan Tujuan Ekonomi Islam. Imam Saepudin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moh Nadzir, moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majid, abdul Baihaqi A. Rasyid, 2000, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah : Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*., Jakarta: PINBUK.
- Maksum, Nur, 2001 "Agama Dan Etos Kerja Dalam Perilaku Ekonomi (Studi Kasus Pedagang Muslim Alabio di Kota Banjarmasin)", Tesis Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

- Muta'ali, Lufti. 2014, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Husain. 2005, "The Spirit Of Islamic Entrepreneurship : Dynamics Of Small and Medium Entrepreneurs In Indonesia And Malaysia", *Jurnal Millah* Vol. IV, No.2 Januari.
- Muttaqin, Hidayatullah, 2008, "Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam: Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir", Tesis Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis*: terjemahan Tjejep Rohidi, Jakarta : UI Press.
- Meleong Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, Misbahul, 2006, *Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Iqtishoduna* Iqtishoduna, Vol 2, No 3.
- Marsetio, 2012, *Kontruksi Marginalitas Masyarakat Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natua*, Disertasi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Najjar an, Fauzi, 1989, *Al-Fikr As-Siyasi Al- Islami* (Kairo: Dar Al-Syuruq.
- Nadzir, mohd, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Narbuko, cholid dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Oktaviany, Mega, 2013 "Etos Kerja Entrepreneur Muslim Suku Bugis Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur", Tesis Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Presilla, Mayasuri. 2001, *Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan*. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Th. 24, Nomor 2, Agustus.
- Qodir, Zuly, 2002, *Agama & etos Dagang*, Solo: Pondok edukasi.
- Qaradhawi, Yusuf, 2002, *Fiqh Kenegaraan*, Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia.
- Rizky, CB Herman Yudaruddin Dan Rian Hilmawan, 2012, "Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur : Upaya Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis". *Jurnal Mulawarman*, Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper EP UNNES.
- Rahardjo, Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF.
- Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data ini diperoleh dari [20110701114745.PolicyRecommendationKALTIMWeb.pdf](#) diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 1.40 WIB.

- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Rudiatin, Endang, 2012, *Intergrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia – Sabah Malaysia)*, Disertasi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu sosial & Politik Departemen Antropologi Program Studi Pascasarjana.
- Syatibi asy, t.t, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah*, Kairo: Maktabah Al-Istiqomah, Juz 4.
- Sa'id, Muhammad, Ramadhan Al-Buthi, 1977, *Dhwaibith Al-Mashlahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Suandi, edy Hamid, 1999, *Peran Dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian*, Jurnal JEP Volume 04, No. 1, ISSN: 1410-2641.
- Soekanto, soejono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Syukri, Muhammad Salleh, 2003, *7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam*, University Sains Malaysia, Zebra Edition Sdn. Bhd.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Uber, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama: 2008.
- Sobari dkk, 2010, *Boundary Making Theory Dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suntana, Ija, 2010, *Politik Ekonomi Islam (siyasah Maliyah) : Teori- Teori Pengelolaan Sumber daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Pustaka Setia , Bandung.
- Suyatno, 2010, *Globalisasi, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Local Governance, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Shively, W.P, 2011, *Power And Choice An Introduction To Political Science*. Ed. Ke-12. Mc Graw Hill International Edition.
- Siburian, Robert, 2012, *Pulau Sebatik : Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysta*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14, No.1.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: ALFABETA Press.
- Syakir, mohd, Mohd Rosdi, 2014, *Ekonomi Politik Islam Teori Dan Falsafah*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

- Tobroni dan syamsul arifin, 1994, *Islam Pluralisme Budaya Dan Politik : Refleksi Theologi Untuk Aksi Dalam keberagaman Dan pendidikan*, Yogyakarta: SIPRESS.
- Tasmara, Toto, 2000, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tamkin, Joni, 2007, *Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*. Jurnal Ushuluddin. Kuala Lumpur, Bahagian Pengajian Ushuluddin, akademi pengajian Islam Universiti Malaya.
- Triyanta,agus, 2012, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politi Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: FH UII press.
- Poewerti, endang, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama Bank Indonesia, 2013, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Press.
- Purnomo.Agus, 2015, “*Evaluasi Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan Di kec. Kaligesing Kelurahan Tlogoguwo Dalam Perspektif Politik ekonomi Islam*”. Tesis Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Padan,Belinda, 2015, *Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan*. E-jurnal Pemerintahan Integratif, 3 (1): 175-189. ISSN 2337-8670.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yusuf, 1996, *Social Justice In Islam*, Lahore: M. Asraf Publisher.
- Yusuf, Abu, 1382, *Kitab Al-Kharaj*, Kairo : Maktabah Salafiyah.
- Yusuf,Yamin.2007, “*Peran Negara dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Ibnu Taimiyyah*”. Tesis pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Yudaruddin,RIzky Dan Rian Hilmawan.2012, “*Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur : Upaya Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis*”. Jurnal Mulawarman, Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper EP UNNES.
- Zarqa, anas, 1980, *Islamic Economics : An Approach To human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (cd)., *Studies In Islamic Economics*, (Leincester: The Islamic Foundation.
- Zain, Siti Noorchan Mohd,2010, *Perbatasan Malaysia Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politik, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu.Yogyakarta.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

AMPIRAN I : Surat Penelitian



Tersertifikasi "A"
SI SANUKY No. 0001/PM-PT/06-07/12/2012

PROGRAM PASCASARJANA (S2) MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758
Website : www.masterislamic.uii.ac.id; Email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

Nomor : 231/PPs-FIAI/VI/2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 08 Juni 2017

Kepada Yang Terhormat:

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : FAHMI SYAM
NIM : 15913178
Konsentrasi : EKONOMI ISLAM
No Hp : 082126004706

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM [Studi Pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara]".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



FAHMI SYAM, MSi

LAMPIRAN II : Bukti Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH**
Jalan P. Ramli RT. 04 Dusun Maiwa Desa Maspul Kode Pos 77446

SURAT KETERANGAN

Nomor : 307-UMPEG/070/VIII/2017

Camat Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Syam
NIM : 15913178
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Judul Tesis : Peran Pemerintah dalam Perekonomian Masyarakat Muslim Perbatasan Indonesia- Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam (Studi Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara)

telah melakukan penelitian dan pengumpulan data sebagaimana judul diatas di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sebatik Tengah, Agustus 2017
an. CAMAT,
SEKCAM

ARIS NUR, SSTP
Penata Tk.I/IIId
NIP. 19830515 201212 1 005

MPIRAN III : Wawancara Pemerintah Kecamatan

Interview Guidance Mengenai Perekonomian Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia Petunjuk Wawancara :

1. Ucapan terimakasih kepada Informan atas kesediannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan.
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau Saran yang berkaitan tentang topik wawancara.
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas.

Dara Umum :

Narasumber :

Nama Informan :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

1. Pekerjaan Apa Saja yang digeluti Masyarakat perbatasan aji kuning ?
2. Dimana dijual hasil perkebunan, perdagangan yang dilakukan ?
3. Apa masalah yang sering di hadapi masyarakat aji kuning ?
4. Apakah benar masyarakat perbatasan termasuk masyarakat yang tertinggal dari segala faktor ?
5. Apakah benar peredaran barang malaysia sangat dominan di pulau sebatik ?
6. Apa yang menjadi tolak ukur sehingga kebutuhan masyarakat Pulau Sebatik harus bergantung pada negara tetangga ? adakah faktor transportasi dan harga menjadi salah satu alasannya ?
7. Bagaimana dengan transaksi masyarakat di pulau sebatik ini ? apakah benar masyarakat perbatasan menggunakan 2 mata uang yaitu rupiah dan ringgit ?
8. Bagaimana peran pemerintah? adakah program atau kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan ?
9. Bagaimana pengelolaan perbatasan sejauh ini? Khususnya dalam pengelolaan ekonomi ?

MPIRAN IV : Wawancara BPPD

Interview Guidance Mengenai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengenai Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia

Petunjuk Wawancara :

1. Ucapan terimakasih kepada Informan atas kesediannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan.
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau Saran yang berkaitan tentang topik wawancara.
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas.

Dara Umum :

Narasumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)

Nama Informan :

Umur :

Jabatan Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

1. Sejak Kapan lembaga BPPD didirikan?
2. Program Apa Saja Yang Di lakukan Oleh BPPD dalam Mengelola Perbatasan?
3. Strategi Apa Saja yang di gunakan untuk mengelola daerah perbatasan?
4. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program BPPD ?
5. Bagaimana kebijakan/ Kinerja BPPD sejauh ini ?
6. Faktor apa saja yang perlu di evaluasi dari program BPPD sejauh ini ?

LAMPIRAN V : Wawancara Masyarakat Perbatasan

Interview Guidance Mengenai Perkonomian Masyarakat

Petunjuk Wawancara :

1. Ucapan terimakasih kepada Informan atas kesediannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan.
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau Saran yang berkaitan tentang topik wawancara.
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas.

Dara Umum :

Narasumber : Masyarakat Perbatasan

Nama Informan :

Umur :

Jabatan Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah peredaran barang dikuasai produk Malaysia?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab peredaran barang Malaysia di sebatik ?
3. Apa Benar pulau Sebatik sangat bergantung dengan Malaysia?
4. Kemana Hasil Pertanian di Jual?
5. Bagaimana penggunaan Mata Uang Ringgit Di Sebatik ini?
6. Bagaimana Perhatian pemerintah sejauh ini ?

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Pemerintahan Camat Sebatik Tengah

Nama : Aries Nur S.STP.
 Jabatan : Sekertaris Camat (Sekmat)
 Waktu Wawancara : Kamis, 6 Juli 2017.
 Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Sebatik Tengah, Jln Kecamatan.

Fahmi	:	Pekerjaan apa saja yang digeluti masyarakat perbatasan sebatik Malaysia?
Sekcam	:	Sejauh ini mayoritas masyarakat pulau sebatik berprofesi sebagai petani, dengan mengoptimalkan keluasan perkebunan yang dimiliki. Karena memang pulau sebatik masih memiliki tanah yang cukup luas, sehingga dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Namun, selain petani ada masyarakat yang berprofesi sebagai TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
Fahmi	:	Dimana dijual hasil-hasil perkebunan masyarakat sebatik ?
Sekcam	:	Hasil-hasil perkebunan, sebagian besar di jual ke Malasysia, karena memang jarak tempuh kesana memang cukup dekat sekita 15 menit, jadi dari segi biaya maka akan lebih murah ketimbang menjualnya ke Tarakan atau nunukan yang lebih jauh. Akan tetapi, kami sudah mulai menggalakkan agar semua hasil mentah yang pulau sebatik hasilkan dikelola terlebih dahulu, sebelum kemudian kita jual dipasaran, baik pasaran lokal maupun pasaran internasional. Hal ini sudah kita lakukan, dimana kita membuat pengelolaan olahan pisang, yang menjadi produk unggul kami, yang kemudian olahan ini kita promosikan Ke Malaysia dan wilayah lain di Indonesia. Kemarin kecamatan ini sempat di undang pada acara pameran-pameran.
Fahmi	:	Apa masalah yang sering di hadapi Masyarakat sebatik tengah?
Sekcam	:	Sebenarnya masalah yang dihadapi sangat beragam ya, mulai dari keamanan, perhatian pemerintah yang kurang, sehingga mengakibatkan kepada lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, permasalahan sebenarnya terletak pada pelayanan masyarakat. Dimana kami merasa sulit sekali karena terpisah dengan induk pemerintahan yaitu di Nunukan. Sebagaimana yang diketahui bahwa nunukan dan sebatik berbeda pulau. Sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan masyarakat. Proses yang panjang dan berbelit-belit ketika ada permasalahan dan

	masuk. Dan hal ini berdampak kesegala hal, misalnya kemiskinan, kesejahteraan, ekonomi, dan lain sebagainya.
Fahmi	: Apakah benar masyarakat perbatasan termasuk masyarakat yang tertinggal ?
Sekcam	: Tergantung perspektif kita melihat perbatasan tersebut, kalau pulau sebatik ini dibandingkan dengan perbatasan-perbatasan di daerah lain, maka bisa dikatakan pulau sebatik ini tidak tertinggal jauh, dan bahkan perhatian pemerintah juga besar apabila dibandingkan dengan batas negara lain, seperti papua dengan papua nugini. Akan tetapi, ketika pulau sebatik ini dibandingkan dengan tawau Malaysia, maka disitu dilihat sangat jauh sekali perbedaannya. Dimana dari segi infrastruktur jauh tertinggal, apalagi kegiatan ekonomi juga mereka lebih unggul dibandingkan kita.
Fahmi	: Apakah benar peredaran barang Malaysia sangat dominan di pulau Sebatik?
Sekcam	: Berkenaan peredaran komoditi, untuk sebagian komoditi tertentu harus diakui bahwa Malaysia atau barang-barang Malaysia sangat mendominasi, seperti gula dan gas LPG. Akan tetapi semenjak kami berkantor disini pada tahun 2011 terbentuk pemekaran kecamatan sebatik tengah, maka kami mulai berbenah dengan mencoba meminimalisir barang-barang Malaysia yang beredar di sebatik ini. Sebagai contoh, kami di kantor kecamatan ini sudah membiasakan bahwa segala barang-barang kantor itu tidak ada yang berasal dari Malaysia, semua muni produk dalam negeri, bahkan produk lokal. Hal ini lah yang kami usulkan kepada bupati Nunukan agar menjadikan hal tersebut sebagai peraturan daerah, karena kami masih merasakan dikantor-kantor pemerintahan lain barang-barang Malaysia masih bnyak yang beredar.
Fahmi	: Apa yang menjadi Alasan masyarakat sebatik sangat tergantung dengan Malaysia?
Sekcam	: Sebenarnya harus diakui bahwa alasan sebenarnya adalah mahalnya barang-barang negara sendiri, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Apabila dibandingkan barang pokok dalam negeri sedikit lebih mahal, apabila dibandingkan dengan barang pokok dari tawau Malaysia. Hal tersebut disebabkan akan jauhnya jarak yang ditempuh barang untuk sampai di sebatik ini. Akan tetapi, sekarang sudah tidak menjadi alasan lagi, karena tol laut sudah mulai beroperasi, tol laut yang merupakan

	program unggulan Jokowi sudah mulai beroperasi, dan pulau sebatik menjadi salah satu titiknya. Sehingga hal tersebut dapat membantu meminimalisir ketergantungan tersebut.
Fahmi	: Bagaimana transaksi ekonomi masyarakat di pulau sebatik ?
Sekcam	: Kalau pada tahun 80an, memang ringgit sangat mendominasi transaksi di pulau sebatik. Akan tetapi untuk sekarang sudah tidak menjadi alasan lagi untuk menggunakan ringgit. Kami sudah lakukan berbagai macam persuasive untuk ini, seperti segala produk yang masuk harus dicantumkan harga rupiahnya, sehingga masyarakat tau berapa harga rupiah dan membelinya menggunakan rupiah.
Fahmi	: Bagaimana pengelolaan perbatasan sejauh ini?
Sekcam	: Pengelolaan perbatasan sejauh ini sudah cukup bagus, namun tetap masih banyak yang harus di perbaiki, salah satunya kordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkaitan permasalahan ini. Pernah terjadi pemerintah pusat mengirimkan mesin untuk dikelola, akan tetapi pemerintah pusat tidak melakukan survei terlebih dahulu, apa yang dibutuhkan, bagaimana kondisi lapangan. Hal ini lah yang harus diperbaiki. Disisi lain, minimnya aparatur pemerintah yang mengelola perbatasan juga menjadi salah satu kendala yang harus ditemukan solusinya sesegera mungkin.

Wawancara dengan Pemerintahan Kabupaten Nunukan

Nama : Okfriyanto Pieter, K.SE,M.AP.
 Jabatan : Kasubag Bagian Batas Negara dan Kerjasama.
 Waktu Wawancara : Kamis, 7 Juli 2017.
 Tempat Wawancara : Kantor Bupati Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Fahmi	: Bagaimana Pengelolaan Perbatasan Sejahter ini ?
Kasubag	: Pengelolaan perbatasan sejauh ini baik, mulai dari perhatian yang diberikan pemerintah pusat, baru-baru ini kedatangan pejabat pusat, dan nanti direncanakan agustus nanti Jokowi akan datang untuk meresmikan jembatan sebatik. Ya, Cuma terkadang ada banyak perubahan-perubahan dadakan yang terjadi sehingga menyebabkan banyak hal yang terkendala.
Fahmi	: Program apa saja yang di lakukan BPPD dalam mengelola Perbatasan ?
Kasubag	: Sebelum menjadi bagian, waktu menjadi badan kami memiliki banyak program kerja yang bagus untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan. Akan tetapi karena berhubung kami sudah menjadi bagian kecil sehingga program kami pun mengecil. Setidaknya ada 3 program yang kami lakukan : 1) Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan, Program ini hanya bersifat kordinasi saja, tanpa bisa menyentuh program fisik, hal ini

		berkaitan terbatasnya gerak BNPP karena hanya menjadi sebagai bagian. 2) Pelatihan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kawasan Perbatasan. Program ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada masyarakat perbatasan agar dapat berdikari dan berjiwa mandiri. Adapun program yang pernah dilakukan berkaitan dengan pelatihan yaitu pelatihan pengelolaan kelapa menggunakan mesin. 3) Fasilitasi dan Kerjasama Investoris Patok Batas Negara. Salah satu tugas dari BPPD ini adalah memfasilitasi pemerintah pusat yang datang dari Jakarta untuk melihat situasi yang ada di kawasan Perbatasan. Sehingga BPPD yang kemudian bertugas sebagai protokoler daerah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pemerintah selama di perbatasan.
Fahmi	:	Kendala Apa yang dihadapi BPPD?
Kasubag	:	Ketika lembaga ini berubah menjadi bagian, maka banyak kendala yang kami hadapi, seperti dalam program. Kami tidak bisa melakukan program yang berhubungan fisik, seperti pembangunan, dan pengadaan. Sehingga kita hanya sebagai kordinasi dan fasilitator. Kita hanya sebagai perencanaan aja, tetapi untuk pelaksanaannya akan dilakukan oleh departemen PU atau lain sebagainya. Berbeda waktu dulu kita masih menjadi badan, kita mulai dari perencanaan, dan penjalanan programnya kita semua yang jalankan.
Fahmi	:	Sejak Kapan BPPD menjadi bagian ?
Kasubag	:	Kita berubah menjadi bagian sejak tahun 2016. Awal januari 2016 kita sudah menjadi bagian semuanya.
Fahmi	:	Bagaimana Peran Bagian kerjasama ini terhadap ekonomi?
Kasubag	:	Sebenarnya Sekarang kita terbentur pada masalah anggaran, terlihat program Jokowi mengarah kepada pembangunan besar-besaran, mulai dari pembangunan tol, kereta, jalan, dan lain sebagainya. Sehingga dana yang sampai untuk pengelolaan perbatasannya terbatas, bahkan defisit. Dan untuk saat ini kebanyakan duduk manis dikantor saja, karena gak bisa kerja apa-apa, sampai anggaran kita bisa normal kembali. Sebenarnya imbasnya besar, seperti gaji honorer bahkan bisa dirumahkan dulu. Oleh karena itu, berdasarkan ini, sejauh ini kami bergerak untuk ekonomi belum terlalu terlihat, karena terbatasnya anggara itu tadi.

Wawancara Dengan Masyarakat Perbatasan

Responden

No	Nama Responden	Pekerjaan
1	Arifai	Karyawan
2	H. Syamsuddin	Pengusaha
3	H.J. Maupe	Tokoh Masyarakat
4	M. Daud	Petani
5	H. Agus	Pedagang

Pertanyaan :

1. Apakah peredaran barang dikuasai produk Malaysia?

- Hj. Maupe : iya. Semuanya orang sebatik tuh rata-rata pakai barang Malaysia. Lihat saja di dapurnya itu rata-rata ada gas dari Malaysia, juga gula Malaysia. Banyaklah barang Malaysia

sudah dipakai lama. Bahkan, kami kayaknya lebih paham produk-produk Malaysia dari pada produk Indonesia sendiri. terutama sembako dan gasnya.

➤ **Daud** : Iya, produk Malaysia banyak beredar di sini.

2. Faktor apa yang menjadi penyebab peredaran barang Malaysia di sebatik?

➤ **Arifai** : ya, mungkin karena murah. Biasanya disini barang-barang Indonesia itu lebih mahal dibandingkan dengan barang dari Malaysia.

➤ **Hj. Maupe** : karena jarak tawau Malaysia lebih dekat. Jadi barang-barang Malaysia lebih banyak disini. Kemudian ini sudah lama masuknya, waktu masih susah dan belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah.

3. Apakah uang ringgit masih beredar di pulau Sebatik ?

➤ **Arifai** : Ringgit di pulau sebatik ini masih berlaku sampai sekarang di seluruh pulau sebatik. Terserah kita mau kewarung mana, kasih duit ringgit, pasti diterimanya. Bahkan dimana-dimana masih banyak orang bayarnya pakai ringgit. Tapi sekarang sudah mulai ketat, sudah banyak larangan-larangan dipakai.

4. Apakah Benar Pulau Sebatik ini sangat bergantung dengan Malaysia?

➤ **Arifai** : Sebatik dan Tawau (Malaysia) itu tidak bisa dipisahkan, itu sudah terjadi dari berapuluh-puluh tahun lamanya, sehingga semuanya berasal dari tawau Malaysia. Orang-orang sebatik dengan tawau sudah saling membutuhkan satu-sama lainnya. Orang sebatik butuh duit sehingga banya menjual hasil pertanian kesana. Dan orang tawau butuh barang untuk dikelola lagi.

➤ **Hj. Maupe** : kalau tidak ada Malaysia, bisa-bisa mati perekonomian di Pulau Sebatik ini. Karna rata-rata masyarakat menjual perkebunannya ke Malaysia, karena biaya transportasi lebih murah. Jadi untung bisa lebih banyak. Kalau kita jual ke tarakan biaya angkut kesananya mahal. Bukan untung malah bisa jadi rugi kita nanti.

➤ **Agus** : Saya ini pedagang, saya sangat bergantung dengan tawau. Karena hasil pisang saya semuanya saya kirim ke Malaysia.

5. Bagaimana Peran Pemerintah sejauh ini?

➤ **H.Syamsuddin** : Saya ini profesinya sebagai pengusaha yang sudah bertahun tahun, dimana saya menjual dari Tawau Malaysia kemudian dipasarkan di Sebatik. Tidak ada peran pemerintah, karena semua mahal. Tidak ada dikasih murah. Jadi, bagaimana bisa berkembang kita pengusaha ini.



Sekretaris Camat Sebatik Tengah, Pulau Sebatik



Kasubag Bagian Batas Negara Dan Kerjasama Kabupaten Nunukan



Pisang Sebatik yang akan dijual ke Malaysia



Tokoh Masyarakat Sebatik

CURRICULUM VITAE

Fahmi Syam

Fahmisyam@gmail.com

Telp. 082136004706



Data Pribadi

Nama : Fahmi Syam
Tempat / Tanggal Lahir : Tarakan, 14 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum menikah
Alamat : Jalan Mahoni, RT 07, RW 02, No 21 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
E-Mail : Fahmisyam@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak (1997-1998)

Taman kanak-kanak Raudhatul Atfal Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Jembatan Besi, Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

2. Sekolah Dasar (1998-2004)

SDN 023 Jembatan Besi, Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

3. Sekolah Menengah Pertama (2004-2007)

MTs (Madrasah Tsanawiyah) Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Jembatan Besi, Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

4. Sekolah Menengah Atas (2007-2010)

MA (Madrasah Aliyah) Nadhlatul Ulum Soreang Maros, Sulawesi Selatan

5. Universitas (Strata satu) 2011-2015.

International Islamic University Malaysia (IIU Malaysia), Fakultas Islamic Revealed Knowledge And Human Science, Konsentrasi Fiqh and Ushul Fiqh. Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia.

6. Universitas (strata dua) 2015 - 2017

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam.

Pengalaman Organisasi

- Anggota Departemen Pengembangan Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (DPO PPIM) masa periode 2010-2011.
- Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (DPO PPIM) Masa periode 2011-2012.
- Sekretaris Jendral Persatuan Pelajar Indonesia di International Islamic University Malaysia (PPI IIUM) Masa Periode 2012-2013.
- Ketua Persatuan Pelajar Sulawesi Selatan SeMalaysia (PPSS Malaysia) Masa Periode 2012-2015.
- Wakil Presiden Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia di International Islamic University Malaysia, Masa Periode 2013-2014.
- Anggota Keluarga Mahasiswa Nadhlatul Ulum Malaysia (KMNU Malaysia), masa periode 2012-2014
- Ketua Pengkaderan Keluarga Mahasiswa Nadhlatul Ulum Malaysia (KMNU MALAYSIA), Masa Periode 2015.
- Ketua Departemen Hukum dan Advokasi persatuan pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) masa periode 2013-2014.

Penghargaan-Penghargaan

- Juara I Lomba Pidato Bahasa Arab se-Kabupaten Maros, yang diselenggarakan oleh departemen agama kabupaten Maros, 2008.
- Juara III Lomba Pidato Bahasa Arab Se Sulawesi selatan dan Sulawesi barat, diselenggarakan oleh Pondok pesantren DDI Mangkoso, 2009.
- Juara III Lomba Pidato Bahasa Inggris se Kabupaten Maros yang diselenggarakan oleh british council. 2009.
- Peraih 'EXCELENT' kategori dalam pelatihan Bahasa Inggris, yang diselenggarakan oleh THE DAFFODILS ENGLISH COURSE, di Pare Kediri, Indonesia. 2010.

- Juara I Monolog Bahasa Inggris International Islamic University Malaysia, yang diselenggarakan oleh CEIPAD IIUM. 2011.
- Juara I (Peserta Terbaik) dalam “ISLAMIC UNDERSTANDING COURSE 2011” yang diselenggarakan oleh PPI IIUM Malaysia.
- Juara III Video Terbaik dalam acara “INTERNATIONAL FESTIVAL ISLAMIC VIDEO”, International Islamic University Malaysia 2012.
- Juara I “UMMATIC WEEK 2012” Kategori lomba Bola, International Islamic University Malaysia. 2013.
- Juara III “GARUDA CUP” cabang olahraga sepakbola. Di UKM, Malaysia 2015.
- Peraih Penghargaan Kemahiran “KANU MALAYSIA” yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan kanu Malaysia, Desember 2014.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA